

Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan entitas anaknya

Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Maret 2019 (tidak diaudit) dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut (tidak diaudit)

**Surat Pernyataan Direksi
mengenai Tanggung Jawab Direksi untuk**

**Laporan Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Maret 2019
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut (tidak diaudit)
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan Entitas Anaknya**

Atas nama Direksi, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Alex J. Sinaga
Alamat Kantor : Jl. Japati No.1 Bandung 40133
Alamat Domisili : Jl. Anggrek Nelimurni B-70 No. 38 Kelurahan Kemanggisan
Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat
Nomor Telepon : (022) 452 7101
Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Harry M. Zen
Alamat Kantor : Jl. Japati No.1 Bandung 40133
Alamat Domisili : Jl. H. Namin No. 48 A Kelurahan Cipete Utara
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Nomor Telepon : (022) 452 7201/ 021 520 9824
Jabatan : Direktur Keuangan

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas persiapan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk ("Perusahaan") dan entitas anak;
2. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak telah dipersiapkan dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia;
3. Seluruh informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak ini telah diungkapkan secara lengkap dan benar;
4. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
5. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan dan entitas anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

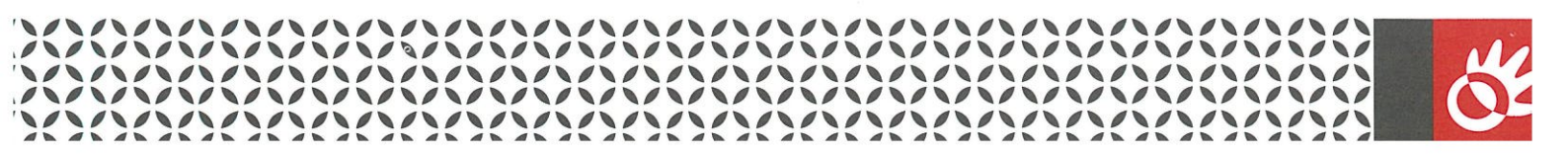
Jakarta, 2 Mei 2019



A 6000 Rupiah stamp with the text "METERAI TEMPEL" and "ENAM RIBU RUPIAH" is placed over the signatures. The stamp also contains the number "0A886AFF637576307".

Alex J. Sinaga
Direktur Utama

Harry M. Zen
Direktur Keuangan



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 MARET 2019 DAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(TIDAK DIAUDIT)**

DAFTAR ISI

	Halaman
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	2
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	3-4
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	6-124

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 (tidak diaudit) dan 31 Desember 2018 (diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2019	2018
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	2c,2e,2u,3,31,36	23.380	17.439
Aset keuangan lancar lainnya	2c,2e,2u,4,31,36	1.350	1.304
Piutang usaha - setelah dikurangi provisi penurunan nilai piutang Pihak berelasi Pihak ketiga	2g,2u,2ab,5,36 2c,31	2.664	2.126
Piutang lain-lain - setelah dikurangi provisi penurunan nilai piutang	2g,2u,36	454	727
Persediaan - setelah dikurangi provisi persediaan usang	2h,6	632	717
Aset tersedia untuk dijual	2j,9	314	340
Pajak dibayar di muka	2t,26	2.600	2.749
Tagihan restitusi pajak	2t,26	389	596
Aset lancar lainnya	2c,2i,2m,7,31	10.076	7.982
Jumlah Aset Lancar		<u>53.871</u>	<u>43.268</u>
ASET TIDAK LANCAR			
Penyertaan jangka panjang	2f,2u,8	2.504	2.472
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	2l,2m,2ab,9,34	145.922	143.248
Aset tak berwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi	2d,2k,2n,2ab,11	5.544	5.032
Aset pajak tangguhan - bersih	2t,26	2.558	2.504
Aset tidak lancar lainnya	2c,2g,2i,2n,2t,2u,10,26,31,36	8.712	9.672
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>165.240</u>	<u>162.928</u>
JUMLAH ASET		<u>219.111</u>	<u>206.196</u>
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha	2o,2u,12,36		
Pihak berelasi	2c,31	1.100	993
Pihak ketiga		16.682	13.773
Utang lain-lain	2u,36	310	448
Utang pajak	2t,26	3.566	1.180
Beban yang masih harus dibayar	2c,2u,13,31,36	12.161	12.769
Pendapatan diterima di muka	2r,14	5.095	5.190
Uang muka pelanggan	2c,31	1.593	1.569
Utang bank jangka pendek	2c,2p,2u,15a,31,36	3.774	4.043
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	2c,2m,2p,2u,15b,31,36	7.289	6.296
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		<u>51.570</u>	<u>46.261</u>
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	2t,26	1.292	1.252
Pendapatan diterima di muka	2r,14	735	652
Liabilitas diestimasi penghargaan masa kerja	2s,30	873	852
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya	2s,29	5.705	5.555
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	2c,2m,2p,2u,16,31,36	32.455	33.748
Liabilitas lainnya	2u,2o	563	573
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		<u>41.623</u>	<u>42.632</u>
JUMLAH LIABILITAS		<u>93.193</u>	<u>88.893</u>
EKUITAS			
Modal saham	1c,18	4.953	4.953
Tambahan modal disetor	2v,19	2.455	2.455
Komponen ekuitas lainnya	2f,2u,21	484	507
Saldo laba			
Ditetapkan penggunaannya	28	15.337	15.337
Belum ditentukan penggunaannya		81.879	75.658
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk - bersih		105.108	98.910
Kepentingan nonpengendali	2b,17	20.810	18.393
JUMLAH EKUITAS		<u>125.918</u>	<u>117.303</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>219.111</u>	<u>206.196</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2019 dan 2018 (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2019	2018
PENDAPATAN	2c,2r,22,31	34.840	32.343
Beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi	2c,2r,24,31	(10.709)	(10.244)
Beban penyusutan dan amortisasi	2k,2l,2m,9,11	(5.642)	(5.373)
Beban karyawan	2c,2r,2s,23,31	(3.132)	(3.035)
Beban interkoneksi	2c,2r,31	(1.268)	(828)
Beban umum dan administrasi	2c,2r,25,31	(1.294)	(1.250)
Beban pemasaran	2c,2r,31	(907)	(870)
Rugi selisih kurs - bersih	2q	(45)	(5)
Penghasilan lain-lain	2l,2r,9c	363	303
Beban lain-lain	2r,9c	(177)	(163)
LABA USAHA		12.029	10.878
Penghasilan pendanaan	2c,31	276	318
Biaya pendanaan	2c,2p,2r,31	(996)	(678)
Bagian laba bersih entitas asosiasi	2f,8	20	14
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		11.329	10.532
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN	2t,26		
Pajak kini		(2.849)	(2.571)
Pajak tangguhan		24	17
		<u>(2.825)</u>	<u>(2.554)</u>
LABA TAHUN BERJALAN		8.504	7.978
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
<i>Penghasilan komprehensif lain yang akan direklasifikasikan ke laba rugi pada periode berikutnya:</i>			
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	2f,2q,21	(26)	47
Perubahan bersih nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	2u,21	3	(1)
Bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi	2f,8	(4)	0
<i>Penghasilan komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi pada periode berikutnya:</i>			
Laba aktuarial - bersih	2s,29	-	-
Penghasilan komprehensif lain - bersih		<u>(27)</u>	<u>46</u>
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		8.477	8.024
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk		6.224	5.734
Kepentingan nonpengendali	2b,17	2.280	2.244
		<u>8.504</u>	<u>7.978</u>
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk		6.197	5.780
Kepentingan nonpengendali	2b	2.280	2.244
		<u>8.477</u>	<u>8.024</u>
LABA PER SAHAM DASAR			
(dalam jumlah penuh)	2x,27		
Laba bersih per saham		62,83	57,88
Laba bersih per ADS (100 saham Seri B per ADS)		6.282,92	5.788,28

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2019 dan 2018 (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Distribusikan kepada pemilik entitas induk										
Uraian	Catatan	Modal Saham	Tambahkan modal disetor	Modal saham yang diperoleh kembali	Komponen ekuitas lainnya	Saldo laba		Jumlah bersih	Kepentingan nonpengendali	Jumlah ekuitas
						Ditetapkan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya			
Saldo, 1 Januari 2019		4.953	2.455	-	507	15.337	75.658	98.910	18.393	117.303
Penambahan setoran modal anak perusahaan		-	-	-	-	-	-	-	59	59
Akuisisi bisnis		-	-	-	-	-	-	-	37	37
Akuisisi kepemilikan kepentingan non-pengendali		-	-	-	-	-	-	-	42	42
Dividen kas	17,28	-	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)
Laba tahun berjalan	2b,17	-	-	-	-	-	6.224	6.224	2.280	8.504
Penghasilan komprehensif lain - bersih	2f,2q,2s,2u,17	-	-	-	(23)	-	(3)	(26)	-	(26)
Saldo, 31 Maret 2019		4.953	2.455	-	484	15.337	81.879	105.108	20.810	125.918

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2019 dan 2018 (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Distribusikan kepada pemilik entitas induk

Uraian	Catatan	Modal Saham	Tambahannya modal disetor	Modal saham yang diperoleh kembali	Komponen ekuitas lainnya	Saldo laba		Jumlah bersih	Kepentingan nonpengendali	Jumlah ekuitas
						Ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya			
Saldo, 1 Januari 2018		5.040	4.931	(2.541)	387	15.337	69.559	92.713	19.417	112.130
Penambahan setoran modal anak perusahaan		-	-	-	-	-	-	-	12	12
Dividen kas	17,28	-	-	-	-	-	-	-	(25)	(25)
Laba tahun berjalan	2b,17	-	-	-	-	-	5.734	5.734	2.244	7.978
Penghasilan komprehensif lain - bersih	2f,2q,2s,2u,17	-	-	-	46	-	-	46	-	46
Saldo, 31 Maret 2018		5.040	4.931	(2.541)	433	15.337	75.293	98.493	21.648	120.141

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2019 dan 2018 (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2019	2018
ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI			
Penerimaan kas dari pelanggan dan operator lain		31.366	28.636
Penerimaan pajak pertambahan nilai - bersih		804	368
Pendapatan bunga diterima		257	306
Pembayaran kas untuk beban		(14.607)	(14.553)
Pembayaran kas kepada karyawan		(2.724)	(2.431)
Pembayaran pajak penghasilan dan final		(1.176)	(1.954)
Pembayaran beban bunga		(955)	(743)
Penerimaan (pembayaran) kas lainnya - bersih		75	(63)
Arus kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan operasi		13.040	9.566
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI			
Hasil dari penjualan aset tetap	9	267	43
Hasil dari klaim asuransi	9	54	113
Pembelian aset tetap	9, 38	(4.565)	(5.467)
Pembelian bisnis setelah dikurangi kas yang diperoleh	1d	(1.108)	-
Pembelian aset takberwujud	11, 38	(261)	(1.158)
Penempatan deposito berjangka dan aset keuangan tersedia untuk dijual		(252)	538
Pembayaran uang muka pembelian aset tetap		(221)	(340)
Penambahan penyertaan jangka panjang	8	(16)	(27)
Kenaikan pada aset lainnya		(106)	(108)
Arus kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan investasi		(6.208)	(6.406)
ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN			
Pencairan utang bank dan pinjaman lainnya	15, 16	3.175	2.701
Penerimaan setoran modal pada entitas anak dari pemegang saham nonpengendali		59	12
Pembayaran dividen kas kepada pemegang saham nonpengendali entitas anak		15	(25)
Pembayaran utang bank dan pinjaman lainnya	15, 16	(4.132)	(2.063)
Arus kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan pendanaan		(883)	625
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		5.949	3.785
DAMPAK PERUBAHAN KURS TERHADAP KAS DAN SETARA KAS		(8)	38
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	3	17.439	25.145
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	3	23.380	28.968

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk ("Perusahaan") pada mulanya merupakan bagian dari "*Post en Telegraafdienst*", yang didirikan dan beroperasi secara komersial pada tahun 1884 berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 7 tanggal 27 Maret 1884 dan diumumkan dalam Berita Negara Hindia Belanda No. 52 tanggal 3 April 1884.

Pada tahun 1991, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1991, status Perusahaan diubah menjadi perseroan terbatas milik negara ("Persero"). Entitas induk terakhir Perusahaan adalah Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah") (Catatan 1c dan 18).

Perusahaan didirikan berdasarkan akta notaris Imas Fatimah, S.H. No. 128 tanggal 24 September 1991. Akta pendirian tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-6870.HT.01.01.Th.1991 tanggal 19 November 1991 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 5 tanggal 17 Januari 1992, Tambahan No. 210. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali diubah, perubahan terakhir dilakukan sehubungan dengan adanya kebutuhan Perusahaan untuk meningkatkan fleksibilitas dan kemandirian Dewan Komisaris dalam memberikan persetujuan atas tindakan Direksi yang melebihi batasan nilai tertentu serta kebutuhan Perusahaan untuk mengubah ketentuan terkait modal ditempatkan dan disetor, serta modal dasar sehubungan dengan adanya pengalihan saham hasil pembelian kembali melalui penarikan kembali dengan cara pengurangan modal, sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., Mkn. No. 34 dan No. 35 tanggal 15 Mei 2018. Perubahan telah diterima dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan surat No. AHU-AH.01.03.0214555 tanggal 8 Juni 2018 dan Keputusan Menkumham No. AHU-0013328.AH.01.02 tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi dan informatika, serta optimalisasi sumber daya Perusahaan untuk menyediakan barang dan/ atau jasa berkualitas tinggi dan kompetitif untuk mendapatkan/ mengejar laba guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip Perusahaan Terbatas. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, Perusahaan menjalankan kegiatan yang meliputi:

- a. Usaha utama:
 - i. Merencanakan, membangun, menyediakan, mengembangkan, mengoperasikan, memasarkan atau menjual atau menyewakan, dan memelihara jaringan telekomunikasi dan informatika dalam arti yang luas dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii. Merencanakan, mengembangkan, menyediakan, memasarkan/menjual, dan meningkatkan layanan jasa telekomunikasi dan informatika dalam arti yang luas dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - iii. Melakukan investasi termasuk penyertaan modal pada perusahaan lainnya sejalan dengan dan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.
- b. Usaha penunjang:
 - i. Menyediakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika.
 - ii. Menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya yang dimiliki Perusahaan, yang antara lain pemanfaatan aset tetap dan aset bergerak, fasilitas sistem informasi, fasilitas pendidikan dan pelatihan, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan.
 - iii. Bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka optimalisasi sumber daya informatika, komunikasi atau teknologi yang dimiliki oleh pihak lain pelaku industri informatika, komunikasi dan teknologi, sejalan dengan dan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Jalan Japati No. 1, Bandung, Jawa Barat.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

Perusahaan memiliki beberapa izin penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa dari Pemerintah yang berlaku sampai jangka waktu yang tidak terbatas selama Perusahaan tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam izin-izin tersebut. Untuk setiap izin, yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika ("Menkominfo"), evaluasi dilakukan setiap tahun dan evaluasi menyeluruh dilakukan setiap 5 (lima) tahun. Perusahaan wajib menyampaikan laporan atas penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa berdasarkan izin-izin tersebut diatas setiap tahun kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika ("DJPPPI") sebelumnya Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi ("DJPT").

Laporan tersebut meliputi beberapa informasi seperti kemajuan pengembangan jaringan, pencapaian standar kualitas jasa, jumlah pelanggan, pembayaran biaya atas hak penyelenggaraan, dan kontribusi pelayanan universal, sementara untuk Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik, Jasa Interkoneksi Internet, dan Jasa Akses Internet terdapat tambahan informasi yang dipersyaratkan seperti kinerja operasi, segmen pelanggan, lalu lintas, dan pendapatan kotor.

Rincian izin-izin tersebut adalah sebagai berikut:

Izin	No. Izin	Jenis Jasa	Tanggal penetapan/ perpanjangan
Izin penerbit uang elektronik	Izin Bank Indonesia 11/432/DSAP	Penerbit uang elektronik	3 Juli 2009
Izin penyelenggaraan pengiriman uang	Izin Bank Indonesia No. 11/23/Bd/8	Penyelenggaraan pengiriman uang	5 Agustus 2009
Izin Penyelenggaraan jasa internet telephoni untuk keperluan publik	127/KEP/DJPPPI/ KOMINFO/3/2016	Jasa internet telephoni untuk keperluan publik	30 Maret 2016
Izin penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh	839/KEP/ M.KOMINFO/05/2016	Jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh	16 Mei 2016
Izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup	844/KEP/ M.KOMINFO/05/2016	Jaringan tetap tertutup	16 Mei 2016
Izin penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional	846/KEP/ M.KOMINFO/05/2016	Jaringan tetap sambungan internasional	16 Mei 2016
Izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis <i>circuit switched</i>	948/KEP/ M.KOMINFO/05/2016	Jaringan tetap lokal berbasis <i>circuit switched</i>	31 Mei 2016
Izin penyelenggaraan jasa sistem komunikasi data	191/KEP/DJPPPI/ KOMINFO/10/2016	Jasa sistem komunikasi data	31 Oktober 2016

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

Izin	No. Izin	Jenis Jasa	Tanggal penetapan/ perpanjangan
Izin penyelenggaraan jasa akses internet	2176/KEP/ M.KOMINFO/12/2016	Jasa akses internet	30 Desember 2016
Izin penyelenggaraan jasa penyediaan konten	1040/KEP/ M.KOMINFO/16/2017	Jasa penyediaan konten	16 Mei 2017
Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet	1004/KEP/ M.KOMINFO 2018	Jasa interkoneksi internet	26 Desember 2018

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, *Corporate Secretary*, *Internal Audit*, dan Karyawan

1. Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan keputusan yang dibuat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) yang dinyatakan dalam akta notaris Ashoya Ratam, S.H., Mkn., No. 54 tanggal 27 April 2018, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebagai berikut:

	2019	2018
Komisaris Utama	Hendri Saparini	Hendri Saparini
Komisaris	Edwin Hidayat Abdullah	Edwin Hidayat Abdullah
Komisaris	Rinaldi Firmansyah	Rinaldi Firmansyah
Komisaris	Isa Rachmatarwata	Isa Rachmatarwata
Komisaris Independen	Margiyono Darsasumarja	Margiyono Darsasumarja
Komisaris Independen	Pamijati Pamela Johanna	Pamijati Pamela Johanna
Komisaris Independen	Cahyana Ahmadjayadi	Cahyana Ahmadjayadi
Direktur Utama	Alex Janangkih Sinaga	Alex Janangkih Sinaga
Direktur Keuangan	Harry Mozarta Zen	Harry Mozarta Zen
Direktur <i>Digital and Strategic Portfolio</i>	David Bangun	David Bangun
Direktur <i>Enterprise and Business Service</i>	Dian Rachmawan	Dian Rachmawan
Direktur <i>Wholesale and International Services</i>	Abdus Somad Arief	Abdus Somad Arief
Direktur <i>Human Capital Management</i>	Herdy Rosadi Harman	Herdy Rosadi Harman
Direktur <i>Network, Information Technology and Solution</i>	Zulhelfi Abidin	Zulhelfi Abidin
Direktur <i>Consumer Service</i>	Siti Choiriana	Siti Choiriana

* Dolfie Othniel Fredric Palit telah ditetapkan sebagai calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhitung tanggal 20 September 2018, sehingga masa jabatan yang bersangkutan sebagai Komisaris Independen perusahaan berakhir demi hukum.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, *Corporate Secretary*, Internal Audit, dan Karyawan (lanjutan)

2. Komite Audit, *Corporate Secretary*, dan Internal Audit

Susunan Komite Audit, *Corporate Secretary*, dan *Internal Audit* Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

	2019	2018
Ketua	Margiyono Darsasumarja	Margiyono Darsasumarja
Sekretaris	Tjatur Purwadi	Tjatur Purwadi
Anggota	Rinaldi Firmansyah	Rinaldi Firmansyah
Anggota	Sarimin Mietra Sardi	Sarimin Mietra Sardi
Anggota	Cahyana Ahmadjayadi	Cahyana Ahmadjayadi
<i>Corporate Secretary</i>	Andi Setiawan	Andi Setiawan
Internal Audit	Harry Suseno Hadisoebroto	Harry Suseno Hadisoebroto

3. Karyawan

Jumlah karyawan Perusahaan dan entitas anak ("Grup") pada tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah 24.329 orang dan 24.071 orang (tidak diaudit).

c. Penawaran umum efek Perusahaan

Jumlah saham Perusahaan sesaat sebelum penawaran umum perdana (*Initial Public Offering* atau "IPO") adalah 8.400.000.000, yang terdiri dari 8.399.999.999 saham Seri B dan 1 saham Seri A Dwiwarna yang seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah. Pada tanggal 14 November 1995, Pemerintah menjual saham Perusahaan yang terdiri dari 933.333.000 saham baru Seri B dan 233.334.000 saham Seri B milik Pemerintah kepada masyarakat melalui IPO di Bursa Efek Indonesia ("BEI"), dan penawaran dan pencatatan di Bursa Efek New York ("NYSE") dan Bursa Efek London ("LSE") atas 700.000.000 saham Seri B milik Pemerintah dalam bentuk *American Depositary Shares* ("ADS"). Terdapat 35.000.000 ADS dan masing-masing ADS mewakili 20 saham Seri B pada saat itu.

Pada bulan Desember 1996, Pemerintah menjual saham Perusahaan sebanyak 388.000.000 saham Seri B dan selanjutnya pada tahun 1997, Pemerintah membagikan 2.670.300 saham Seri B sebagai insentif bagi para pemegang saham Perusahaan yang tidak menjual sahamnya selama satu tahun terhitung sejak tanggal IPO. Pada bulan Mei 1999, Pemerintah kembali menjual 898.000.000 saham Seri B.

Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, pada RUPST Perusahaan tanggal 16 April 1999, para pemegang saham Perusahaan memutuskan untuk meningkatkan modal ditempatkan yang berasal dari kapitalisasi sebagian tambahan modal disetor melalui pembagian saham bonus sejumlah 746.666.640 lembar saham. Pembagian saham bonus kepada para pemegang saham Perusahaan dilakukan pada bulan Agustus 1999. Pada tanggal 16 Agustus 2007, Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas telah diamandemen dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berlaku efektif pada tanggal yang sama. Pemberlakuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tidak berdampak terhadap penawaran umum efek Perusahaan. Perusahaan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang tersebut.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

c. Penawaran umum efek Perusahaan (lanjutan)

Pada bulan Desember 2001, Pemerintah menjual 1.200.000.000 saham atau 11,9% dari jumlah saham Seri B yang beredar. Pada bulan Juli 2002, Pemerintah kembali menjual 312.000.000 saham atau 3,1% dari jumlah saham Seri B yang beredar.

Berdasarkan hasil RUPST Perusahaan yang dinyatakan dalam akta notaris A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M. No. 26 tanggal 30 Juli 2004, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pemecahan saham Perusahaan untuk Seri A Dwiwarna dan Seri B dari 1 menjadi 2. Untuk 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp500 dipecah menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp250 dan 1 saham Seri B dengan nilai nominal Rp250. Jumlah modal saham dasar Perusahaan setelah pemecahan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 39.999.999.999 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 79.999.999.999 saham Seri B, dan jumlah modal saham ditempatkan Perusahaan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 10.079.999.639 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 20.159.999.279 saham Seri B. Setelah pemecahan saham, setiap ADS mewakili 40 saham Seri B.

Berdasarkan keputusan RUPSLB Perusahaan tanggal 21 Desember 2005, RUPST Perusahaan tanggal 29 Juni 2007, tanggal 20 Juni 2008, dan tanggal 19 Mei 2011 para pemegang saham Perusahaan menyetujui masing-masing rencana tahap I, II, III dan IV untuk pembelian kembali saham Seri B (Catatan 20).

Pada tanggal 21 Desember 2005 sampai dengan tanggal 20 Juni 2007, Perusahaan melakukan pembelian saham kembali sebanyak 211.290.500 saham dari publik yang merupakan program pembelian kembali saham tahap pertama. Pada tanggal 30 Juli 2013, Perusahaan menjual kembali seluruh saham tersebut (Catatan 20).

Berdasarkan keputusan RUPST Perusahaan tanggal 19 April 2013 yang dinyatakan dalam akta notaris No. 38 tanggal 19 April 2013 oleh Ashoya Ratam, S.H., MKn., para pemegang saham Perusahaan menyetujui perubahan rencana Perusahaan atas penggunaan saham yang diperoleh kembali tahap III (Catatan 20).

Berdasarkan keputusan RUPST Perusahaan tanggal 19 April 2013 yang dinyatakan dalam akta notaris No. 38 tanggal 19 April 2013 oleh Ashoya Ratam, S.H., MKn., para pemegang saham Perusahaan menyetujui pemecahan saham Perusahaan untuk Seri A Dwiwarna dan Seri B dari 1 menjadi 5. Untuk 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp250 dipecah menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp50 dan 4 saham Seri B dengan nilai nominal Rp50. Jumlah modal saham dasar Perusahaan setelah pemecahan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 79.999.999.999 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 399.999.999.999 saham Seri B. Jumlah modal saham ditempatkan Perusahaan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 20.159.999.279 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 100.799.996.399 saham Seri B. Setelah pemecahan saham, setiap ADS mewakili 200 saham seri B. Efektif tanggal 26 Oktober 2016, Perusahaan melakukan perubahan rasio *Depositary Receipt* dari 1 ADS mewakili 200 saham seri B menjadi 1 ADS mewakili 100 saham seri B (Catatan 18). Informasi laba bersih per ADS pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya konsolidasian telah disesuaikan dengan perubahan rasio ini.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

c. Penawaran umum efek Perusahaan (lanjutan)

Pada tanggal 16 Mei dan 5 Juni 2014, Perusahaan telah melakukan pembatalan pencatatan pada Bursa Efek Tokyo ("TSE") dan *delisting* pada LSE.

Pada tanggal 31 Maret 2019, seluruh saham Seri B Perusahaan telah dicatitkan pada BEI dan 68.824.108 ADS telah dicatitkan pada NYSE (Catatan 18).

Pada tanggal 25 Juni 2010, Perusahaan menerbitkan obligasi Rupiah kedua masing-masing sebesar Rp1.005 miliar untuk Seri A yang berjangka waktu 5 (lima) tahun dan Rp1.995 miliar untuk Seri B yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dicatitkan di BEI (Catatan 16b).

Pada tanggal 23 Juni 2015, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 masing-masing sebesar Rp2.200 miliar untuk Seri A yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun, Rp2.100 miliar untuk Seri B yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun, Rp1.200 miliar untuk Seri C yang berjangka waktu 15 (lima belas) tahun dan Rp1.500 miliar untuk Seri D yang berjangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dan dicatitkan di BEI (Catatan 16b).

Pada tanggal 21 Desember 2015, Perusahaan telah menjual kembali sisa saham hasil pembelian kembali saham tahap III (Catatan 20).

Pada tanggal 29 Juni 2016, Perusahaan telah menjual kembali saham hasil pembelian kembali saham tahap IV (Catatan 20).

Berdasarkan keputusan RUPST Perusahaan tanggal 27 April 2018 yang dinyatakan dalam akta notaris No.54 tanggal 27 April 2018 oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., para pemegang saham menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali sejumlah 1.737.779.800 lembar saham dengan cara pengurangan modal ditempatkan dan disetorkan penuh (Catatan 20).

d. Entitas anak

Pada tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018, Perusahaan telah mengkonsolidasikan laporan keuangan semua entitas anak yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung, sebagai berikut (Catatan 2b dan 2d):

(i) Entitas anak dengan kepemilikan langsung:

Entitas anak/ domisili	Jenis usaha/tanggal pendirian atau akuisisi oleh Perusahaan	Tahun dimulainya operasi komersial	Persentase hak kepemilikan		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			2019	2018	2019	2018
PT Telekomunikasi Selular ("Telkomsel"), Jakarta, Indonesia	Telekomunikasi - operator fasilitas telekomunikasi dan jasa telepon seluler menggunakan teknologi <i>Global System for Mobile Communication</i> ("GSM")/ 26 Mei 1995	1995	65	65	89.738	82.650
PT Multimedia Nusantara ("Metra"), Jakarta, Indonesia	Jasa jaringan telekomunikasi dan multimedia/ 9 Mei 2003	1998	100	100	17.929	16.524
PT Dayamitra Telekomunikasi ("Dayamitra"), Jakarta, Indonesia	Telekomunikasi/ 17 Mei 2001	1995	100	100	16.605	13.053

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak (lanjutan)

(i) Entitas anak dengan kepemilikan langsung (lanjutan):

Entitas anak/ domisili	Jenis usaha/tanggal pendirian atau akuisisi oleh Perusahaan	Tahun dimulainya operasi komersial	Persentase hak kepemilikan		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			2019	2018	2019	2018
PT Telekomunikasi Indonesia International ("TI"), Jakarta, Indonesia	Telekomunikasi/ 31 Juli 2003	1995	100	100	10.711	10.408
PT Graha Sarana Duta ("GSD") Jakarta, Indonesia	Penyewaan kantor dan manajemen gedung dan jasa pemeliharaan, konsultan sipil, dan pengembang/ 25 April 2001	1982	100	100	5.776	5.805
PT Telkom Akses ("Telkom Akses"), Jakarta, Indonesia	Pembangunan, jasa dan perdagangan bidang telekomunikasi/ 26 November 2012	2013	100	100	4.260	4.244
PT PINS Indonesia ("PINS"), Jakarta, Indonesia	Jasa dan pembangunan telekomunikasi/ 15 Agustus 2002	1995	100	100	4.104	4.004
PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia ("Telkom Infratel"), Jakarta, Indonesia	Pembangunan, jasa dan perdagangan bidang telekomunikasi/ 16 Januari 2014	2014	100	100	3.333	3.351
PT Telkom Satelit Indonesia* ("Telkomsat"), sebelumnya PT Patra Telekomunikasi Indonesia Jakarta, Indonesia	Telekomunikasi - menyediakan sistem komunikasi satelit, jasa dan sarana terkait/ 28 September 1995	1996	100	100	3.209	3.192
PT Metra-net ("Metranet"), Jakarta Indonesia	Jasa portal multimedia/ 17 April 2009	2009	100	100	992	782
PT Jalin Pembayaran Nusantara ("Jalin"), Jakarta, Indonesia	Jasa pembayaran - kegiatan prinsipal, kegiatan switching, kliring, dan settlement/ 3 November 2016	2016	100	100	316	298
PT Napsindo Primatel Internasional ("Napsindo"), Jakarta, Indonesia	Telekomunikasi - menyediakan Network, Access Point (NAP), Voice Over Data (VOD), dan jasa terkait lainnya/ 29 Desember 1998	1999; berhenti beroperasi pada tanggal 13 Januari 2006	60	60	5	5

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak (lanjutan)

(ii) Entitas anak dengan kepemilikan tidak langsung:

Entitas anak/ domisili	Jenis usaha/tanggal pendirian atau akuisisi oleh Perusahaan	Tahun dimulainya operasi komersial	Presentase hak kepemilikan		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			2019	2018	2019	2018
PT Sigma Cipta Caraka ("Sigma"), Tangerang, Indonesia	Jasa teknologi informatika - implementasi dan integrasi sistem, outsourcing, dan pemeliharaan lisensi piranti lunak/ 1 Mei 1987	1988	100	100	8.945	7.785
Telekomunikasi Indonesia International Pte. Ltd., Singapura	Telekomunikasi/ 6 Desember 2007	2008	100	100	3.347	3.413
PT Infomedia Nusantara ("Infomedia"), Jakarta, Indonesia	Jasa data dan informasi - menyediakan jasa informasi telekomunikasi dan jasa informasi lainnya dalam bentuk media cetak dan elektronik, dan jasa call center/ 22 September 1999	1984	100	100	2.292	2.389
PT Telkom Landmark Tower ("TLT"), Jakarta, Indonesia	Jasa pengembangan dan manajemen properti/ 1 Februari 2012	2012	55	55	2.196	2.128
PT Metra Digital Media ("MD Media"), Jakarta, Indonesia	Jasa layanan informasi dalam bentuk direktori khusus/ 22 Januari 2013	2013	100	100	1.509	1.339
Telekomunikasi Indonesia International Ltd., Hong Kong	Telekomunikasi/ 8 Desember 2010	2010	100	100	1.446	1.185
PT Metra Digital Investama ("MDI"), Jakarta, Indonesia	Jasa perdagangan informasi dan teknologi multimedia, hiburan dan investasi/ 8 Januari 2013	2013	100	100	978	979
PT Finnet Indonesia ("Finnet"), Jakarta, Indonesia	Jasa teknologi informatika/ 31 Oktober 2005	2006	60	60	892	1.011
PT Persada Sokka Tama ("PST"), Jakarta, Indonesia	Jasa penyediaan sarana jaringan telekomunikasi/ 19 Februari 2019	2008	95	-	870	-
TS Global Network Sdn. Bhd. ("TSGN") Petaling jaya, Malaysia	Jasa satelit/ 14 Desember 2017	1996	70	70	826	832
Telekomunikasi Indonesia International ("TL") S.A., Dili, Timor Leste	Telekomunikasi/ 11 September 2012	2012	100	100	651	677
PT Melon ("Melon"), Jakarta, Indonesia	Jasa penjualan konten digital/ 14 November 2016	2010	100	100	636	457

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak (lanjutan)

(ii) Entitas anak dengan kepemilikan tidak langsung (lanjutan):

Entitas anak/ domisili	Jenis usaha/tanggal pendirian atau akuisisi oleh Perusahaan	Tahun dimulainya operasi komersial	Presentase hak kepemilikan		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			2019	2018	2019	2018
PT Telkomsel Karya Inovasi ("TMI"), Jakarta, Indonesia	Jasa konsultan manajemen bisnis dan investasi modal/ 18 Januari 2019	2019	100	-	553	-
PT Swadharna Sarana Informatika ("Swadharna"), Jakarta, Indonesia	Jasa pengisian kas dan pemeliharaan ATM/ 2 April 2018	2001	51	51	515	460
PT Fintek Karya Nusantara ("Finarya"), Jakarta, Indonesia	Jasa penyedia pembayaran digital dan payment gateway/ 21 Februari 2019	2019	100	-	472	-
PT Administrasi Medika ("Ad Medika"), Jakarta, Indonesia	Jasa administrasi asuransi kesehatan/ 25 Februari 2010	2002	100	100	401	346
PT Graha Yasa Selaras ("GYS"), Jakarta, Indonesia	Jasa pariwisata/ 27 April 2012	2012	51	51	294	250
PT Nusantara Sukses Investasi ("NSI"), Jakarta, Indonesia	Jasa dan perdagangan/ 1 September 2014	2014	100	100	290	290
PT Metraplaza ("Metraplaza"), Jakarta, Indonesia	Jasa jaringan & e-commerce/ 9 April 2012	2012	60	60	149	168
Telekomunikasi Indonesia International Pty. Ltd., ("Telkom Australia"), Sydney, Australia	Telekomunikasi/ 9 Januari 2013	2013	100	100	129	115
PT Nutech Integrasi ("Nutech"), Jakarta, Indonesia	Jasa penyedia sistem integrator/ 13 Desember 2017	2001	60	60	104	93
Telekomunikasi Indonesia Intl (Malaysia) Sdn. Bhd ("Telin Malaysia"), Malaysia	Telekomunikasi/ 2 Juli 2013	2013	70	70	85	76
Telekomunikasi Indonesia International Inc., ("Telkom USA"), Los Angeles, USA	Telekomunikasi/ 11 Desember 2013	2014	100	100	71	57
PT Satelit Multimedia Indonesia ("SMI"), Jakarta, Indonesia	Jasa satelit/ 25 Maret 2013	2013	100	100	19	16

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

e. Entitas anak (lanjutan)

(a) Metra

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 3, 4, dan 5 Notaris Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., MLI., M.kn, tanggal 2 April 2018, Metra membeli saham PT Swadharna Sarana Informatika (SSI) yang dimiliki oleh Yayasan Dinar Dana Swadharna, PT Tri Handayani Utama, dan Koperasi Swadharna sebanyak 14.600 lembar atau setara dengan 36,50% kepemilikan saham dari SSI dengan nilai perolehan sebesar Rp220 miliar.

Berdasarkan Akta No. 4 Notaris N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MKn, tanggal 9 April 2018, Perusahaan sebagai pemegang saham Metra menyetujui mengambil bagian atas 11.837 lembar saham baru yang diterbitkan oleh SSI dengan nilai perolehan sebesar Rp178 miliar. Atas perubahan tersebut terdapat perubahan komposisi kepemilikan Perusahaan atas SSI menjadi 51% sehingga Perusahaan memiliki pengendalian atas SSI sebagai entitas anak dengan jumlah harga perolehan sebesar Rp397 miliar (arus kas keluar neto untuk memperoleh pengendalian, setelah dikurangi kas yang diperoleh Rp210 miliar). Harga perolehan transaksi akuisisi saham SSI lebih besar dibandingkan porsi kepemilikan pada nilai buku aset bersih yaitu sebesar Rp196 miliar per tanggal 31 Desember 2018, selisih tersebut dicatat sebagai *provisional goodwill*. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, perhitungan *purchase price allocation* atas akuisisi ini masih dalam proses.

Sejak tanggal akuisisi hingga tanggal 31 Desember 2018, jumlah pendapatan dan laba sebelum pajak yang diakui oleh Swadharna dan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah masing-masing sebesar Rp630 miliar dan Rp101 miliar. Jika akuisisi dilakukan sejak awal periode pelaporan, maka jumlah pendapatan dan laba sebelum pajak yang diakui oleh SSI dan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya adalah masing-masing sebesar Rp823 miliar dan Rp110 miliar.

(b) Sigma

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 151 dan 152 Notaris Utiek Rochmuljati Abdurachman, SH., MLI., Mkn, tanggal 28 Desember 2018, Sigma membeli saham PT Collega Inti Pratama (CIP) sebanyak 2.493 saham (setara dengan 67% kepemilikan saham) dari PT Upperco Usaha Maxima dengan harga Rp208 miliar, dan sebanyak 111 saham (setara dengan 3% kepemilikan saham) dari PT Abdi Anugerah Persada dengan harga Rp9 miliar, sehingga kepemilikan SCC pada CIP menjadi 2.604 saham (setara dengan 70% kepemilikan saham) sehingga SCC memiliki pengendalian atas CIP sebagai entitas anak dengan jumlah harga perolehan sebesar Rp217 miliar (arus kas keluar neto untuk memperoleh pengendalian, setelah dikurangi kas yang diperoleh Rp188 miliar). Harga perolehan transaksi akuisisi saham CIP lebih besar dibandingkan porsi kepemilikan pada nilai buku aset bersih yaitu sebesar Rp165 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2018, selisih tersebut dicatat sebagai *provisional goodwill*. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, perhitungan *purchase price allocation* masih dalam proses.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak (lanjutan)

(b) Sigma (lanjutan)

Sejak tanggal akuisisi hingga tanggal 31 Desember 2018, jumlah pendapatan dan laba sebelum pajak yang dicatat oleh CIP dan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah masing-masing sebesar Rp nihil. Jika akuisisi dilakukan sejak awal periode pelaporan, maka jumlah pendapatan dan laba sebelum pajak yang diakui oleh CIP dan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya adalah masing-masing sebesar Rp166 miliar dan Rp24 miliar.

(c) TII

Pada tanggal 14 Desember 2017, TII membeli 49% kepemilikan saham di TSGN sebesar MYR66.150.000 atau setara dengan Rp220 miliar. TSGN bergerak dalam jasa penyediaan sistem ICT (*Information and Communication Technologies*) untuk *satellite communication services, satellite bandwidth services* dan *Very Small Aperture Terminal ("VSAT") services*. Kepentingan nonpengendali pada pihak akuisisi diukur pada nilai wajar. Berdasarkan *Sale and Subscription Agreement*, TII memperoleh hak pengendalian atas TSGN melalui penempatan dan penggantian 3 dari 5 manajemen kunci yang mengendalikan keseluruhan bisnis TSGN. Pada tanggal 25 April 2018, TII kembali membeli 21% kepemilikan saham tambahan.

Akuisisi ini akan meningkatkan sinergi serta pendayagunaan aset dan sumber daya antar perusahaan dalam rangka memberikan layanan yang lebih inovatif untuk pelanggan.

Nilai wajar aset dan liabilitas teridentifikasi pada tanggal akuisisi adalah sebagai berikut:

	<u>Total</u>
Aset	
Kas dan Setara Kas	21
Piutang Usaha	18
Aset lancar lainnya	57
Aset tetap (Catatan 9)	711
Aset tidak lancar lainnya	14
Liabilitas	
Liabilitas jangka pendek	(422)
Liabilitas jangka panjang	(140)
Nilai wajar aset bersih teridentifikasi yang diperoleh	259
Nilai wajar atas kepentingan nonpengendali	(132)
<i>Provisional goodwill</i> (Catatan 11)	93
Nilai wajar imbalan yang dialihkan	<u>220</u>

Pada tanggal 2 Juli 2013, TII mendirikan Telin Malaysia dengan kepemilikan 49% dan pada tanggal 18 April 2018, TII kembali membeli 21% kepemilikan saham yang dimiliki oleh CompuDyne Telecommunication Systems Sdn, Bhd dengan harga perolehan MYR8.764.798 atau setara dengan Rp31 miliar (arus kas keluar neto untuk memperoleh pengendalian, setelah dikurangi kas yang diperoleh Rp16 miliar). Sehubungan dengan akuisisi saham Telin Malaysia, TII mengakui *provisional goodwill* Rp61 miliar (Catatan 11).

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak (lanjutan)

(c) TII (lanjutan)

Sejak tanggal akuisisi hingga tanggal 31 Desember 2018, jumlah pendapatan dan rugi sebelum pajak Telin Malaysia yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah masing-masing sebesar Rp23 miliar dan Rp20 miliar. Jika akuisisi dilakukan sejak awal periode pelaporan, maka jumlah pendapatan dan rugi sebelum pajak yang diakui oleh Telin Malaysia dan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya adalah masing-masing sebesar MYR13.323.065 (setara dengan Rp47 miliar) dan MYR7.888.930 (setara dengan Rp28 miliar).

(d) Dayamitra

Berdasarkan akta Notaris Jimmy Tanal, SH. M.Kn., No. 22 tanggal 6 Maret 2019 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham dari para pemegang saham PT Persada Sokka Tama ("PST"), disetujui pengalihan hak atas saham PST kepada Dayamitra dari Nyonya Rahina Dewayani dan Nyonya Rahayu sebesar masing-masing 2.559.000 dan 6.000 lembar saham sehingga Dayamitra memiliki 2.565.000 lembar saham atau 95% kepemilikan di PST.

PST adalah perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan sewa menara. Investasi baru ini diharapkan dapat memperkuat portofolio bisnis perusahaan.

Nilai wajar aset dan liabilitas teridentifikasi pada tanggal akuisisi adalah sebagai berikut:

	Total
Aset	
Kas dan Setara Kas	5
Piutang Usaha	121
Aset tetap (Catatan 9)	1.107
Aset lainnya	113
Liabilitas	
Liabilitas jangka pendek	(129)
Liabilitas jangka panjang	(378)
Liabilitas lainnya	(104)
Nilai wajar aset bersih teridentifikasi yang diperoleh	735
Nilai wajar atas kepentingan nonpengendali	(37)
<i>Provisional goodwill</i>	415
Nilai wajar imbalan yang dialihkan	1.113

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, perhitungan *purchase price allocation* masih dalam proses.

(e) Telkomsel

Berdasarkan akta notaris Bonardo Nasution, S.H. No. 12 tanggal 18 Januari 2019, Telkomsel mendirikan anak perusahaan PT Telkomsel Mitra Inovasi ("PT TMI"). Telkomsel membayarkan modal awal sebesar Rp550 miliar untuk 549.989 lembar saham dari 550.000 lembar saham keseluruhan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak (lanjutan)

(e) Telkomsel (lanjutan)

Berdasarkan akta notaris Bonardo Nasution, S.H. No. 13 tanggal 21 Januari 2019, Telkomsel mendirikan anak perusahaan PT Fintek Karya Nusantara ("PT Finarya"). Telkomsel membayarkan modal awal sebesar Rp25 miliar untuk 2.499 lembar saham. Pada tanggal 22 Februari 2019, Telkomsel mengalihkan asetnya kepada Finarya sebesar Rp150 miliar dan menerima 14.974 lembar saham atas kompensasi pengalihan harta tersebut.

e. Penyelesaian dan kewenangan penerbitan laporan keuangan konsolidasian

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah disetujui dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 2 Mei 2019.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Laporan keuangan konsolidasian Grup disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") di Indonesia dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") di Indonesia yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik", yang terlampir dalam surat KEP-347/BL/2012.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, disusun dengan dasar akrual. Laporan keuangan konsolidasian juga disusun dengan dasar harga perolehan, kecuali untuk akun tertentu yang diukur dengan menggunakan dasar seperti yang disebutkan dalam catatan yang relevan.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dan menyajikan perubahan kas dan setara kas dari kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan.

Angka-angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini disajikan dalam dan dibulatkan menjadi miliaran Rupiah ("Rp"), kecuali dinyatakan lain.

Standar Akuntansi yang Telah Disahkan Namun belum Berlaku Efektif

Berlaku efektif 1 Januari 2020:

- **PSAK 71: Instrumen Keuangan**
PSAK 71 merevisi persyaratan terkait klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan, termasuk model kerugian kredit ekspektasian untuk menghitung penurunan nilai aset keuangan, dan persyaratan akuntansi lindung nilai secara umum yang baru. PSAK ini tetap mempertahankan kriteria pengakuan dan penghentian pengakuan instrumen keuangan yang sebelumnya diatur dalam PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. PSAK 71 menggantikan ketentuan akuntansi instrumen keuangan yang saat ini diatur dalam PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Berlaku efektif 1 Januari 2020 (lanjutan):

- **PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan**
PSAK 72 menetapkan kerangka yang komprehensif untuk menentukan bagaimana, kapan dan seberapa besar suatu pendapatan dapat diakui. PSAK ini memperkenalkan model lima langkah untuk penentuan dan pengakuan pendapatan untuk diterapkan kepada semua kontrak dengan pelanggan. PSAK ini juga memberikan panduan spesifik yang mewajibkan beberapa jenis biaya untuk mendapatkan dan atau memenuhi kontrak untuk dikapitalisasi dan diamortisasi secara sistematis mengacu kepada transfer barang dan jasa kepada pelanggan.

PSAK 72 menggantikan sejumlah standar akuntansi pendapatan yang ada saat ini, termasuk PSAK 23: Pendapatan, PSAK 34: Kontrak Konstruksi dan ISAK 10: Program Loyalitas Pelanggan.

- **PSAK 73: Sewa**
PSAK 73 menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas sewa dan mensyaratkan penyewa untuk mengukur seluruh sewa menggunakan model akuntansi tunggal yang sama dengan akuntansi sewa pembiayaan menurut PSAK 30. PSAK 73 memberikan dua pengecualian kepada penyewa terkait model akuntansi tersebut, yaitu untuk sewa dengan aset pendasar bernilai rendah dan sewa dengan jangka waktu 12 bulan atau kurang. Pada saat dimulainya masa sewa, penyewa akan mengakui kewajiban untuk melakukan pembayaran sewa dan aset yang mewakili hak untuk menggunakan aset pendasar selama masa sewa. Penyewa juga secara terpisah akan mengakui beban bunga atas kewajiban sewa dan biaya penyusutan pada aset sewa.

Akuntansi untuk pesewa berdasarkan PSAK 73 secara substansial tidak berubah dari akuntansi yang diatur dalam PSAK 30. Pesewa akan melanjutkan pengklasifikasian seluruh sewa berdasarkan prinsip klasifikasi sebagaimana yang saat ini diatur dalam PSAK 30.

PSAK 73 menggantikan PSAK 30: Sewa dan ISAK 8: Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Sewa.

- **Amandemen PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama**
Amandemen ini mengatur bahwa entitas juga menerapkan PSAK 71 atas instrumen keuangan pada entitas asosiasi atau ventura bersama dimana metode ekuitas tidak diterapkan. Hal ini termasuk kepentingan jangka panjang yang secara substansi membentuk bagian investasi neto entitas pada entitas asosiasi atau ventura bersama.
- **Amandemen PSAK 71: Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif**
Amandemen ini mengatur bahwa aset keuangan dengan fitur percepatan pelunasan yang dapat menghasilkan kompensasi negatif memenuhi kualifikasi sebagai arus kas kontraktual yang berasal semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.
- **Amandemen PSAK 62: Kontrak Asuransi - Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi akan berlaku efektif 1 Januari 2022, namun amandemen tersebut tidak berdampak bagi laporan konsolidasian Grup.**

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Prinsip konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas anak dimana Perusahaan memiliki kendali. Pengendalian timbul ketika Grup terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*. Secara spesifik, Grup mengendalikan *investee* jika dan hanya jika Grup memiliki kekuasaan atas *investee*, eksposur atau hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi imbal hasil.

Grup menilai kembali apakah Grup mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Entitas anak dikonsolidasi sejak tanggal ketika Grup memperoleh pengendalian secara efektif dan tidak dikonsolidasikan lagi sejak tanggal Grup kehilangan pengendalian. Aset, liabilitas, pendapatan, dan beban entitas anak yang diperoleh atau dilepaskan selama periode berjalan dimasukkan ke dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal ketika Grup memperoleh pengendalian hingga tanggal sejak Grup kehilangan pengendalian.

Laba atau rugi dan setiap komponen pendapatan komprehensif lain diatribusikan pada pemilik Perusahaan dan pada kepentingan nonpengendali, meskipun hal ini akan mengakibatkan timbulnya saldo defisit pada kepentingan nonpengendali.

Saldo dan transaksi antar perusahaan yang signifikan telah dieliminasi pada laporan keuangan konsolidasian.

Saat Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka Grup:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada nilai tercatatnya ketika pengendalian hilang;
- menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali pada entitas anak terdahulu pada tanggal hilangnya pengendalian;
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- mengakui setiap sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi yang dapat diatribusikan pada pemilik Perusahaan.

c. Transaksi dengan pihak berelasi

Grup mempunyai transaksi dengan pihak berelasi. Definisi pihak berelasi yang digunakan sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, yang terlampir dalam surat keputusan No.KEP-347/BL/2012. Pihak-pihak yang dipertimbangkan sebagai pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporannya.

Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 tersebut, entitas berelasi dengan pemerintah merupakan entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham dari entitas.

Personil manajemen kunci adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan aktivitas entitas, secara langsung atau tidak langsung, termasuk direktur (baik eksekutif maupun bukan eksekutif) dari Grup. Status pihak berelasi diperluas sampai dengan manajemen kunci dari entitas anak sampai dengan tingkatan mereka mengarahkan operasi entitas anak dengan tingkat keterlibatan minimal dari manajemen Perusahaan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Kombinasi bisnis

Kombinasi bisnis dicatat dengan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan diukur sebesar nilai wajarnya, yang merupakan agregat dari nilai wajar aset yang dialihkan, liabilitas yang diambil alih dan instrumen ekuitas yang diterbitkan sebagai pertukaran atas pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, kepentingan nonpengendali diukur pada nilai wajar atau pada proporsi kepemilikan nonpengendali atas aset neto teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Pilihan dasar pengukuran dibuat berdasarkan basis tiap transaksi. Biaya terkait akuisisi dicatat sebagai beban pada saat timbulnya. Aset dan liabilitas yang teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi diakui pada nilai wajar pada tanggal akuisisi.

Goodwill awalnya diukur pada harga perolehan, yang merupakan selisih lebih dari nilai agregat imbalan yang dialihkan dan nilai yang diakui oleh kepentingan nonpengendali dan nilai kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya, atas jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika nilai wajar dari jumlah neto aset yang diakuisisi melebihi nilai agregat imbalan yang dialihkan, Grup menilai kembali apakah semua aset yang diakuisisi dan liabilitas yang diambil alih sudah diidentifikasi dengan benar dan memeriksa prosedur yang digunakan untuk mengukur nilai yang harus diakui pada tanggal akuisisi. Jika hasil penilaian kembali tersebut masih menghasilkan selisih lebih atas nilai wajar dari aset neto diakuisisi atas nilai agregat imbalan yang dialihkan, maka keuntungan diakui pada laba atau rugi.

Saat penentuan imbalan dari kombinasi bisnis termasuk imbalan kontinjensi, imbalan kontinjensi ini diukur pada nilai wajar saat tanggal akuisisi. Imbalan kontinjensi diklasifikasikan sebagai ekuitas atau liabilitas keuangan. Jumlah yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan selanjutnya diukur kembali pada nilai wajar dimana perubahan pada nilai wajar tersebut diakui dalam laba rugi atau ketika penyesuaian dicatat diluar periode pengukuran. Perubahan pada nilai wajar imbalan kontinjensi yang memenuhi persyaratan sebagai penyesuaian periode pengukuran, disesuaikan secara retrospektif, dengan penyesuaian terkait terhadap *goodwill*. Penyesuaian periode pengukuran adalah penyesuaian yang timbul dari informasi tambahan yang didapat selama periode pengukuran, yang tidak boleh melebihi satu tahun dari tanggal akuisisi, tentang fakta dan kondisi yang ada pada saat tanggal akuisisi.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi bisnis terjadi, maka Grup akan melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangan konsolidasian. Selama periode pengukuran, Grup menyesuaikan secara retrospektif jumlah sementara yang diakui pada tanggal akuisisi untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, telah berdampak pada pengukuran jumlah yang diakui pada tanggal tersebut. Periode pengukuran berakhir segera setelah Perusahaan menerima informasi yang dicari tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi atau mempelajari bahwa informasi tambahan tidak dapat diperoleh. Namun demikian, periode pengukuran tidak boleh melebihi satu tahun dari tanggal akuisisi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Kombinasi bisnis (lanjutan)

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pihak pengakuisisi mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan, jika ada, dalam laba rugi.

Berdasarkan PSAK 38 (Revisi 2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali", pengalihan aset, liabilitas, saham, dan instrumen kepemilikan lain antara entitas sepengendali tidak akan menghasilkan suatu laba atau rugi bagi Perusahaan atau entitas individual yang berada dalam grup yang sama. Oleh karena transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali tidak mengubah substansi ekonomi atas kepemilikan aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lain yang dipertukarkan, aset atau liabilitas yang dialihkan harus dicatat berdasarkan nilai buku yang menggunakan metode penyatuan kepentingan (*pooling-of interests*). Dalam pelaksanaan metode penyatuan kepentingan, komponen-komponen laporan keuangan selama restrukturisasi terjadi disajikan seolah-olah restrukturisasi tersebut telah terjadi sejak awal periode penyajian paling awal. Selisih imbalan yang dibayar atau diterima dengan nilai buku historis terkait dengan nilai tercatat dari kepentingan yang diperoleh, setelah memperhitungkan dampak pajak penghasilan, diakui secara langsung di ekuitas dan disajikan sebagai "Tambahkan Modal Disetor" pada bagian ekuitas di laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pada saat penerapan awal PSAK 38 (Revisi 2012), seluruh saldo Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali direklasifikasikan ke akun "Tambahkan Modal Disetor" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

e. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas ditangan, kas dan bank, dan semua deposito berjangka yang tidak dibatasi penggunaannya, yang jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan.

Deposito yang jatuh temponya lebih dari tiga bulan tetapi tidak lebih dari satu tahun disajikan sebagai "Aset Keuangan Lancar Lainnya" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

f. Penyertaan pada entitas asosiasi

Asosiasi adalah entitas dimana Grup (sebagai investor) memiliki pengaruh yang signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan terkait kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tapi tidak termasuk kendali atau kendali bersama atas kebijakan operasional tersebut. Pertimbangan dalam menentukan pengaruh signifikan sama dengan pertimbangan saat menentukan pengendalian atas entitas anak.

Grup menghitung investasi pada entitas asosiasi dengan menggunakan metode ekuitas.

Berdasarkan metode ekuitas, investasi pada entitas asosiasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Jumlah tercatat investasi disesuaikan untuk mengakui perubahan dalam bagian investor atas aset neto entitas asosiasi sejak tanggal akuisisi. Pada saat perolehan investasi, setiap selisih antara biaya perolehan investasi dengan bagian investor atas nilai wajar neto aset dan liabilitas teridentifikasi dari entitas asosiasi dicatat dengan cara sebagai berikut:

- a. *Goodwill* yang terkait dengan entitas asosiasi atau ventura bersama termasuk dalam nilai tercatat investasi dan tidak diperkenankan diamortisasi ataupun pengujian penurunan nilai secara individu.
- b. Setiap selisih lebih bagian investor atas nilai wajar neto aset dan liabilitas teridentifikasi dari entitas asosiasi terhadap biaya perolehan investasi dimasukkan sebagai penghasilan dalam menentukan bagian investor atas laba rugi entitas asosiasi pada periode investasi diperoleh.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Penyertaan pada entitas asosiasi (lanjutan)

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian mencerminkan bagian Grup atas hasil operasi entitas asosiasi. Setiap perubahan dalam penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi akan disajikan sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain. Selanjutnya, jika ada perubahan yang langsung diakui dalam ekuitas entitas asosiasi maka Grup mengakui bagiannya atas perubahan tersebut dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Laba dan rugi belum direalisasi yang berasal dari transaksi antara Grup dan entitas asosiasi dieliminasi sejumlah porsi kepemilikan atas entitas asosiasi.

Grup pada setiap akhir periode pelaporan menentukan apakah terdapat bukti obyektif bahwa penyertaan pada entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Apabila hal ini terjadi, Grup menghitung dan mengakui nilai penurunan sebagai selisih antara nilai investasi di entitas asosiasi yang dapat terpulihkan dan nilai tercatatnya.

Aset-aset ini termasuk dalam "Penyertaan Jangka Panjang" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Mata uang fungsional Cellum Global Zrt ("Cellum") adalah Forint Hungaria ("HUF") dan PT Cipta Sari Makmur ("CSM") adalah Dolar Amerika Serikat ("Dollar"). Untuk tujuan pelaporan investasi tersebut menggunakan metode ekuitas, aset dan liabilitas kedua perusahaan ini pada tanggal laporan posisi keuangan masing-masing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut, sedangkan pendapatan dan beban dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs rata-rata selama periode tersebut. Selisih kurs akibat penjabaran diakui dan dilaporkan sebagai "Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan" pada bagian ekuitas di laporan posisi keuangan konsolidasian.

g. Piutang usaha dan piutang lain-lain

Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, setelah dikurangi provisi atas penurunan nilai. Provisi penurunan nilai piutang dibentuk berdasarkan evaluasi manajemen terhadap tingkat ketertagihan saldo. Piutang dihapuskan dalam periode ketika piutang tersebut dipastikan tidak dapat ditagih.

h. Persediaan

Persediaan terdiri dari komponen yang kemudian dibebankan pada saat pemakaian. Komponen mewakili terminal telepon, kabel, dan suku cadang lainnya. Persediaan juga termasuk kartu *Subscriber Identification Module* ("SIM"), pesawat telepon, modem *wireless broadband*, dan vauzer Prabayar yang dibebankan pada saat dijual.

Biaya persediaan terdiri dari harga pembelian, bea masuk, pajak lainnya, transportasi, penanganan, dan biaya lainnya yang langsung melekat pada akuisisinya. Persediaan diakui sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih. Nilai realisasi bersih adalah perkiraan harga jual dikurangi perkiraan biaya untuk menjual.

Harga perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Jumlah penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi bersih dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi bersih, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban umum dan administrasi pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

Provisi persediaan usang ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan setiap jenis persediaan pada masa depan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Beban dibayar di muka

Beban dibayar di muka diamortisasi sesuai masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

j. Aset tersedia untuk dijual

Aset (atau kelompok lepasan) diklasifikasikan sebagai aset tersedia untuk dijual ketika nilai tercatatnya akan dipulihkan terutama melalui transaksi penjualan daripada melalui pemakaian berlanjut dan penjualannya sangat mungkin terjadi. Aset ini dicatat pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual.

Aset yang memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai aset tersedia untuk dijual direklasifikasi dari aset tetap dan penyusutan atas aset tersebut dihentikan.

k. Aset takberwujud

Aset takberwujud terutama terdiri dari piranti lunak. Aset takberwujud diakui jika kemungkinan besar Grup akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset takberwujud tersebut dan biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal.

Aset takberwujud dicatat berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan rugi penurunan nilai, apabila ada. Aset takberwujud diamortisasi selama estimasi masa manfaatnya. Grup mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset takberwujud. Apabila nilai tercatat aset takberwujud melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, maka nilai tercatat aset tersebut diturunkan menjadi sebesar estimasi jumlah terpulihkan.

Aset takberwujud, diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset takberwujud sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Piranti lunak	3-6
Lisensi	3-20
Aset takberwujud lainnya	1-30

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya ketika aset tersebut dilepaskan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasan aset tersebut. Selisih dalam laporan antara nilai tercatat aset dengan hasil neto yang diterima dari pelepasannya diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

l. Aset tetap

Aset tetap dinyatakan pada harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai.

Biaya perolehan aset tetap terdiri dari: (a) harga perolehan, (b) setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan, dan (c) estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap. Setiap bagian aset tetap yang memiliki harga perolehan cukup signifikan terhadap biaya perolehan seluruh aset tetap disusutkan secara terpisah.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

I. Aset tetap (lanjutan)

Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Bangunan	15-40
Renovasi bangunan sewa	2-15
Peralatan sentral telepon	3-15
Peralatan telegraf, teleks dan komunikasi data	5-15
Peralatan dan instalasi transmisi	3-25
Satelit, stasiun bumi dan peralatannya	3-20
Jaringan kabel	5-25
Catu daya	3-20
Peralatan pengolahan data	3-20
Peralatan telekomunikasi lainnya	5
Peralatan kantor	2-5
Kendaraan	4-8
Aset <i>Customer Premises Equipment</i> ("CPE")	4-5
Peralatan lainnya	2-5

Biaya signifikan sehubungan dengan renovasi bangunan sewa dikapitalisasi dan disusutkan selama masa sewa.

Metode penyusutan, umur manfaat dan nilai residu dari suatu aset direviu paling tidak setiap akhir tahun buku dan disesuaikan jika diperlukan. Nilai residu dari aset adalah estimasi jumlah yang dapat diperoleh Grup dari pelepasan aset, setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan, ketika aset telah mencapai umur dan kondisi yang diharapkan pada akhir umur manfaatnya.

Aset tetap yang diperoleh dalam pertukaran dengan aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non-moneter diukur pada nilai wajar kecuali, (i) transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial, atau (ii) nilai wajar aset yang diterima dan aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal.

Suku cadang utama dan suku cadang siap pakai yang diperkirakan dapat digunakan lebih dari 12 bulan dicatat sebagai bagian aset tetap.

Ketika aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka harga perolehan dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan posisi keuangan konsolidasian dan laba atau rugi yang timbul dari pelepasan atau penjualan aset tetap diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Piranti keras komputer tertentu tidak dapat dioperasikan tanpa ketersediaan piranti lunak komputer tertentu. Dalam kondisi tersebut, piranti lunak komputer dicatat sebagai bagian dari piranti keras komputer. Jika piranti lunak komputer berdiri sendiri dari piranti keras komputernya, piranti lunak komputer tersebut dicatat sebagai bagian dari aset takberwujud.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat terjadinya. Pemugaran dan penambahan yang signifikan dikapitalisasi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

l. Aset tetap (lanjutan)

Aset dalam pembangunan diakui sebesar biaya perolehan hingga pembangunan selesai, yang kemudian direklasifikasi ke akun aset tetap yang terkait. Selama masa pembangunan hingga aset tetap siap untuk digunakan/dijual, biaya pinjaman, yang termasuk di dalamnya beban bunga dan selisih kurs yang timbul atas pinjaman yang diperoleh untuk membiayai pembangunan aset, dikapitalisasi secara proporsional terhadap rata-rata nilai akumulasi pengeluaran selama periode tersebut sepanjang aset tetap tersebut memenuhi definisi aset kualifikasian. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika pembangunan selesai dan aset tetap siap untuk digunakan.

m. Sewa

Dalam menentukan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau perjanjian mengandung sewa, Grup melakukan evaluasi terhadap substansi perjanjian. Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi, bukan pada bentuk kontraknya. Aset sewa pembiayaan diakui hanya jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Sewa pembiayaan diakui sebagai aset dan liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar nilai wajar aset sewa atau jika lebih rendah, nilai kini pembayaran sewa minimum. Biaya langsung awal yang dikeluarkan Grup ditambahkan ke dalam jumlah yang diakui sebagai aset.

Pembayaran sewa minimum dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas. Beban keuangan dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Sewa kontinjen dibebankan pada periode terjadinya.

Aset sewa pembiayaan disusutkan dengan metode yang sama dan berdasarkan masa manfaat sebagaimana diestimasi untuk aset tetap perolehan langsung. Akan tetapi, jika tidak terdapat kepastian yang memadai bahwa Grup akan memperoleh kepemilikan pada akhir masa sewa, aset sewa pembiayaan disusutkan penuh selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa sewa dan umur manfaatnya.

Perjanjian sewa yang tidak memenuhi kriteria di atas, dicatat sebagai sewa operasi dimana pembayarannya diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

n. Beban tanggungan - hak atas tanah

Hak atas tanah termasuk biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali dicatat sebagai bagian dari aset tetap dan tidak diamortisasi. Biaya yang terjadi sehubungan dengan pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah ditangguhkan dan diamortisasi dengan metode garis lurus selama periode legal hak atas tanah atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

o. Utang usaha

Utang usaha adalah kewajiban membayar barang atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dari pemasok. Utang usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika pembayarannya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang. Jika tidak, utang tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Pinjaman

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi, selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya ditangguhkan sampai penarikan terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya dikapitalisasi sebagai pembayaran di muka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

q. Penjabaran valuta asing

Mata uang fungsional dan mata uang pembukuan Grup adalah Rupiah, kecuali Telekomunikasi Indonesia International Pte. Ltd., Hong Kong, Telekomunikasi Indonesia International Pte. Ltd., Singapura, Telekomunikasi Indonesia International Inc., USA, dan Telekomunikasi Indonesia International S.A., Timor Leste yang menggunakan mata uang Dolar A.S., Telekomunikasi Indonesia International Pty. Ltd., Australia yang menggunakan mata uang Dolar Australia, TS Global Network Sdn. Bhd, dan Telekomunikasi Indonesia International Sdn. Bhd yang menggunakan Ringgit Malaysia. Transaksi-transaksi dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs beli dan jual yang diterbitkan oleh *Reuters* pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dengan rincian sebagai berikut:

	31 Maret 2019		31 Desember 2018	
	Beli	Jual	Beli	Jual
Dolar A.S. ("US\$") 1	14.235	14.245	14.375	14.385
Dolar Australia ("AU\$") 1	10.086	10.095	10.157	10.167
Euro 1	15.970	15.989	16.432	16.446
Yen Jepang 1	128,50	128,61	130,56	130,70
Ringgit Malaysia ("MYR") 1	3.486	3.491	3.474	3.480

Laba atau rugi selisih kurs yang timbul, baik yang telah maupun yang belum direalisasi, dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian periode berjalan, kecuali untuk selisih kurs yang timbul dari pinjaman selama pembangunan suatu aset tertentu yang memenuhi syarat untuk dikapitalisasi, dimana pinjaman dapat diatribusikan terhadap pembangunan aset tersebut (Catatan 2l).

r. Pengakuan pendapatan dan beban

i. Pendapatan telepon selular

Pendapatan dari jasa pascabayar, yang terdiri dari pendapatan pemakaian dan biaya abonemen bulanan diakui sebagai berikut:

- Pendapatan pulsa dan pemakaian atas jasa nilai tambah diakui berdasarkan penggunaan pelanggan.
- Biaya abonemen bulanan diakui sebagai pendapatan pada saat pelanggan berlangganan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

i. Pendapatan telepon selular (lanjutan)

Pendapatan dari jasa prabayar, yang terdiri dari penjualan kartu perdana (yang berisi kartu SIM dan vauzer perdana) dan vauzer isi ulang diakui pertama kali sebagai pendapatan diterima di muka dan diakui sebagai pendapatan berdasarkan jumlah panggilan yang berhasil dilakukan dan pemakaian jasa nilai tambah oleh pelanggan atau pada saat sisa pulsa pada vauzer prabayar telah habis masa berlakunya.

ii. Pendapatan sambungan telepon tidak bergerak

Pendapatan dari pemakaian telepon diakui pada saat pelanggan memakai telepon tersebut. Biaya abonemen bulanan diakui sebagai pendapatan pada saat pelanggan berlangganan.

Penerimaan dari instalasi sambungan telepon tidak bergerak ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan dengan dasar metode garis lurus sepanjang taksiran jangka waktu hubungan dengan pelanggan. Berdasarkan revidu atas informasi historis dan tren pelanggan, Perusahaan menentukan taksiran jangka waktu hubungan dengan pelanggan adalah 23 tahun.

iii. Pendapatan interkoneksi

Pendapatan dari interkoneksi jaringan dengan penyelenggara telekomunikasi dalam negeri dan internasional diakui bulanan berdasarkan lalu lintas tercatat aktual untuk bulan tersebut. Pendapatan interkoneksi terdiri dari pendapatan yang berasal dari panggilan pelanggan operator lain kepada pelanggan Grup (*incoming*) serta panggilan antar pelanggan operator lain yang melalui jaringan Grup (*transit*).

iv. Pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika

Pendapatan dari komunikasi data dan internet diakui berdasarkan pemakaian, yang diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian internet atau berdasarkan jumlah biaya tetap tergantung pengaturan dengan pelanggan.

Pendapatan dari penjualan, instalasi dan implementasi piranti lunak dan perangkat keras komputer, jasa pemasangan jaringan data komputer, dan instalasi diakui pada saat penyerahan barang kepada pelanggan atau instalasi perangkat.

Pendapatan dari jasa pengembangan piranti lunak komputer diakui berdasarkan metode persentase penyelesaian.

v. Pendapatan jaringan

Pendapatan dari jaringan terdiri dari pendapatan dari sewa sirkit dan *transponder* satelit yang diakui pada periode saat jasa diberikan.

vi. Pendapatan lainnya

Pendapatan dari penjualan periferal atau perangkat telekomunikasi lainnya diakui pada saat penyerahan kepada pelanggan.

Pendapatan sewa menara telekomunikasi diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa sesuai kesepakatan dengan pelanggan.

Pendapatan jasa lainnya diakui pada saat jasa diserahkan kepada pelanggan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

vii. *Multiple-element arrangements*

Ketika dua atau lebih barang dan jasa yang menghasilkan pendapatan dijual sebagai satu unit penjualan, tiap barang atau jasa yang telah dikaji sebagai unit akuntansi terpisah dicatat secara terpisah. Jumlah pendapatan dialokasikan secara terpisah pada tiap barang dan jasa teridentifikasi berdasarkan nilai wajar masing-masing barang dan jasa tersebut dan kriteria pengakuan pendapatan yang tepat diterapkan pada tiap barang dan jasa sebagaimana dijelaskan di atas.

viii. Hubungan keagenan

Pendapatan dalam hubungan keagenan dicatat sebesar jumlah tagihan bruto kepada pelanggan ketika Grup bertindak sebagai prinsipal dalam penjualan barang dan jasa. Pendapatan dicatat sebesar jumlah bersih yang diperoleh (jumlah yang dibayarkan oleh pelanggan dikurangi jumlah yang dibayarkan kepada pemasok) ketika secara substansi, Grup bertindak sebagai agen dan memperoleh komisi dari pemasok atas penjualan barang dan jasa.

ix. Program loyalitas pelanggan

Grup melaksanakan program loyalitas pelanggan dimana pelanggan dapat mengumpulkan poin penghargaan untuk setiap kelipatan tertentu pemakaian jasa telekomunikasi. Poin penghargaan dapat ditukarkan di masa depan dengan barang atau jasa secara gratis atau dengan potongan harga, sepanjang ketentuan program lainnya terpenuhi.

Imbalan yang diterima dialokasikan antara jasa telekomunikasi dan poin penghargaan yang diberikan, dimana imbalan yang dialokasikan ke poin penghargaan adalah sebesar nilai wajarnya. Nilai wajar poin penghargaan ditentukan dengan menggunakan data historis tingkat penukaran poin penghargaan dari program sejenis. Nilai wajar poin penghargaan yang diberikan ditanggihkan dan diakui sebagai pendapatan ketika poin penghargaan tersebut ditukar oleh pelanggan atau telah habis masa berlakunya.

x. Beban

Beban diakui pada saat terjadinya.

s. Imbalan kerja

i. Imbalan kerja jangka pendek

Seluruh imbalan kerja jangka pendek yang terdiri dari gaji dan imbalan terkait, tunjangan cuti, insentif, dan imbalan kerja jangka pendek lain diakui sebagai biaya yang tidak didiskonto saat karyawan telah memberikan jasa kepada Grup.

ii. Imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lain

Imbalan pasca kerja terdiri dari program pensiun imbalan pasti yang *funded* dan *unfunded*, program pensiun iuran pasti, imbalan pasca kerja lainnya, program imbalan kesehatan pasca kerja imbalan pasti, program imbalan kesehatan kerja iuran pasti, dan kewajiban berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan.

Imbalan kerja jangka panjang lain terdiri dari penghargaan masa kerja, cuti masa kerja, dan masa persiapan pensiun.

Perhitungan biaya terkait dengan program imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lain dilakukan oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Imbalan kerja (lanjutan)

ii. Imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lain (lanjutan)

Kewajiban bersih Perusahaan berkaitan dengan imbalan pasti pensiun dan imbalan kesehatan pasca kerja dihitung sebesar nilai kini dari estimasi imbalan yang akan diperoleh karyawan di masa depan sehubungan dengan jasa di masa sekarang dan masa lalu, dikurangi dengan nilai wajar dari aset program. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah, yang didenominasi dalam mata uang dimana manfaat akan dibayarkan dan yang mempunyai jangka waktu sampai dengan jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban imbalan pasca kerja terkait. Obligasi pemerintah digunakan karena tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi.

Aset program adalah aset yang dimiliki oleh program pensiun imbalan pasti dan imbalan kesehatan pasca kerja serta polis asuransi yang memenuhi syarat. Aset ini diukur pada nilai wajar pada akhir periode pelaporan. Nilai wajar polis asuransi adalah jumlah yang sama dengan kewajiban yang terkait (dan dapat dikurangi jika jumlah yang dapat diterima dari polis asuransi tidak dapat diperoleh secara penuh).

Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, dampak batas atas aset (tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto) dan imbal hasil aset program (tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto) diakui pada ekuitas melalui penghasilan komprehensif lain di periode terjadinya. Pengukuran kembali tidak diklasifikasikan ke laba rugi di periode selanjutnya.

Biaya jasa lalu diakui di laba rugi pada tanggal yang lebih awal antara:

- ketika amandemen atau kurtailmen program terjadi; dan
- ketika Grup mengakui biaya restrukturisasi terkait.

Bunga neto dihitung dengan mengalikan liabilitas (aset) imbalan pasti neto dengan tingkat diskonto.

Laba atau rugi kurtailmen diakui apabila terdapat komitmen untuk melakukan pengurangan jumlah karyawan dalam jumlah yang material yang ditanggung oleh suatu program atau apabila terdapat perubahan ketentuan-ketentuan pada suatu program imbalan pasti, dimana bagian yang material dari jasa yang diberikan karyawan pada masa depan tidak lagi memberikan imbalan, atau memberikan imbalan yang lebih rendah.

Laba atau rugi penyelesaian diakui apabila terdapat transaksi yang menghapuskan semua kewajiban hukum atau konstruktif atas sebagian atau seluruh imbalan dalam program manfaat pasti (selain pembayaran imbalan sesuai dengan ketentuan program dan termasuk dalam asumsi aktuarial).

Untuk program iuran pasti, Perusahaan membayar iuran secara rutin yang merupakan biaya berkala bersih untuk periode iuran tersebut dan dicatat sebagai bagian dari beban karyawan ketika terutang.

iii. Kompensasi berbasis saham

Perusahaan menjalankan program kompensasi berbasis saham dengan penyelesaian menggunakan ekuitas. Nilai wajar dari jasa karyawan yang dikompensasikan dengan saham Perusahaan diakui sebagai beban pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan mengkredit akun tambahan modal disetor pada tanggal pemberian kompensasi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Imbalan kerja (lanjutan)

iv. Pensiun dini ("Pendi")

Beban Pendi diakui pada saat Grup berkomitmen untuk membayar pesangon Pendi yang timbul sehubungan dengan tawaran yang diajukan Grup agar karyawan mengundurkan diri secara sukarela. Grup dianggap berkomitmen untuk membayar pesangon Pendi jika, dan hanya jika, Grup telah memiliki rencana formal terinci yang tidak dapat dibatalkan.

t. Pajak penghasilan ("PPh")

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, kecuali pajak penghasilan tersebut sehubungan dengan transaksi atau kejadian yang diakui secara langsung di ekuitas dimana pajak penghasilannya diakui secara langsung di ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak kini dihitung sebesar jumlah yang diperkirakan dapat diperoleh atau dibayar dengan menggunakan tarif dan ketentuan pajak yang telah ditetapkan pada setiap tanggal pelaporan. Manajemen secara periodik mengevaluasi perlakuan pajak yang diterapkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Grup mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada setiap tanggal pelaporan. Grup juga mengakui aset pajak tangguhan yang berasal dari manfaat pajak pada masa depan, seperti kompensasi rugi fiskal, jika kemungkinan realisasi manfaat tersebut di masa depan cukup besar (*probable*). Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diperkirakan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan direvisi pada setiap tanggal pelaporan dan dikurangi apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar bahwa laba pajak yang memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Pengurangan pajak yang berasal dari pembalikan aset pajak tangguhan dikecualikan dari estimasi laba kena pajak masa depan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan saling hapus di laporan posisi keuangan konsolidasian, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda, sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Perubahan terhadap liabilitas perpajakan dicatat pada saat diterimanya Surat Ketetapan Pajak ("SKP") atau apabila dilakukan banding, ketika hasil banding sudah diputuskan. Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan SKP diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laba rugi periode berjalan, kecuali jika diajukan upaya penyelesaian selanjutnya. Jumlah tambahan pokok pajak dan denda yang ditetapkan dengan SKP ditangguhkan pembebanannya sepanjang memenuhi kriteria pengakuan aset.

Peraturan perpajakan Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian. Mengacu pada revisi PSAK 46, pajak final tersebut tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK 46.

PPh final atas jasa konstruksi dan sewa disajikan sebagai bagian dari "Beban lain-lain".

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Instrumen Keuangan

Grup mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan. Aset dan liabilitas keuangan diakui pertama kali pada nilai wajar termasuk biaya transaksi. Aset dan liabilitas keuangan ini selanjutnya diukur pada nilai wajar atau biaya diamortisasi menggunakan metode bunga efektif sesuai dengan klasifikasinya.

i. Aset keuangan

Grup mengklasifikasikan aset keuangannya sebagai: (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang, (iii) aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo, atau (iv) aset keuangan tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Aset keuangan Perusahaan termasuk kas dan setara kas, aset keuangan lancar lainnya, piutang usaha, piutang lain-lain, aset keuangan tidak lancar lainnya dan penyertaan tersedia untuk dijual.

a. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah aset keuangan yang diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti adanya kecenderungan untuk mengambil keuntungan dalam jangka pendek. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar disajikan sebagai (beban)/penghasilan lain-lain pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dalam periode timbulnya keuntungan atau kerugian tersebut.

Tidak ada aset keuangan yang diklasifikasi sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

b. Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif.

Pinjaman yang diberikan dan piutang meliputi, antara lain, kas dan setara kas, aset keuangan lancar lainnya, piutang usaha, piutang lain-lain, dan aset keuangan tidak lancar lainnya (piutang usaha jangka panjang dan kas yang dibatasi penggunaannya).

Pinjaman yang diberikan dan piutang pada awalnya diakui pada nilai wajar termasuk biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya diamortisasi, menggunakan metode bunga efektif.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

c. Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo

Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta manajemen mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali:

- a) investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan Grup sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- b) investasi yang ditetapkan oleh Grup sebagai kelompok tersedia untuk dijual; dan
- c) investasi yang memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

Tidak ada aset keuangan yang diklasifikasi sebagai kelompok dimiliki hingga jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018.

d. Aset keuangan tersedia untuk dijual

Investasi dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditujukan untuk dimiliki sampai periode yang tidak ditentukan, yang mana dapat dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Aset keuangan tersedia untuk dijual terdiri dari reksadana, obligasi korporasi dan negara, dan modal saham yang dicatat sebagai "Aset Keuangan Lancar Lainnya" dan "Penyertaan Jangka Panjang" di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Penyertaan pada efek yang tersedia untuk dijual (*available-for-sale investment*) dinyatakan sebesar nilai wajarnya. Laba atau rugi yang belum direalisasi atas efek yang tersedia untuk dijual tidak diakui sebagai pendapatan periode berjalan, dan dilaporkan sebagai komponen terpisah pada bagian ekuitas di laporan posisi keuangan konsolidasian hingga terealisasi. Laba atau rugi yang telah direalisasi atas efek yang tersedia untuk dijual dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dihitung berdasarkan metode identifikasi khusus.

ii. Liabilitas keuangan

Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi atau (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan Grup terdiri dari utang usaha, utang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, pinjaman dan liabilitas lainnya. Pinjaman termasuk utang bank jangka pendek, pinjaman penerusan, obligasi dan wesel bayar, utang bank jangka panjang, dan utang sewa pembiayaan.

a. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah liabilitas keuangan yang diperdagangkan. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti adanya kecenderungan untuk mengambil keuntungan dalam jangka pendek.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Instrumen keuangan (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan (lanjutan)

a. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (lanjutan)

Tidak ada liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diperdagangkan pada tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018.

b. Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diklasifikasikan dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi antara lain utang usaha, utang lain-lain, biaya yang masih harus dibayar, pinjaman dan liabilitas lainnya. Pinjaman termasuk utang bank jangka pendek, pinjaman penerusan, obligasi dan wesel bayar, utang bank jangka panjang dan utang sewa pembiayaan.

iii. Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan. Hak saling hapus harus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan secara hukum terhadap seluruh keadaan sebagai berikut:

- a. situasi bisnis yang normal;
- b. peristiwa kegagalan; dan
- c. peristiwa kepailitan atau kebangkrutan dari Grup dan seluruh pihak lawan.

iv. Pengukuran nilai wajar instrumen keuangan

Nilai wajar adalah suatu jumlah dimana aset dapat ditukar atau liabilitas dapat diselesaikan dengan transaksi yang dilakukan secara wajar.

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan dalam pasar aktif pada setiap tanggal pelaporan ditentukan berdasarkan referensi harga pasar kuotasian, tanpa dikurangi biaya transaksi.

Untuk instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan dalam pasar aktif, nilai wajarnya ditentukan berdasarkan teknik penilaian yang sesuai. Teknik penilaian tersebut meliputi transaksi pasar wajar terkini, referensi kepada nilai wajar kini instrumen keuangan lainnya yang secara substansi adalah serupa dan analisis arus kas diskonto atau model penilaian lainnya.

Analisis nilai wajar instrumen keuangan dan rincian lebih lanjut mengenai penentuan nilai wajar diungkapkan dalam Catatan 36.

v. Penurunan nilai aset keuangan

Grup mendeteksi penurunan nilai aset keuangannya apabila terdapat bukti objektif adanya peristiwa merugikan ("*loss event*") yang menimbulkan pengaruh negatif terhadap arus kas masa depan dari suatu aset keuangan. Penurunan nilai tersebut diakui apabila *loss event* tersebut dapat diperkirakan secara andal telah terjadi. Kerugian yang diperkirakan akan timbul akibat dari peristiwa masa depan tidak boleh diakui, terlepas hal tersebut sangat mungkin terjadi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Instrumen keuangan (lanjutan)

v. Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya diamortisasi, Grup terlebih dahulu menilai apakah penurunan nilai terjadi secara individual untuk aset keuangan yang secara individu memang signifikan, atau secara gabungan apabila aset keuangan tersebut secara individu tidak signifikan. Jika Grup tidak menemukan bukti yang objektif atas penurunan nilai aset keuangan yang dinilai secara individu, terlepas apakah signifikan maupun tidak, aset keuangan tersebut dimasukkan dalam kelompok aset keuangan dengan karakteristik risiko kredit serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tidak diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Penurunan nilai aset keuangan yang diukur pada biaya diamortisasi diukur dari perbedaan antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan (diluar rugi kredit yang diperkirakan muncul di masa depan yang belum terjadi saat ini). Arus kas masa depan ini didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Nilai tercatat aset berkurang melalui penggunaan akun cadangan. Jumlah kerugian yang terjadi diakui pada laba rugi.

Untuk aset keuangan tersedia untuk dijual, pada setiap tanggal pelaporan Grup menilai apakah terdapat bukti objektif bahwa suatu investasi atau grup investasi mengalami penurunan nilai. Jika penurunan dalam nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain diakui dalam laba rugi sebagai kerugian penurunan nilai. Jumlah kerugian kumulatif tersebut merupakan selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi) dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui.

vi. Penghentian pengakuan instrumen keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau saat seluruh resiko dan manfaat dari aset keuangan tersebut ditransfer secara substansial kepada pihak lain.

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan saat kewajiban kontraktual untuk membayar dilepaskan, dibatalkan atau berakhir.

v. Sukuk Ijarah

Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Grup diakui sebesar nilai nominal, disesuaikan dengan premium atau diskonto dan biaya transaksi terkait. Perbedaan antara nilai tercatat dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui pada laporan laba rugi sebagai beban penerbitan sukuk.

Sukuk Ijarah, setelah disesuaikan dengan premium atau diskonto dan biaya transaksi yang belum diamortisasi, disajikan sebagai bagian dari liabilitas.

w. Modal saham yang diperoleh kembali

Saham diperoleh kembali dicatat dengan menggunakan nilai perolehannya sebagai "Modal Saham yang Diperoleh Kembali" dan disajikan sebagai pengurang modal saham. Harga pokok dari penjualan/pengalihan saham yang diperoleh kembali dicatat dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Modal saham diperoleh kembali yang dialihkan dalam bentuk kepemilikan saham karyawan dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara harga perolehan kembali dan harga jual kembali/nilai pengalihan saham dicatat sebagai "Tambahan Modal Disetor".

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

x. Dividen

Pembagian dividen kepada para pemegang saham Perusahaan diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian pada periode ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham Perusahaan. Untuk dividen interim, Perusahaan mengakui sebagai liabilitas berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris.

y. Laba per saham dan laba per ADS

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama periode tersebut. Laba per ADS dihitung dengan mengalikan laba per saham dasar dengan 100, yaitu jumlah lembar saham per ADS.

Perusahaan tidak memiliki instrumen keuangan yang berpotensi dilutif.

z. Informasi segmen

Informasi segmen Grup disajikan menurut segmen operasi yang telah diidentifikasi. Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas; a) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama); b) hasil operasinya direviu secara reguler oleh Pengambil Keputusan Operasional (PKO) Grup, misalnya Dewan Direksi untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan c) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

aa. Provisi

Provisi diakui ketika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi untuk kontrak yang memberatkan diakui ketika kontrak tersebut menjadi memberatkan sebesar mana yang lebih rendah antara biaya neto memenuhi kontrak dengan denda atau kompensasi yang dibayar jika tidak memenuhi kontrak.

ab. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual. Jika tidak mungkin untuk mengestimasi jumlah terpulihkan aset individual, maka Grup menentukan jumlah terpulihkan dari Unit Penghasil Kas ("UPK") yang mana aset tercakup ("aset UPK").

Jumlah terpulihkan dari suatu aset (baik aset individual maupun UPK) adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajarnya dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada jumlah terpulihkannya, maka aset tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan nilai menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Grup menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar lain yang tersedia.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ab. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan dibebankan pada operasi berjalan dan disajikan sebagai bagian dari "Penyusutan dan Amortisasi" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya, untuk aset selain *goodwill*, mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka jumlah terpulihkan aset tersebut diestimasi. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya, untuk aset selain *goodwill*, dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat yang telah ditentukan, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada periode sebelumnya. Pemulihan rugi penurunan nilai diakui sebagai laba rugi.

Penurunan nilai *goodwill* diuji setiap tahun dan ketika terdapat keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai. Penurunan nilai untuk *goodwill* ditentukan dengan menilai jumlah terpulihkan dari UPK (atau kelompok UPK) yang mana *goodwill* tercakup. Jika nilai terpulihkan dari UPK lebih rendah dari nilai tercatatnya, maka rugi penurunan nilai diakui. Rugi penurunan nilai atas *goodwill* tidak dapat dipulihkan pada periode mendatang.

ac. Estimasi dan asumsi akuntansi yang penting

Estimasi dan pertimbangan terus dievaluasi dan didasarkan kepada pengalaman historis dan faktor-faktor lain, termasuk ekspektasi peristiwa masa depan yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada.

Grup membuat estimasi dan asumsi mengenai masa depan. Estimasi akuntansi yang dihasilkan, menurut definisi, jarang yang sama dengan hasil aktualnya. Estimasi dan asumsi yang secara signifikan berisiko menyebabkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas selama satu tahun laporan keuangan ke depan dipaparkan dibawah ini.

i. Imbalan pasca kerja

Nilai kini kewajiban imbalan pasca kerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya (penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto dan tingkat pengembalian investasi. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat liabilitas imbalan pasca kerja.

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto tersebut adalah tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini dari estimasi arus kas keluar masa depan yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Grup mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan yang akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas yang terkait.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ac. Estimasi dan pertimbangan akuntansi yang penting (lanjutan)

i. Imbalan pasca kerja (lanjutan)

Jika terdapat peningkatan peringkat seperti pada obligasi pemerintah atau penurunan tingkat bunga sebagai hasil dari peningkatan kondisi ekonomi, maka akan terdapat dampak material terhadap tingkat diskonto yang digunakan dalam menentukan kewajiban pasca kerja.

Asumsi kunci kewajiban imbalan pasca kerja lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini. Informasi tambahan diungkapkan pada Catatan 29 dan 30.

ii. Umur manfaat aset tetap

Grup mengestimasi umur manfaat aset tetap berdasarkan ekspektasi penggunaan aset oleh Grup dengan mempertimbangkan rencana strategi usaha, perkembangan teknologi di masa depan, dan perilaku pasar. Estimasi umur manfaat aset tetap adalah berdasarkan pada penelaahan Grup secara kolektif terhadap praktik industri, evaluasi teknis internal, dan pengalaman untuk aset yang sejenis.

Grup melakukan reviu atas estimasi umur manfaat sekurang-kurangnya setiap akhir periode pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dengan estimasi sebelumnya, yang dikarenakan adanya perubahan ekspektasi daya pakai aset akibat pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan aset. Jumlah beban tercatat setiap tahun akan terpengaruh oleh perubahan atas faktor-faktor dan situasi tersebut. Perubahan estimasi umur manfaat aset tetap merupakan perubahan estimasi akuntansi dan diakui secara prospektif dalam laporan laba rugi pada periode perubahan dan periode mendatang.

Rincian atas sifat dan jumlah tercatat atas aset tetap diungkapkan pada Catatan 9.

iii. Provisi untuk penurunan nilai piutang

Grup mengevaluasi adanya bukti obyektif bahwa piutang usaha mengalami penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan. Provisi atas penurunan nilai piutang usaha dihitung berdasarkan kondisi terkini dan tingkat ketertagihan historis piutang usaha. Provisi ini disesuaikan secara berkala untuk mencerminkan hasil aktual dan taksiran. Rincian atas sifat dan jumlah tercatat provisi penurunan nilai piutang diungkapkan pada Catatan 5.

iv. Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan diperlukan dalam menentukan provisi pajak penghasilan. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang hasil pajak akhirnya tidak pasti. Grup mengakui liabilitas untuk area pemeriksaan pajak yang diantisipasi berdasarkan estimasi apakah tambahan pajak akan terutang. Jika hasil akhir pajak berbeda dengan jumlah yang sudah dicatat, selisihnya akan mempengaruhi aset dan liabilitas pajak kini dan tanggungan pada periode ditentukannya hasil pajak tersebut. Rincian atas sifat dan jumlah tercatat pajak penghasilan diungkapkan pada Catatan 26.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KAS DAN SETARA KAS

		31 Maret 2019		31 Desember 2018	
		Saldo		Saldo	
		Mata uang	Mata uang asal (dalam jutaan)	Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Kas	Rp		72		36
Bank					
Pihak berelasi					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")	Rp	-	1.009	-	1.199
	US\$	24	348	10	139
	JPY	8	1	8	1
	EUR	1	20	1	20
	HKD	0	1	1	1
	AUD	0	0	0	0
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")	Rp	-	918	-	791
	US\$	7	94	2	28
	EUR	-	-	0	0
	SGD	0	0	0	0
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")	Rp	-	546	-	728
	US\$	0	5	2	31
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("BTN")	Rp	-	45	-	342
Lain-lain	Rp	-	15	-	15
	US\$	0	1	0	0
Sub-jumlah			3.003		3.295
Pihak ketiga					
Standard Chartered Bank ("SCB")	Rp	-	0	-	0
	US\$	16	231	10	148
	SGD	3	35	1	14
PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC")	Rp	-	1	-	1
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. ("HSBC Hongkong")	US\$	10	140	12	181
	HKD	4	8	5	9
PT Bank Permata Tbk ("Bank Permata")	Rp	-	96	-	218
	US\$	-	-	2	30
PT Bank UOB Indonesia ("UOB")	Rp	-	54	-	17
United Overseas Bank Limited ("UOB Singapore")	US\$	1	8	4	55
	SGD	1	9	1	14
	MYR	3	9	3	9
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp75 miliar)	Rp	-	338	-	197
	US\$	7	103	4	60
	EUR	1	16	1	20
	MYR	4	14	3	12
	AUD	1	12	0	2
	TWD	7	3	17	8
	HKD	0	0	0	0
	MOP	0	0	0	0
Sub-jumlah			1.077		995
Jumlah bank			4.080		4.290
Deposito berjangka					
Pihak berelasi					
BNI	Rp	-	3.950	-	2.640
	US\$	52	736	58	837
BRI	Rp	-	3.120	-	1.911
	US\$	58	820	47	676
BTN	Rp	-	2.158	-	2.559
	US\$	-	-	31	446
Bank Mandiri	Rp	-	1.177	-	611
	US\$	15	214	16	230
Sub-jumlah			12.175		9.910

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

	31 Maret 2019		31 Desember 2018	
	Saldo		Saldo	
	Mata uang	Mata uang asal (dalam jutaan)	Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Deposito berjangka (lanjutan)				
Pihak ketiga				
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk ("BJB")	Rp	-	2.305	1.295
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("BTPN")	Rp	-	1.526	181
	US\$	-	-	25
PT Bank CIMB Niaga Tbk ("CIMB Niaga")	Rp	-	1.555	190
	US\$	31	436	-
PT Bank Mega Tbk ("Bank Mega")	Rp	-	356	365
UOB	US\$	19	272	30
PT Bank Bukopin Tbk ("Bank Bukopin")	Rp	-	173	248
Bank of Tokyo ("MUFG")	Rp	-	100	0
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	Rp	-	80	40
Lain-lain	Rp	-	206	53
	MYR	13	44	11
Sub-jumlah		7.053	3.203	3.203
Jumlah deposito berjangka		19.228	13.113	13.113
Jumlah		23.380	17.439	17.439

Tingkat bunga deposito berjangka per tahun adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2019	31 Desember 2018
Rupiah	2,60%-9,00%	2,50%-9,25%
Mata uang asing	0,50%-3,75%	0,50%-3,75%

Pihak berelasi dimana Grup melakukan penempatan dananya merupakan bank milik negara. Grup menempatkan sebagian besar kas dan setara kasnya di bank-bank tersebut karena mereka memiliki jaringan cabang yang luas di Indonesia dan secara keuangan dianggap aman karena dimiliki oleh negara.

Lihat Catatan 31 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. ASET KEUANGAN LANCAR LAINNYA

	Mata uang	31 Maret 2019		31 Desember 2018	
		Saldo		Saldo	
		Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Deposito berjangka					
Pihak berelasi					
BRI	Rp	-	85	-	-
Mandiri	Rp	-	65	-	-
BNI	Rp	-	1	-	1
Pihak ketiga					
SCB	US\$	8	114	8	116
Lain-lain	Rp	-	18	-	-
	US\$	6	73	6	88
Jumlah deposito berjangka			<u>356</u>		<u>205</u>
Aset keuangan tersedia untuk dijual					
Pihak berelasi					
PT Mandiri Manajemen Investasi	Rp	-	380	-	379
PT Bahana TCW Investment Management ("Bahana TCW")	Rp	-	80	-	91
Sub-jumlah			<u>460</u>		<u>470</u>
Jumlah aset keuangan tersedia untuk dijual			<u>460</u>		<u>470</u>
Rekening penampungan	Rp	-	74	-	136
	US\$	0	0	-	1
	MYR	5	16	-	16
Lainnya	Rp	-	438	-	476
	US\$	0	1	0	-
	MYR	0	0	5	-
	AUD	1	5	-	-
Jumlah			<u>1.350</u>		<u>1.304</u>

Seluruh deposito berjangka di atas memiliki tanggal jatuh tempo lebih dari tiga bulan tetapi tidak lebih dari satu tahun, dengan tingkat bunga per tahun sebagai berikut:

	31 Maret 2019	31 Desember 2018
Rupiah	5,00%-7,52%	5,00%
Mata uang asing	2,30%-2,40%	1,35%-1,92%

Lihat Catatan 31 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PIUTANG USAHA

Piutang usaha berhubungan dengan jasa yang diberikan kepada pelanggan *retail* dan *non-retail*, dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan pelanggan

(i) Pihak berelasi

	<u>31 Maret 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
BUMN	2.028	1.649
Indonusa	535	522
PT Indosat Tbk ("Indosat")	221	219
Lain-lain	466	467
Jumlah	3.250	2.857
Provisi penurunan nilai piutang	(586)	(731)
Jumlah bersih	2.664	2.126

(ii) Pihak ketiga

	<u>31 Maret 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Pelanggan individual dan bisnis	15.668	12.044
Penyelenggara jasa telekomunikasi internasional luar negeri	1.281	1.542
Jumlah	16.949	13.586
Provisi penurunan nilai piutang	(4.937)	(4.298)
Jumlah bersih	12.012	9.288

b. Berdasarkan umur

(i) Pihak berelasi

	<u>31 Maret 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Sampai dengan 3 bulan	2.284	1.748
3 sampai dengan 6 bulan	118	296
Lebih dari 6 bulan	848	813
Jumlah	3.250	2.857
Provisi penurunan nilai piutang	(586)	(731)
Jumlah bersih	2.664	2.126

(ii) Pihak ketiga

	<u>31 Maret 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Sampai dengan 3 bulan	11.448	8.006
3 sampai dengan 6 bulan	1.037	1.502
Lebih dari 6 bulan	4.464	4.078
Jumlah	16.949	13.586
Provisi penurunan nilai piutang	(4.937)	(4.298)
Jumlah bersih	12.012	9.288

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

c. Berdasarkan umur (lanjutan)

(iii) Umur total piutang usaha

	31 Maret 2019		31 Desember 2018	
	Sebelum provisi	Provisi penurunan nilai piutang	Sebelum provisi	Provisi penurunan nilai piutang
Belum jatuh tempo	11.006	285	7.512	394
Jatuh tempo sampai dengan 3 bulan	2.726	318	2.244	281
Jatuh tempo lebih dari 3 bulan sampai dengan 6 bulan	1.155	546	1.797	329
Jatuh tempo lebih dari 6 bulan	5.312	4.374	4.890	4.025
Jumlah	20.199	5.523	16.443	5.029

Grup telah membentuk provisi penurunan nilai piutang usaha berdasarkan tingkat penurunan nilai historis secara kolektif dan historis kredit para pelanggan secara individual. Grup tidak membedakan piutang usaha pihak berelasi dan piutang usaha pihak ketiga dalam menilai jumlah yang jatuh tempo. Pada tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018, nilai tercatat piutang usaha Grup yang telah jatuh tempo tetapi tidak diturunkan nilainya masing-masing sebesar Rp3.955 miliar dan Rp4.296 miliar. Manajemen telah menyimpulkan bahwa piutang usaha yang telah jatuh tempo tetapi tidak diturunkan nilainya, termasuk piutang usaha yang belum jatuh tempo dan juga tidak diturunkan nilainya, adalah terutang dari para pelanggan dengan tingkat ketertagihan yang baik dan diharapkan dapat terpulihkan.

c. Berdasarkan mata uang

(i) Pihak berelasi

	31 Maret 2019	31 Desember 2018
Rupiah	3.246	2.850
Dolar A.S.	4	7
Lain-lain	0	0
Jumlah	3.250	2.857
Provisi penurunan nilai piutang	(586)	(731)
Jumlah bersih	2.664	2.126

(ii) Pihak ketiga

	31 Maret 2019	31 Desember 2018
Rupiah	14.627	11.348
Dolar A.S.	2.218	2.118
Dolar Australia	25	19
Lain-lain	79	101
Jumlah	16.949	13.586
Provisi penurunan nilai piutang	(4.937)	(4.298)
Jumlah bersih	12.012	9.288

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

d. Mutasi provisi penurunan nilai piutang

	<u>31 Maret 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Saldo awal	5.029	4.331
Provisi yang diakui selama periode berjalan (Catatan 25)	496	1.724
Penghapusbukuan piutang	(2)	(1.026)
Saldo akhir	<u>5.523</u>	<u>5.029</u>

Penghapusbukuan piutang merupakan penghapusbukuan piutang usaha pihak berelasi dan pihak ketiga.

Manajemen berpendapat bahwa saldo provisi atas penurunan nilai piutang usaha cukup untuk menutup kerugian atas tidak tertagihnya piutang.

Pada tanggal 31 Maret 2019, piutang usaha tertentu entitas anak sebesar Rp6.972 miliar telah dijamin dalam beberapa perjanjian pinjaman (Catatan 15 dan 16c).

Lihat Catatan 31 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

6. PERSEDIAAN

	<u>31 Maret 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Komponen	415	429
Kartu SIM dan vauzer Prabayar	112	137
Lain-lain	155	218
Jumlah	<u>682</u>	<u>784</u>
Provisi atas persediaan usang		
Kartu SIM dan vauzer Prabayar	(28)	(28)
Komponen	(21)	(38)
Lain-lain	(1)	(1)
Jumlah	<u>(50)</u>	<u>(67)</u>
Jumlah bersih	<u>632</u>	<u>717</u>

Mutasi provisi atas persediaan usang adalah sebagai berikut:

	<u>31 Maret 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Saldo awal	67	53
Provisi yang diakui selama periode berjalan	-	22
Penghapusbukuan persediaan	(17)	(8)
Saldo akhir	<u>50</u>	<u>67</u>

Persediaan yang diakui sebagai beban dan termasuk dalam beban usaha operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi pada periode 31 Maret 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp605 miliar dan Rp775 miliar (Catatan 24).

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PERSEDIAAN (lanjutan)

Manajemen berpendapat bahwa saldo provisi atas persediaan usang cukup untuk menutup kerugian akibat dari penurunan nilai persediaan karena usang.

Persediaan tertentu entitas anak sebesar Rp235 miliar telah dijamin dalam beberapa perjanjian pinjaman (Catatan 16c).

Pada tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018, modul dan komponen dengan nilai buku masing-masing sebesar Rp125 miliar dan Rp125 miliar, yang dimiliki oleh Grup telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian, dan risiko lain. Modul dicatat sebagai bagian dari aset tetap. Total nilai pertanggungan pada tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp176 miliar dan Rp176 miliar.

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas persediaan yang muncul dari risiko yang ditanggung.

7. ASET LANCAR LAINNYA

	31 Maret 2019	31 Desember 2018
Sewa dibayar di muka	3.752	1.382
Izin penggunaan frekuensi (Catatan 34c.i)	3.028	3.636
Uang muka	1.743	1.803
Gaji dibayar di muka	264	200
Panjar kerja	70	30
Lain-lain	1.219	931
Jumlah	10.076	7.982

Lihat Catatan 31 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

8. PENYERTAAN JANGKA PANJANG

Grup memiliki penyertaan saham pada beberapa entitas sebagai berikut:

	31 Maret 2019							
	Persentase kepemilikan	Saldo awal	Penambahan (pengurangan)	Bagian laba (rugi) bersih	Dividen	Bagian penghasilan komprehensif lain	Penurunan nilai	Saldo akhir
Penyertaan jangka panjang pada entitas asosiasi:								
Tiphone ^a	24,00	1.602	-	22	-	(4)	-	1.620
Indonusa ^b	20,00	210	-	-	-	-	-	210
PT Integrasi Logistik Cipta Solusi ("ILCS") ^c	49,00	44	-	0	-	0	-	44
PT Graha Sakura Nusantara ("GSN") ^d	45,00	14	-	0	-	-	-	14
Cellum ^e	30,40	79	-	(3)	-	-	-	76
Lain-lain ^f	25,00-51,00	4	-	1	-	-	-	5
Sub-jumlah		1.953	-	20	-	(4)	-	1.969
Penyertaan jangka panjang lainnya		519	16	-	-	-	-	535
Jumlah penyertaan jangka panjang		2.472	16	20	-	(4)	-	2.504

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. PENYERTAAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

Ringkasan informasi keuangan investasi Grup yang diperhitungkan dengan menggunakan metode ekuitas untuk tahun 2019:

	Tiphone*	Indonusa*	ILCS	GSN	Cellum	Lain-lain
<i>Laporan posisi keuangan</i>						
Aset lancar	7.615	449	130	15	12	488
Aset tidak lancar	724	310	46	168	39	717
Liabilitas jangka pendek	(1.466)	(571)	(85)	(4)	(22)	(819)
Liabilitas jangka panjang	(2.984)	(297)	(1)	(149)	(19)	(2.142)
Ekuitas (defisit)	3.889	(109)	90	30	10	(1.756)
<i>Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya</i>						
Pendapatan	29.228	824	37	0	3	127
Beban operasional	(28.227)	(583)	(36)	(1)	(13)	(290)
Penghasilan (beban) lain-lain termasuk biaya pendanaan - bersih	(391)	(39)	(1)	0	-	(24)
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	610	202	-	(1)	(10)	(187)
Manfaat (beban) pajak penghasilan	(165)	(55)	-	-	-	3
Laba (rugi) tahun berjalan	445	147	-	(1)	(10)	(184)
Laba (rugi) komprehensif lain	(63)	(3)	-	-	-	-
Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun berjalan	382	144	-	(1)	(10)	(184)

*Informasi keuangan 31 Desember 2018

31 Desember 2018								
Penyertaan jangka panjang pada entitas asosiasi:	Persentase kepemilikan	Saldo awal	Penambahan (pengurangan)	Bagian laba (rugi) bersih	Dividen	Bagian penghasilan komprehensif lain	Penurunan nilai	Saldo akhir
Indonusa ^b	20,00	221	-	(11)	-	-	-	210
PT Integrasi Logistik Cipta Solusi ("ILCS") ^c	49,00	43	-	1	-	0	-	44
PT Graha Sakura Nusantara ("GSN") ^d	45,00	14	-	0	-	-	-	14
Cellum ^e	30,40	-	84	(5)	-	-	-	79
Lain-lain ^f	25,00-51,00	22	-	(19)	-	1	-	4
Sub-jumlah		1.839	84	53	(9)	(14)	-	1.953
Penyertaan jangka panjang lainnya		309	253	-	-	-	(43)	519
Jumlah penyertaan jangka panjang		2.148	337	53	(9)	(14)	(43)	2.472

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. PENYERTAAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

Ringkasan informasi keuangan investasi Grup yang diperhitungkan dengan menggunakan metode ekuitas untuk tahun 2018:

	Tiphone	Indonusa	ILCS	GSN	Cellum	Lain-lain
<i>Laporan posisi keuangan</i>						
Aset lancar	7.615	449	132	15	22	470
Aset tidak lancar	892	310	47	169	43	717
Liabilitas jangka pendek	(1.466)	(571)	(87)	(1)	(23)	(932)
Liabilitas jangka panjang	(3.062)	(297)	(2)	(152)	(20)	(2.001)
Ekuitas (defisit)	3.979	(109)	90	31	22	(1.746)
<i>Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya</i>						
Pendapatan	29.228	824	164	5	22	301
Beban operasional	(28.117)	(583)	(162)	(5)	(46)	(497)
Penghasilan (beban) lain-lain						-
termasuk biaya pendanaan - bersih	(391)	(39)	1	0	(10)	(46)
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	720	202	3	0	(34)	(242)
Manfaat (beban) pajak penghasilan	(137)	(55)	(1)	-	-	11
Laba (rugi) tahun berjalan	583	147	2	0	(34)	(231)
Laba (rugi) komprehensif lain	(63)	(3)	-	-	-	1
Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun berjalan	520	144	2	0	(34)	(230)

^a Tiphone berdiri pada 25 Juni 2008 dengan nama Tiphone Mobile Indonesia Tbk. Tiphone bergerak di bidang perdagangan perangkat telekomunikasi berupa telepon seluler berikut suku cadang, aksesoris, pulsa serta jasa perbaikan dan penyediaan konten melalui anak perusahaan. Pada tanggal 18 September 2014, Perusahaan melalui PINS melakukan pembelian 25% saham kepemilikan di Tiphone senilai Rp1.395 miliar.

Nilai wajar penyertaan pada tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp1.369 miliar dan Rp1.649 miliar. Nilai wajar dihitung dengan mengalikan jumlah lembar saham dengan harga pasar pada tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp780 dan Rp940 per lembar saham.

Rekonsiliasi informasi keuangan dan nilai tercatat penyertaan jangka panjang pada Tiphone pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

	2018
Aset	8.507
Liabilitas	(4.528)
Aset bersih	3.979
Bagian grup atas aset bersih (24,00% tahun 2018)	955
Goodwill	647
Nilai tercatat penyertaan jangka panjang	1.602

^b Indonusa sebelumnya adalah entitas anak. Pada tahun 2013 Perusahaan menjual 80% kepemilikan sahamnya. Pada tanggal 14 Mei 2014, berdasarkan Surat Sirkuler Pemegang Saham Indonusa yang tercakup dalam akta notaris No. 57 tanggal 23 April 2014 oleh FX Budi Santoso Isbandi, S.H., yang disetujui oleh Menkumham dalam Surat No. AHU-02078.40.20.2014 tanggal 29 April 2014, pemegang saham Indonusa menyetujui atas peningkatan jumlah saham yang diterbitkan dan dibayar penuh sejumlah Rp80 miliar. Perusahaan telah menggunakan haknya atas saham yang diterbitkan dan melakukan pengalihan ke Metra sehingga kepemilikan Metra atas Indonusa meningkat menjadi 4,33% dan kepemilikan Perusahaan atas Indonusa menjadi 15,67%.

^c ILCS bergerak dalam bidang penyelenggaraan jasa layanan *E-trade logistic* dan jasa terkait lainnya.

^d Pada tanggal 31 Agustus 2017, NSI dan pihak ketiga mendirikan GSN yang menjalankan usaha *real estate* dan pemasaran perumahan dan apartemen.

^e Investasi pada Cellum dicatat dengan metode ekuitas berdasarkan perjanjian penyertaan saham baru bersyarat antara Metranet dengan Cellum Global Zrt pada tanggal 30 Januari 2018. Cellum adalah perusahaan penyedia solusi *mobile payment* dan *commerce services*.

^f Bagian kumulatif rugi atas investasi lain-lain yang tidak diakui hingga tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 adalah Rp280 miliar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. ASET TETAP

	1 Januari 2019	Akuisisi	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi/ Translasi	31 Maret 2019
Harga perolehan:						
Aset tetap pemilikan langsung						
Tanah	1.626	6	7	-	8	1.647
Bangunan	11.833	15	8	(200)	243	11.899
Renovasi bangunan sewa	1.375	-	5	(7)	(7)	1.366
Peralatan sentral telepon	15.291	-	168	(4)	121	15.576
Peralatan telegraf, teleks dan komunikasi data	1.586	-	-	-	-	1.586
Peralatan dan instalasi transmisi	141.408	1.260	1.096	(2.155)	2.430	144.039
Satelit, stasiun bumi dan peralatannya	11.972	-	23	(3)	21	12.013
Jaringan kabel	45.451	-	1.253	-	933	47.637
Catu daya	17.864	5	39	(85)	322	18.145
Peralatan pengolahan data	14.265	7	113	(52)	306	14.639
Peralatan telekomunikasi lainnya	3.423	-	419	-	(40)	3.802
Peralatan kantor	2.142	16	32	(6)	(32)	2.152
Kendaraan	641	3	4	(1)	-	647
Peralatan lainnya	94	-	-	-	(41)	53
Aset dalam pembangunan	4.876	81	4.069	(2)	(4.234)	4.790
Aset sewa pembiayaan						
Peralatan dan instalasi transmisi	5.603	-	-	-	-	5.603
Peralatan pengolahan data	1	-	-	-	-	1
Kendaraan	578	-	-	-	-	578
Peralatan kantor	16	-	25	(4)	(76)	(39)
Aset CPE	22	-	-	-	-	22
Catu daya	125	-	-	-	-	125
Aset PBH	252	-	-	(163)	-	89
Jumlah	<u>280.444</u>	<u>1.393</u>	<u>7.261</u>	<u>(2.682)</u>	<u>(46)</u>	<u>286.370</u>

	1 Januari 2019	Akuisisi	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi/ Translasi	31 Maret 2019
Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai:						
Aset tetap pemilikan langsung						
Bangunan	3.405	1	134	(4)	(6)	3.530
Renovasi bangunan sewa	949	-	48	(3)	-	994
Peralatan sentral telepon	10.550	-	348	(2)	25	10.921
Peralatan telegraf, teleks dan komunikasi data	1.320	-	130	-	-	1.450
Peralatan dan instalasi transmisi	74.247	259	2.776	(2.061)	(53)	75.168
Satelit, stasiun bumi dan peralatannya	5.005	-	201	-	1	5.207
Jaringan kabel	12.185	-	520	-	126	12.831
Catu daya	12.316	3	353	(82)	(4)	12.586
Peralatan pengolahan data	10.747	-	298	(13)	-	11.032
Peralatan telekomunikasi lainnya	1.029	-	158	-	-	1.187
Peralatan kantor	1.312	3	88	(9)	-	1.394
Kendaraan	281	1	11	-	(1)	292
Peralatan lainnya	75	-	-	-	(6)	69
Aset sewa pembiayaan						
Peralatan dan instalasi transmisi	3.241	-	150	-	-	3.391
Peralatan pengolahan data	1	-	-	-	-	1
Kendaraan	126	-	19	-	-	145
Peralatan kantor	70	-	1	(3)	-	68
Aset CPE	20	-	-	-	-	20
Catu daya	73	-	-	-	-	73
Aset PBH	244	-	-	(155)	-	89
Jumlah	<u>137.196</u>	<u>267</u>	<u>5.235</u>	<u>(2.332)</u>	<u>82</u>	<u>140.448</u>
Nilai buku bersih	<u>143.248</u>					<u>145.922</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. ASET TETAP (lanjutan)

	1 Januari 2018	Akuisisi	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi/ Translasi	31 Desember 2018
Harga perolehan:						
Aset tetap pemilikan langsung						
Tanah	1.519	46	39	-	22	1.626
Bangunan	9.802	43	67	(1)	1.922	11.833
Renovasi bangunan sewa	1.257	-	23	(24)	119	1.375
Peralatan sentral telepon	18.463	-	818	(1.920)	(2.070)	15.291
Peralatan telegraf, teleks dan komunikasi data	1.583	-	3	-	-	1.586
Peralatan dan instalasi transmisi	133.797	-	3.266	(6.398)	10.743	141.408
Satelit, stasiun bumi dan peralatannya	9.300	-	2.414	(3)	261	11.972
Jaringan kabel	47.155	-	5.887	(36)	(7.555)	45.451
Catu daya	16.279	13	484	(187)	1.275	17.864
Peralatan pengolahan data	13.294	23	140	(540)	1.348	14.265
Peralatan telekomunikasi lainnya	1.659	-	1.765	-	(1)	3.423
Peralatan kantor	1.557	46	471	(18)	86	2.142
Kendaraan	439	6	203	(1)	(6)	641
Peralatan lainnya	97	-	18	-	(21)	94
Aset dalam pembangunan	4.415	2	17.821	(23)	(17.339)	4.876
Aset sewa pembiayaan						
Peralatan dan instalasi transmisi	5.582	-	21	-	-	5.603
Peralatan pengolahan data	83	-	-	(82)	-	1
Kendaraan	401	-	176	-	1	578
Peralatan kantor	80	-	4	(68)	-	16
Aset CPE	22	-	-	-	-	22
Power Supply	215	-	-	(90)	-	125
Aset PBH	252	-	-	-	-	252
Jumlah	<u>267.251</u>	<u>179</u>	<u>33.620</u>	<u>(9.391)</u>	<u>(11.215)</u>	<u>280.444</u>

	1 Januari 2018	Akuisisi	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi/ Translasi	31 Desember 2018
Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai:						
Aset tetap pemilikan langsung						
Bangunan	2.880	-	513	(1)	13	3.405
Renovasi bangunan sewa	823	-	150	(24)	-	949
Peralatan sentral telepon	14.553	-	1.307	(1.920)	(3.390)	10.550
Peralatan telegraf, teleks dan komunikasi data	802	-	518	-	-	1.320
Peralatan dan instalasi transmisi	69.240	-	10.958	(5.579)	(372)	74.247
Satelit, stasiun bumi dan peralatannya	4.334	-	677	(3)	(3)	5.005
Jaringan kabel	17.864	-	2.076	(36)	(7.719)	12.185
Catu daya	11.154	-	1.332	(177)	7	12.316
Peralatan pengolahan data	10.236	-	1.040	(519)	(10)	10.747
Peralatan telekomunikasi lainnya	602	-	428	-	(1)	1.029
Peralatan kantor	1.036	-	290	(18)	4	1.312
Kendaraan	226	-	62	(1)	(6)	281
Peralatan lainnya	96	-	4	-	(25)	75
Aset sewa pembiayaan						
Peralatan dan instalasi transmisi	2.638	-	603	-	-	3.241
Peralatan pengolahan data	76	-	7	(82)	-	1
Kendaraan	66	-	60	-	-	126
Peralatan kantor	80	-	44	(54)	-	70
Aset CPE	20	-	-	-	-	20
Catu daya	120	-	43	(90)	-	73
Aset PBH	234	-	10	-	-	244
Jumlah	<u>137.080</u>	<u>-</u>	<u>20.122</u>	<u>(8.504)</u>	<u>(11.502)</u>	<u>137.196</u>
Nilai buku bersih	<u>130.171</u>	<u>-</u>	<u>20.122</u>	<u>(8.504)</u>	<u>(11.502)</u>	<u>143.248</u>

a. Laba dari pelepasan atau penjualan aset tetap

	2019	2018
Hasil penjualan aset tetap	267	43
Nilai buku bersih	(86)	(42)
Laba dari pelepasan atau penjualan aset tetap	<u>181</u>	<u>1</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. ASET TETAP (lanjutan)

b. Penurunan nilai asset

Pada tahun 2014, Perusahaan telah memutuskan untuk menghentikan bisnis sambungan nirkabel tidak bergerak, dan telah melakukan percepatan pencatatan penyusutan aset bisnis sambungan nirkabel secara penuh di tahun 2015.

Pada tahun 2017, Perusahaan telah menghapusbukukan aset bisnis sambungan nirkabel yang telah disusutkan secara penuh dengan harga perolehan sebesar Rp3.193 miliar.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2017, UPK yang menghasilkan proyeksi arus kas masuk adalah sambungan nirkabel tidak bergerak, seluler dan lainnya. Manajemen berpendapat bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai aset dari UPK lainnya pada tanggal 31 Desember 2018.

c. Lain-lain

(i) Bunga pinjaman yang dikapitalisasi ke aset dalam pembangunan masing-masing sejumlah Rp62 miliar dan Rp271 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan 2018. Tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang layak dikapitalisasi adalah berkisar antara 2,13%-11,00% dan 9,68%-11,00% masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan 2018.

(ii) Tidak ada rugi selisih kurs yang dikapitalisasi ke aset dalam pembangunan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2018.

(iii) Pada tanggal 31 Maret 2019 dan 2018, Grup telah mendapat klaim asuransi atas aset tetap yang hilang dan rusak masing-masing sebesar Rp54 miliar dan Rp153 miliar dan dicatat sebagai bagian dari "Penghasilan Lain-Lain" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Pada tanggal 31 Maret 2019 dan 2018, nilai tercatat aset tetap tersebut masing-masing sebesar Rp7 miliar dan Rp51 miliar, telah dibebankan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

(iv) Pada tahun 2019 dan 2018, Telkomsel memutuskan untuk mengganti peralatan tertentu dengan nilai tercatat bersih masing-masing sebesar Rp48 miliar dan Rp26 miliar, sebagai bagian dari program modernisasi, dan melakukan percepatan pencatatan penyusutan. Dampak penambahan beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 adalah sebesar Rp15 miliar.

Pada tahun 2014, umur manfaat bangunan dan transmisi Telkomsel diubah masing-masing dari 20 tahun menjadi 40 tahun, dan dari 10 tahun menjadi 15 dan 20 tahun agar mencerminkan umur ekonomis bangunan dan transmisi pada saat ini. Dampak perubahan estimasi masa manfaat bangunan dan transmisi tersebut di tahun 2019 adalah meningkatkan laba sebelum pajak sebesar Rp135 miliar.

Pada tahun 2018, umur manfaat lisensi piranti lunak radio dan alat olah data diubah masing-masing dari 7 tahun menjadi 10 tahun dan dari 3 tahun menjadi 5 tahun. Dampak pengurangan beban penyusutan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 adalah sebesar Rp193 miliar, dan akan meningkatkan laba sebelum pajak sebesar Rp444 miliar di akhir periode 31 Maret 2019.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. ASET TETAP (lanjutan)

c. Lain-lain (lanjutan)

(v) Pertukaran aset tetap

Pada tahun 2019 dan 2018, peralatan Telkomsel dengan nilai tercatat bersih masing-masing sebesar Rp106 miliar dan Rp1.117 miliar ditukarkan dengan peralatan Ericsson AB, PT Huawei Tech Investment ("PT Huawei") dan PT Nokia Solutions and Networks Indonesia ("PT NSN"). Pada tanggal 31 Maret 2019, peralatan Telkomsel dengan nilai tercatat bersih Rp340 miliar akan ditukarkan dengan peralatan dari NSN Oy dan Huawei, dan oleh karenanya peralatan tersebut direklasifikasi sebagai aset tersedia untuk dijual pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

(vi) Grup memiliki beberapa bidang tanah yang terletak di berbagai daerah di Indonesia dengan status Hak Guna Bangunan ("HGB") berjangka waktu 10-45 tahun yang akan habis masa berlakunya antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2053. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak akan terdapat kesulitan untuk memperpanjang hak atas tanah pada saat berakhirnya hak tersebut.

(vii) Pada tanggal 31 Maret 2019, aset tetap milik Grup kecuali tanah, dengan nilai tercatat bersih sebesar Rp132.819 miliar telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian, gempa bumi dan risiko lainnya, termasuk gangguan bisnis, dengan jumlah keseluruhan pertanggungan sebesar Rp14.670 miliar, US\$47 juta, HKD9 juta, dan SGD225 juta dan MYR37 juta dan *first loss basis* sebesar Rp2.760 miliar. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

(viii) Pada tanggal 31 Maret 2019, tingkat persentase penyelesaian aset dalam pembangunan adalah sekitar 38,87% dari nilai kontrak dengan perkiraan tanggal penyelesaian antara 2019 sampai dengan September 2020. Saldo aset dalam pembangunan tersebut terutama terdiri dari bangunan, peralatan dan instalasi transmisi, jaringan kabel dan catu daya. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat hambatan yang dapat mempengaruhi penyelesaian aset dalam pembangunan.

(ix) Seluruh aset yang dimiliki Perusahaan telah dijamin dalam perjanjian obligasi (Catatan 16b). Aset tetap entitas anak tertentu dengan biaya perolehan sebesar Rp8.941 miliar telah dijamin dalam beberapa perjanjian pinjaman (Catatan 15 dan 16).

(x) Pada tanggal 31 Maret 2019, jumlah tercatat bruto dari setiap aset tetap Grup yang telah disusutkan secara penuh dan masih digunakan adalah sebesar Rp50.777 miliar. Grup saat ini sedang melakukan modernisasi aset jaringan untuk menggantikan aset tetap yang sudah disusutkan secara penuh.

(xi) Pada tahun 2018, nilai wajar tanah dan bangunan Grup, yang ditentukan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak ("NJOP") tanah dan bangunan yang bersangkutan adalah sebesar Rp33.557 miliar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. ASET TETAP (lanjutan)

d. Lain-lain (lanjutan)

- (xii) Telkomsel menandatangani perjanjian dengan perusahaan penyedia menara lainnya untuk penyewaan ruangan di menara telekomunikasi (slot) dan lokasi menara dengan jangka waktu selama 10 tahun. Telkomsel dapat memperpanjang periode sewa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Disamping itu, Grup juga memiliki komitmen berkaitan dengan sewa pembiayaan untuk peralatan dan instalasi transmisi, peralatan pengolahan data, peralatan kantor, kendaraan, dan aset CPE dengan hak opsi untuk membeli aset-aset pembiayaan tertentu pada akhir masa sewa pembiayaan.

Pembayaran sewa pembiayaan minimum di masa depan untuk aset sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:

<u>Tahun</u>	<u>31 Maret 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
2019	988	1.049
2020	730	945
2021	779	781
2022	597	605
2023	254	254
Selanjutnya	130	130
Jumlah pembayaran minimum sewa pembiayaan	3.478	3.764
Bunga	(550)	(619)
Nilai kini bersih atas pembayaran minimum sewa pembiayaan	2.928	3.145
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun (Catatan 15b)	(792)	(807)
Bagian jangka panjang (Catatan 16)	2.136	2.338

Rincian saldo kewajiban sewa guna usaha pada tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Maret 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	1.036	1.089
PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	880	930
PT Solusi Tunas Pratama	173	181
PT Mandiri Utama Finance	150	186
PT Putra Arga Binangun	150	159
PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia	94	103
PT Bali Towerindo Sentra	82	86
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp75 miliar)	363	411
Jumlah	2.928	3.145

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

Aset tidak lancar lainnya pada tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018 terdiri dari:

	31 Maret 2019	31 Desember 2018
Tagihan restitusi pajak jangka panjang - setelah dikurangi bagian jangka pendek (Catatan 26)	2.726	2.450
Izin penggunaan frekuensi - setelah dikurangi bagian jangka pendek (Catatan 7)	1.679	1.743
Pajak dibayar di muka - setelah dikurangi bagian jangka pendek (Catatan 26)	1.217	1.142
Sewa dibayar di muka - setelah dikurangi bagian jangka pendek (Catatan 7)	1.111	2.662
Uang muka pembelian aset tetap	617	387
Beban tangguhan	599	474
Obligasi konversi	215	213
Kas yang dibatasi penggunaannya	179	183
Setoran jaminan	164	173
Lain-lain	205	245
Jumlah	8.712	9.672

Sewa dibayar di muka merupakan pembayaran atas perjanjian sewa jaringan dan peralatan telekomunikasi serta sewa tanah dan bangunan oleh Perusahaan dan beberapa entitas anak dengan jangka waktu berkisar antara 1 sampai dengan 40 tahun.

Pada tanggal 31 Maret 2019 dan 2018, beban tangguhan mencerminkan Hak Penggunaan yang Tidak Dapat Dibatalkan (*Indefeasible Right of Use* atau "IRU"). Jumlah beban amortisasi untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp17 miliar dan Rp13 miliar.

Lihat Catatan 31 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

11. ASET TAK BERWUJUD

Rincian aset takberwujud adalah sebagai berikut:

	Goodwill	Piranti lunak	Lisensi	Aset takberwujud lainnya	Jumlah
Nilai tercatat bruto:					
Saldo, 1 Januari 2019	1.066	10.680	94	687	12.527
Penambahan	57	539	-	-	596
Akuisisi	-	-	-	415	415
Pengurangan	-	(142)	-	(46)	(188)
Reklasifikasi/translasi	(1)	(1)	-	(1)	(3)
Saldo, 31 Maret 2019	1.122	11.076	94	1.055	13.347
Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai:					
Saldo, 1 Januari 2019	(29)	(6.896)	(81)	(489)	(7.495)
Beban amortisasi	-	(295)	(88)	(12)	(395)
Pengurangan	-	68	-	22	90
Reklasifikasi/translasi	-	1	-	(4)	(3)
Saldo, 31 Maret 2018	(29)	(7.122)	(169)	(483)	(7.803)
Nilai buku bersih	1.093	3.954	(75)	572	5.544

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. ASET TAK BERWUJUD (lanjutan)

Rincian aset takberwujud adalah sebagai berikut (lanjutan):

	<u>Goodwill</u>	<u>Piranti lunak</u>	<u>Lisensi</u>	<u>Aset takberwujud lainnya</u>	<u>Jumlah</u>
Nilai tercatat bruto:					
Saldo, 1 Januari 2018	680	8.387	84	635	9.786
Penambahan	-	2.328	14	19	2.361
Akuisisi	422	1	2	-	425
Pengurangan	-	(51)	(11)	-	(62)
Reklasifikasi/translasi	(36)	15	5	33	17
Saldo, 31 Desember 2018	<u>1.066</u>	<u>10.680</u>	<u>94</u>	<u>687</u>	<u>12.527</u>
Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai:					
Saldo, 1 Januari 2018	(29)	(5.714)	(71)	(442)	(6.256)
Beban amortisasi	-	(1.226)	(9)	(49)	(1.284)
Pengurangan	-	51	4	-	55
Reklasifikasi/translasi	-	(7)	(5)	2	(10)
Saldo, 31 Desember 2018	<u>(29)</u>	<u>(6.896)</u>	<u>(81)</u>	<u>(489)</u>	<u>(7.495)</u>
Nilai buku bersih	<u>1.037</u>	<u>3.784</u>	<u>13</u>	<u>198</u>	<u>5.032</u>

- (i) *Goodwill* timbul dari akuisisi Sigma (2008), Admedika (2010), *data center* BDM (2012), Contact Centres Australia Pty.Ltd. (2014), MNDG (2015), Melon (2016), GSDm (2016), TSGN (2017), Nutech (2017), Swadharma (2018), dan Telin Malaysia (2018) (Catatan 1d).
- (ii) Beban amortisasi diakui sebagai bagian dari "Penyusutan dan Amortisasi" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Sisa periode amortisasi dari aset tak berwujud piranti lunak adalah 1-5 tahun.
- (iii) Pada tanggal 31 Maret 2019, jumlah tercatat bruto dari aset takberwujud yang telah diamortisasi seluruhnya dan masih digunakan adalah sebesar Rp4.538 miliar.

12. UTANG USAHA

	<u>31 Maret 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Pihak berelasi		
Pembelian peralatan, barang dan jasa	946	804
Utang kepada penyelenggara telekomunikasi lainnya	154	189
Sub-jumlah	<u>1.100</u>	<u>993</u>
Pihak ketiga		
Pembelian peralatan, barang dan jasa	13.650	10.874
Beban pemakaian frekuensi radio, beban hak penyelenggaraan dan Kewajiban Pelayanan Universal	1.823	1.471
Utang kepada penyelenggara telekomunikasi lainnya	1.209	1.428
Sub-jumlah	<u>16.682</u>	<u>13.773</u>
Jumlah	<u>17.782</u>	<u>14.766</u>

Utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	<u>31 Maret 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Rupiah	14.997	11.726
Dolar A.S.	2.730	2.978
Lain-lain	55	62
Jumlah	<u>17.782</u>	<u>14.766</u>

Lihat Catatan 31 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	<u>31 Maret 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi Umum, administrasi dan pemasaran	7.411	8.013
Gaji dan tunjangan	2.351	2.299
Beban bunga dan administrasi bank	2.143	2.219
	256	238
Jumlah	<u>12.161</u>	<u>12.769</u>

Lihat Catatan 31 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

14. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

a. Pendapatan diterima di muka jangka pendek

	<u>31 Maret 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Kartu pulsa Prabayar	3.901	4.374
Sewa menara telekomunikasi	671	356
Jasa telekomunikasi lainnya	301	284
Lain-lain	221	176
Jumlah	<u>5.095</u>	<u>5.190</u>

b. Pendapatan diterima di muka jangka panjang

	<u>31 Maret 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Hak penggunaan yang tidak dapat dibatalkan	321	258
Jasa telekomunikasi lainnya	414	394
Jumlah	<u>735</u>	<u>652</u>

15. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN

a. Utang bank jangka pendek

Kreditur	Mata uang	<u>31 Maret 2019</u>		<u>31 Desember 2018</u>	
		<u>Saldo terutang</u>		<u>Saldo terutang</u>	
		<u>Mata uang asal (dalam jutaan)</u>	<u>Setara Rupiah</u>	<u>Mata uang asal (dalam jutaan)</u>	<u>Setara Rupiah</u>
Pihak berelasi					
BNI	Rp	-	1.089	-	956
Sub-jumlah			<u>1.089</u>		<u>956</u>
Pihak ketiga					
MUFG Bank, Ltd. ("MUFG Bank")	Rp	-	740	-	1.295
DBS	Rp	-	725	-	699
UOB	US\$	1	13	1	13
HSBC	Rp	-	494	-	580
	Rp	-	528	-	317
	US\$	0	4	0	4
SCB	Rp	-	85	-	100
Bank CIMB Niaga	Rp	-	78	-	78
Lain-lain	Rp	-	18	-	1
Sub-jumlah			<u>2.685</u>		<u>3.087</u>
Jumlah			<u>3.774</u>		<u>4.043</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN (lanjutan)

a. Utang bank jangka pendek (lanjutan)

Beberapa informasi lain yang signifikan terkait utang bank jangka pendek pada tanggal 31 Maret 2019 adalah sebagai berikut:

	<u>Peminjam</u>	<u>Mata Uang</u>	<u>Total fasilitas (dalam miliar)</u>	<u>Jatuh tempo fasilitas pinjaman</u>	<u>Periode pembayaran bunga</u>	<u>Tingkat suku bunga per tahun</u>	<u>Jaminan</u>
BNI							
2014 - 2017	GSD ^e , Sigma ^a	Rp	375	9 Januari 2020 - 8 November 2019	Bulanan	9,00%	Piutang usaha (Catatan 5) dan aset tetap (Catatan 9)
2013 - 2018	Telkom Infratel, Infomedia ^f , MD Media, Sigma ^e	Rp	2.895	9 Januari 2020 - 30 November 2019	Bulanan	1 bulan JIBOR + 2,20% - 3,00%	Piutang usaha (Catatan 5)
MUFG Bank							
2018	Telkomsel, Infomedia, Metra, TII	Rp	2.350	27 Maret 2019 - 27 September 2019	Bulanan, Semesteran	1 bulan JIBOR + 0,70% - 0,95%; 6 bulan JIBOR + 0,70%	Tidak ada
DBS							
2018	Telkom Infratel, Infomedia	Rp	600	26 Februari 2019	Bulanan	1 bulan JIBOR + 0,70%	Tidak ada
2016	Nutech ^e	Rp	17	13 Oktober 2019	Bulanan	10,50% - 11,00%	Tidak ada
2016	Sigma ^{b,c}	US\$	0,02	31 Juli 2019	Semesteran	3,25% (US\$), 10,75% (Rp)	Piutang usaha (Catatan 5)
UOB							
2016 - 2018	MD Media, Finnet ^d	Rp	800	6 April 2019 - 20 Desember 2020	Bulanan	1 bulan JIBOR + 2,00%	Piutang usaha (Catatan 5)
HSBC							
2018	Sigma, Metra	Rp	950	15 Juli 2019 - 13 September 2019	Bulanan	14,34%, 1 bulan JIBOR + 0,70%	Piutang usaha (Catatan 5), Tidak ada
2018	Sigma	US\$	0,004	15 Juli 2019	Bulanan	13,12%	Piutang usaha (Catatan 5)
2018	PINS	Rp	300	28 Juni 2019	Triwulanan	3 bulan JIBOR + 1,00%	Tidak ada
SCB							
2015	GSD ^e	Rp	100	28 Juni 2019	Bulanan	10,50%	Tidak ada
Bank CIMB Niaga							
2013	GSD ^e	Rp	85	1 Januari 2020	Bulanan	10,90% - 11,50%	Piutang usaha (Catatan 5) dan aset tetap (Catatan 9)

* Disajikan dalam mata uang asal.

^a Berdasarkan amandemen terakhir tanggal 21 Desember 2017.

^b Berdasarkan amandemen terakhir tanggal 5 Desember 2018.

^c Fasilitas dalam mata uang Dolar A.S. Penarikan dapat dilakukan dalam mata uang Dolar A.S. dan Rupiah.

^d Berdasarkan amandemen terakhir tanggal 5 Juni 2018.

^e Perpanjangan otomatis bila belum dilunasi.

^f Berdasarkan amandemen terakhir tanggal 28 Maret 2018 dan 6 Juli 2018.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN (lanjutan)

a. Utang bank jangka pendek (lanjutan)

Pada tanggal 26 Februari 2018, Perusahaan dan TII menandatangani perjanjian kredit modal kerja dari Bank Mandiri sebesar Rp50 miliar dan fasilitas tersebut telah digunakan sepenuhnya.

Pada tanggal 27 Maret 2018, Perusahaan, Metra, TII, Telkom Infratel dan Infomedia menandatangani perjanjian kredit modal kerja dari Bank of Tokyo dan DBS masing-masing sebesar Rp500 miliar dan Rp600 miliar. Per 31 Desember 2018, fasilitas yang belum digunakan dari Bank of Tokyo dan DBS masing-masing sebesar Rp80 miliar dan Rp275 miliar.

Fasilitas utang bank yang diperoleh entitas anak digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun

	Catatan	31 Maret 2019	31 Desember 2018
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	16a	196	198
Obligasi dan wesel bayar	16b	526	525
Utang bank	16c	5.481	4.472
Pinjaman lainnya	16d	294	294
Utang sewa pembiayaan	9c.xiii	792	807
Jumlah		7.289	6.296

16. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA

	Catatan	31 Maret 2019	31 Desember 2018
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	16a	708	751
Obligasi dan wesel bayar	16b	9.956	9.956
Utang bank	16c	17.797	18.753
Pinjaman lainnya	16d	1.858	1.950
Utang sewa pembiayaan	9c.xiii	2.136	2.338
Jumlah		32.455	33.748

Jadwal pembayaran pokok utang pada tanggal 31 Maret 2019 adalah sebagai berikut:

	Catatan	Jumlah	Tahun				Selanjutnya
			2020	2021	2022	2023	
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	16a	708	163	179	142	126	99
Obligasi dan wesel bayar	16b	9.956	2.490	477	2.198	-	4.791
Utang bank	16c	17.797	6.088	3.407	2.959	2.116	3.227
Pinjaman lainnya	16d	1.858	312	404	405	415	322
Utang sewa pembiayaan	9c.xiii	2.136	576	669	541	232	118
Jumlah		32.455	9.629	5.136	6.245	2.889	8.557

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

a. Pinjaman penerusan (*two-step loans*)

Pinjaman penerusan (*two-step loans*) adalah pinjaman tanpa jaminan yang diperoleh Pemerintah yang kemudian diteruskan kepada Perusahaan. Pinjaman yang diperoleh hingga bulan Juli 1994 dicatat dan terutang dalam Rupiah berdasarkan kurs pada tanggal penarikan pinjaman. Pinjaman yang diperoleh setelah bulan Juli 1994 terutang dalam mata uang asalnya dan keuntungan atau kerugian selisih kurs yang terjadi ditanggung oleh Perusahaan.

Kreditur	Mata uang	31 Maret 2019		31 Desember 2018	
		Saldo terutang		Saldo terutang	
		Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Bank luar negeri	Yen	4.607	593	4.607	602
	US\$	13	155	13	188
	Rp	-	156	-	159
Jumlah			904		949
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun (15b)			(196)		(198)
Bagian jangka panjang			708		751

Kreditur	Mata uang	Periode jadwal pembayaran	Pembayaran bunga	Tingkat bunga per tahun
Bank luar negeri	Yen	Semesteran	Semesteran	2,95%
	US\$	Semesteran	Semesteran	3,85%
	Rp	Semesteran	Semesteran	7,50%

Pinjaman tersebut ditujukan untuk membiayai pengembangan infrastruktur dan sarana penunjang telekomunikasi. Pinjaman ini akan dilunasi dalam angsuran semesteran dan jatuh tempo pada berbagai tanggal sampai dengan tahun 2024.

Sejak 2008, Perusahaan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman penerusan dan periode penarikan pinjaman penerusan tersebut telah berakhir.

Perusahaan diharuskan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio *projected net revenue to projected debt service* harus melebihi 1,2:1 untuk pinjaman penerusan yang berasal dari Bank Pembangunan Asia (“ADB”).
- Pendanaan dari sumber internal (laba sebelum penyusutan dan biaya pendanaan) harus melebihi 20% dari rata-rata jumlah pengeluaran barang modal tahunan untuk pinjaman penerusan yang berasal dari ADB.

Pada tanggal 31 Maret 2019, Perusahaan memenuhi ketentuan rasio-rasio tersebut di atas.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

b. Obligasi dan wesel bayar

Obligasi dan wesel bayar	Mata uang	31 Maret 2019		31 Desember 2018	
		Saldo terutang		Saldo terutang	
		Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Obligasi					
2010					
Seri B	Rp	-	1.995	-	1.995
2015					
Seri A	Rp	-	2.200	-	2.200
Seri B	Rp	-	2.100	-	2.100
Seri C	Rp	-	1.200	-	1.200
Seri D	Rp	-	1.500	-	1.500
Wesel bayar jangka menengah (<i>Medium term notes</i> atau "MTN")					
MTN I Telkom Tahun 2018					
Seri A	Rp	-	262	-	262
Seri B	Rp	-	200	-	200
Seri C	Rp	-	296	-	296
MTN Syariah Ijarah I Telkom Tahun 2018					
Seri A	Rp	-	264	-	264
Seri B	Rp	-	296	-	296
Seri C	Rp	-	182	-	182
Jumlah			10.495		10.495
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi			(13)		(14)
Jumlah			10.482		10.481
Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun (catatan 15b)			(526)		(525)
Bagian jangka panjang			9.956		9.956

i. Obligasi

Tahun 2010

Obligasi	Pokok utang	Penerbit	Tempat pencatatan	Tanggal terbit	Jatuh tempo	Periode pembayaran bunga	Tingkat bunga per tahun
Seri B	1.995	Perusahaan	BEI	25 Juni 2010	6 Juli 2020	Kuartalan	10,20%

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari (Catatan 9c.ix). Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah PT Bahana Sekuritas ("Bahana"), PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas. Sedangkan bertindak sebagai Wali Amanat adalah Bank CIMB Niaga. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Obligasi pada tanggal 26 September 2018, wali amanat obligasi berganti menjadi BTN.

Perusahaan menerima hasil penerbitan obligasi ini pada tanggal 6 Juli 2010.

Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk membiayai belanja modal yang meliputi: *wave broadband* (pita lebar), *softswitching*, datakom, teknologi informasi dan lainnya), infrastruktur (*backbone*, *metro network*, *regional metro junction*, *internet protocol*, dan sistem satelit) dan optimasi *legacy* dan fasilitas penunjang (*fixed wireline* dan *wireless*).

Pada tanggal 31 Maret 2019, peringkat obligasi Perusahaan yang diberikan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo") adalah idAAA (*stable outlook*).

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

b. Obligasi dan wesel bayar (lanjutan)

i. Obligasi (lanjutan)

Tahun 2010 (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian perwaliamanatan, Perusahaan dipersyaratkan untuk menaati semua pembatasan, termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

1. *Debt to equity* tidak lebih dari 2:1.
2. *EBITDA* terhadap beban bunga tidak kurang dari 5:1.
3. *Debt service coverage* minimal sebesar 125%.

Pada tanggal 31 Maret 2019, Perusahaan memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

Tahun 2015

Obligasi	Pokok utang	Penerbit	Tempat pencatatan	Tanggal terbit	Jatuh tempo	Periode pembayaran bunga	Tingkat bunga per tahun
Seri A	2.200	Perusahaan	BEI	23 Juni 2015	23 Juni 2022	Kuartalan	9,93%
Seri B	2.100	Perusahaan	BEI	23 Juni 2015	23 Juni 2025	Kuartalan	10,25%
Seri C	1.200	Perusahaan	BEI	23 Juni 2015	23 Juni 2030	Kuartalan	10,60%
Seri D	1.500	Perusahaan	BEI	23 Juni 2015	23 Juni 2045	Kuartalan	11,00%
Total	7.000						

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari (Catatan 9c.ix). Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah Bahana, PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk. Sedangkan bertindak sebagai Wali Amanat adalah Bank Permata.

Perusahaan menerima hasil penerbitan obligasi ini pada tanggal 23 Juni 2015.

Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk pengembangan usaha: Broadband, Backbone, Metro & RMJ serta IT App & Support dan akuisisi beberapa perusahaan baik dalam lingkup domestik maupun internasional.

Pada tanggal 31 Maret 2019, peringkat obligasi Perusahaan yang diberikan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) adalah idAAA (*stable outlook*).

Berdasarkan perjanjian perwaliamanatan, Perusahaan dipersyaratkan untuk menaati semua pembatasan, termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

1. *Debt to equity* tidak lebih dari 2:1.
2. *EBITDA* terhadap beban bunga tidak kurang dari 4:1.
3. *Debt service coverage* minimal sebesar 125%.

Pada tanggal 31 Maret 2019, Perusahaan memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

b. Obligasi dan wesel bayar (lanjutan)

ii. Wesel bayar

MTN I Telkom Tahun 2018

<u>Wesel bayar</u>	<u>Mata uang</u>	<u>Pokok utang</u>	<u>Tanggal terbit</u>	<u>Jatuh tempo</u>	<u>Periode pembayaran bunga</u>	<u>Tingkat bunga per tahun</u>	<u>Jaminan</u>
Seri A	Rp	262	4 September 2018	14 September 2019	Kuartalan	7,25%	Seluruh aset
Seri B	Rp	200	4 September 2018	4 September 2020	Kuartalan	8,00%	Seluruh aset
Seri C	Rp	296	4 September 2018	4 September 2021	Kuartalan	8,35%	Seluruh aset
		<u>758</u>					

Berdasarkan Perjanjian Penerbitan dan Agen Pemantauan *Medium Term Notes* (MTN) I Telkom Tahun 2018 yang dinyatakan dalam akta Notaris No. 24 tanggal 31 Agustus 2018 oleh Fathiah Helmi, S.H., Perusahaan akan menerbitkan MTN dengan keseluruhan nilai pokok MTN yaitu sebanyak-banyaknya sebesar Rp758 miliar yang diterbitkan secara berseri.

Bertindak sebagai *Arranger* atas MTN adalah Bahana, PT BNI Sekuritas, PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas. BTN sebagai Agen Pemantau, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) bertindak sebagai Agen Pembayaran dan Jasa Penitipan Kolektif (Kustodian). MTN tersebut diterbitkan tanpa melalui transaksi reguler di bursa (*private placement*). Dana yang diperoleh dari MTN tersebut digunakan untuk pengembangan jaringan akses dan *backbone*.

Pada tanggal 31 Maret 2019, peringkat MTN yang diberikan oleh Pefindo adalah idAAA (Triple A).

Berdasarkan perjanjian, Perusahaan dipersyaratkan menaati seluruh perjanjian dan pembatasan termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

1. *Debt to equity* tidak lebih dari 2:1
2. *EBITDA* terhadap beban bunga tidak kurang dari 4:1
3. *Debt Service Coverage* minimal sebesar 125%

Pada tanggal 31 Maret 2019, Perusahaan memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

b. Obligasi dan wesel bayar (lanjutan)

ii. Wesel bayar (lanjutan)

MTN Syariah Ijarah I Telkom Tahun 2018

Wesel bayar	Mata uang	Pokok utang	Tanggal terbit	Jatuh tempo	Periode imbalan	Cicilan imbalan per tahun	Jaminan
Seri A	Rp	264	4 September 2018	14 September 2019	Kuartalan	19	Hak manfaat obyek Ijarah
Seri B	Rp	296	4 September 2018	4 September 2020	Kuartalan	24	Hak manfaat obyek Ijarah
Seri C	Rp	182	4 September 2018	4 September 2021	Kuartalan	15	Hak manfaat obyek Ijarah
		742				58	

Berdasarkan Perjanjian Penerbitan dan Agen Pemantauan *Medium Term Notes* (MTN) Syariah Ijarah Telkom Tahun 2018 yang dinyatakan dalam akta Notaris No. 26 tanggal 31 Agustus 2018 oleh Fathiah Helmi, S.H., Perusahaan akan menerbitkan MTN Syariah Ijarah dengan keseluruhan nilai pokok MTN Syariah Ijarah yaitu sebanyak-banyaknya sebesar Rp742 miliar yang diterbitkan secara berseri.

Bertindak sebagai *Arranger* atas MTN adalah Bahana, PT BNI Sekuritas, PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas. BTN sebagai Agen Pemantau, dan KSEI bertindak sebagai Agen Pembayaran dan Jasa Penitipan Kolektif (Kustodian). MTN Syariah Ijarah tersebut diterbitkan tanpa melalui transaksi regular di bursa (*private placement*). Dana yang diperoleh dari MTN Syariah Ijarah tersebut digunakan untuk pengembangan jaringan akses dan *backbone*. Objek Ijarah dari MTN Syariah Ijarah tersebut berupa jaringan telekomunikasi di wilayah D.I Yogyakarta yaitu jaringan kabel, peralatan teknologi informasi, dan alat-alat produksi layanan telekomunikasi lainnya.

Pada tanggal 31 Maret 2019, peringkat MTN Syariah Ijarah yang diberikan oleh Pefindo adalah idAAA Sy (Triple A Syariah).

Berdasarkan perjanjian, Perusahaan dipersyaratkan menaati seluruh perjanjian dan pembatasan termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

1. *Debt to equity* tidak lebih dari 2:1
2. *EBITDA* terhadap beban bunga tidak kurang dari 4:1
3. *Debt Service Coverage* minimal sebesar 125%

Pada tanggal 31 Maret 2019, Perusahaan memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

c. Utang bank

Kreditur	Mata uang	31 Maret 2019		31 Desember 2018	
		Saldo terutang		Saldo terutang	
		Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Pihak berelasi					
BNI	Rp	-	5.688	-	6.826
BRI	Rp	-	4.537	-	4.546
Bank Mandiri	Rp	-	1.109	-	1.248
Sub-jumlah			11.334		12.620
Pihak ketiga					
MUFG Bank	Rp	-	3.407	-	3.011
	US\$	9	127	10	144
Sindikasi bank	Rp	-	1.510	-	1.750
	US\$	37	527	37	532
Citibank	Rp	-	1.000	-	1.000
PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")	Rp	-	1.839	-	740
UOB Singapore	US\$	44	625	49	710
Sumitomo	Rp	-	608	-	661
Bank CIMB Niaga	Rp	-	441	-	462
ANZ	Rp	-	440	-	440
UOB	Rp	-	428	-	428
DBS	Rp	-	716	-	379
PT Bank ICBC Indonesia ("ICBC")	Rp	-	193	-	204
Exim Bank of Malaysia Berhad	MYR	19	68	23	81
Japan Bank for International Cooperation ("JBIC")	US\$	-	-	3	45
Lain-lain	Rp	-	31	-	33
	MYR	13	44	23	46
Sub-jumlah			12.004		10.666
Jumlah			23.338		23.286
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi			(60)		(61)
			23.278		23.225
Utang bank yang jatuh tempo dalam satu tahun (catatan 15b)			(5.481)		(4.587)
Bagian jangka panjang			17.797		18.638

Informasi lain yang signifikan terkait utang bank pada tanggal 31 Maret 2019 adalah sebagai berikut:

BNI	Peminjam	Mata Uang	Total fasilitas (dalam miliar)*	Pembayaran periode berjalan (dalam miliar)*	Jadwal pembayaran	Periode pembayaran bunga	Tingkat suku bunga per tahun	Jaminan
2018	GSD	Rp	182	6	2018 - 2021	Bulanan	8,75%	Piutang usaha (Catatan 5)
2013 - 2018	Perusahaan, Telkomsel ^a , GSD, TLT, Sigma, Dayamitra, Telkom Infratel, Telkom Akses	Rp	8.742	1.266	2016 - 2033	Bulanan, Kuartalan	1 bulan JIBOR + 1,50%; 3 bulan JIBOR + 1,85% - 2,50%	Piutang usaha (Catatan 5), persediaan (Catatan 6) dan aset tetap (Catatan 9)
Bank Mandiri								
2016 - 2018	Perusahaan, Telkomsel ^{a,b} , Balebat, Telkomsat	Rp	8.750	4.010	2017 - 2024	Bulanan, Kuartalan	8,50%, 8,75%, 9,00%, 9,50%	Piutang usaha (Catatan 5), persediaan (Catatan 6) dan aset tetap (Catatan 9)
2017	GSD, TII, Dayamitra	Rp	845	-	2019 - 2024	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,85%	Tidak ada

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

c. Utang bank (lanjutan)

Informasi lain yang signifikan terkait utang bank pada tanggal 31 Maret 2019 adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Peminjam	Mata Uang	Total fasilitas (dalam miliar)*	Pembayaran periode berjalan (dalam miliar)*	Jadwal pembayaran	Periode pembayaran bunga	Tingkat suku bunga per tahun	Jaminan
BRI								
2013	GSD	Rp	103	48	2014 - 2021	Bulanan	10,00%	Piutang usaha (Catatan 5), Aset tetap (Catatan 9) dan kontrak sewa
2017 - 2018	Perusahaan, Dayamitra	Rp	1.200	91	2019 - 2025	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,85%	Tidak ada
MUFG Bank								
2015 - 2018	GSD, Metra, Infomedia, Dayamitra	Rp	3.700	53	2016 - 2025	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,43% - 2,25%	Aset tetap (Catatan 9) dan kontrak sewa
2018	TII	US\$	0,01	-	2019 - 2023	Kuartalan	3 bulan LIBOR + 1,25%	Tidak ada
Bank Sindikasi								
2015	Perusahaan, GSD	Rp	3.000	250	2016 - 2022	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 2,00%	Seluruh aset
2018	TII	US\$	0,09	-	2020 - 2024	Semesteran	6 bulan LIBOR + 1,25%	Tidak ada
Citibank								
2018	Perusahaan	Rp	1.000	-	2019 - 2020	Kuartalan	8,50%	Tidak ada
BCA								
2017 - 2018	Metra, Dayamitra, Telkom Infratel, PST	Rp	1.470	17	2018 - 2027	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,50% - 1,85%	Aset tetap (Catatan 9)
UOB Singapore								
2016	TII	US\$	0,06	-	2019 - 2024	Bulanan	1 bulan JIBOR + 1,25%	Tidak ada
Sumitomo								
2015 - 2017	GSD, Metra, Infomedia, Dayamitra	Rp	1.150	53	2016 - 2022	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,50% - 2,15%	Tidak ada
Bank CIMB Niaga								
2011	GSD	Rp	78	2	2011 - 2021	Bulanan	9,75%	Aset tetap (Catatan 9) dan kontrak sewa
2017	GSD, Metra	Rp	495	19	2018 - 2023	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,50%	Tidak ada
ANZ								
2015 - 2017	GSD, PINS	Rp	750	-	2020 - 2022	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 2,00%	Aset tetap (Catatan 9)
UOB								
2016	Dayamitra	Rp	500	-	2018 - 2024	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 2,20%	Aset tetap (Catatan 9)
DBS								
2016 - 2017	Nutech, Telkomsat	Rp	136	-	2017 - 2022	Bulanan, Semesteran	9,17%, 11,00%	Piutang usaha (Catatan 5) dan aset tetap (Catatan 9)
2017 - 2019	PINS, Dayamitra	Rp	775	38	2018 - 2026	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,50%	Tidak ada

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

c. Utang bank (lanjutan)

Informasi lain yang signifikan terkait utang bank pada tanggal 31 Maret 2019 adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Peminjam	Mata Uang	Total fasilitas (dalam miliar)*	Pembayaran periode berjalan (dalam miliar)*	Jadwal pembayaran	Periode pembayaran bunga	Tingkat suku bunga per tahun	Jaminan
ICBC								
2017	GSD	Rp	272	11	2017 - 2023	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 2,36%	Piutang usaha (Catatan 5) dan aset tetap (Catatan 9)
Exim Bank of Malaysia Berhard								
2016	TII	MYR	0,06	0,014	2017 - 2020	Bulanan	ECOF + 1,89%	Tidak ada

* Disajikan dalam mata uang asal

- ^a Telkomsel tidak memberikan jaminan apa pun atas setiap pinjaman atau fasilitas kredit lainnya. Persyaratan dari berbagai pinjaman antara Telkomsel dengan krediturnya dan penyedia dana, mengharuskan ketaatan terhadap sejumlah jaminan dan larangan termasuk persyaratan keuangan dan lainnya, diantaranya pembatasan atas jumlah dividen dan bentuk distribusi laba lainnya yang dapat berdampak buruk pada kemampuan Telkomsel untuk memenuhi persyaratan dari fasilitas-fasilitas tersebut. Persyaratan dari perjanjian yang relevan juga meliputi klausul gagal bayar dan gagal bayar silang. Pada tanggal 31 Maret 2019, Telkomsel memenuhi persyaratan tersebut di atas.
- ^b Berdasarkan amandemen terakhir tanggal 11 Desember 2018.

Sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian, Grup diharuskan untuk menaati semua persyaratan atau batasan seperti adanya pembatasan pembagian dividen, pembatasan perolehan utang baru, termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan. Pada tanggal 31 Maret 2019, Grup telah memenuhi ketentuan mengenai rasio keuangan tersebut, kecuali untuk pinjaman tertentu. Pada tanggal 31 Maret 2019, Grup telah memperoleh persetujuan (*waiver*) dari pemberi pinjaman untuk tidak mensyaratkan pembayaran sebagai konsekuensi atas pelanggaran tersebut.

Pada tanggal 13 Maret 2015, Perusahaan, GSD, Metra dan Infomedia menandatangani perjanjian kredit dari Sumitomo, MUFG Bank, ANZ dan sindikasi bank (BCA dan BNI) masing-masing sebesar Rp750 miliar, Rp750 miliar, Rp500 miliar dan Rp3.000 miliar. Berdasarkan amandemen pada tanggal 2 Agustus 2016, Dayamitra dan Telkom Akses dimasukkan sebagai peminjam ke Sumitomo dan MUFG Bank, perjanjian fasilitas kredit dan mengecualikan GSD dari perjanjian tersebut. Berdasarkan amandemen terakhir pada tanggal 13 Maret 2017, PINS dimasukkan sebagai salah satu peminjam dalam perjanjian fasilitas kredit ANZ. Pada tahun 2017, PINS melakukan penarikan fasilitas kredit sebesar Rp200 miliar. Per 31 Maret 2019, fasilitas yang belum digunakan dari Sumitomo, MUFG Bank, dan ANZ masing-masing sebesar Rp82,5 miliar, Rp82,5 miliar dan Rp60 miliar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

c. Utang bank (lanjutan)

Pada tanggal 24 Maret 2017, Perusahaan, Dayamitra, Sigma, GSD, dan TII menandatangani perjanjian kredit dari BRI, BNI, dan Bank Mandiri masing-masing sebesar Rp1.000 miliar, Rp2.005 miliar, dan Rp1.500 miliar. Per 31 Maret 2019, fasilitas yang belum digunakan dari Bank Mandiri sebesar Rp5 miliar.

Pada tanggal 30 Maret 2017, Perusahaan, GSD, Metra, Dayamitra, PINS, dan Telkomsat menandatangani perjanjian kredit dari MUFG Bank, Sumitomo, DBS, Bank CIMB Niaga, dan BCA, masing-masing sebesar Rp400 miliar, Rp400 miliar, Rp850 miliar, Rp495 miliar, dan Rp850 miliar. Berdasarkan amandemen pada tanggal 29 Juni 2017, BCA setuju Telkom Infratel menggantikan PINS selaku debitur yang dapat melakukan penarikan kredit. Per 31 Maret 2019, fasilitas yang belum digunakan dari MUFG Bank, Sumitomo, DBS, Bank CIMB Niaga, dan BCA masing-masing sebesar Rp79 miliar, Rp79 miliar, Rp420 miliar, Rp20 miliar dan Rp564 miliar.

Pada tanggal 27 Maret 2018, Perusahaan, Dayamitra dan TII menandatangani perjanjian kredit dari BNI, BRI, Bank Mandiri, dan MUFG Bank, masing - masing sebesar Rp825 miliar, Rp700 miliar, Rp775 miliar dan Rp800 miliar. Per 31 Maret 2019, fasilitas yang belum digunakan dari BNI, BRI, Bank Mandiri dan MUFG Bank masing - masing sebesar Rp825 miliar, Rp500 miliar, Rp775 miliar dan RpNihil.

Fasilitas utang bank yang diperoleh Grup tersebut digunakan untuk keperluan modal kerja.

d. Pinjaman lainnya

Kreditur	Mata uang	Saldo terutang	
		31 Maret 2019	31 Desember 2018
PT Sarana Multi Infrastruktur			
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	Rp	2.158	2.250
Jumlah		(6)	(6)
Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun (catatan 15b)		2.152	2.244
Bagian jangka panjang		(294)	(294)
		1.858	1.950

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

d. Pinjaman lainnya

i. Dayamitra

	<u>Peminjam</u>	<u>Mata uang</u>	<u>Total fasilitas (dalam miliar)</u>	<u>Pembayaran periode berjalan (dalam miliar)</u>	<u>Jadwal pembayaran</u>	<u>Tingkat suku bunga per tahun</u>	<u>Jaminan</u>
PT Sarana Multi Infrastruktur							
12 Oktober 2016	Dayamitra	Rp	700	100	Semesteran (2018-2024)	3 bulan JIBOR+1,85%	Aset tetap (Catatan 9)
29 Maret 2017	Dayamitra	Rp	600	86	Semesteran (2018-2024)	3 bulan JIBOR+ 1,85%	Aset tetap (Catatan 9)

Berdasarkan perjanjian tersebut, Dayamitra diharuskan memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan, diantaranya mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

1. *Debt to equity* tidak lebih dari 5:1.
2. *Net debt* terhadap *EBITDA* tidak lebih dari 4:1.
3. *Debt service coverage* minimal 100%.

Pada tanggal 31 Maret 2019, Dayamitra memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

ii. Perusahaan

	<u>Peminjam</u>	<u>Mata uang</u>	<u>Total fasilitas (dalam miliar)</u>	<u>Pembayaran periode berjalan (dalam miliar)</u>	<u>Jadwal pembayaran</u>	<u>Tingkat suku bunga per tahun</u>	<u>Jaminan</u>
PT Sarana Multi Infrastruktur							
14 November 2018	Perusahaan	Rp	1.000	-	Semesteran (2019-2023)	8,35%	Tidak ada

Berdasarkan perjanjian tersebut, Dayamitra diharuskan memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan, diantaranya mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

1. *Debt to equity* tidak lebih dari 2:1.
2. *Net debt* terhadap *EBITDA* tidak kurang dari 4:1.
3. *Debt service coverage* minimal 125%.

Pada tanggal 31 Maret 2019, Dayamitra memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

	31 Maret 2019	31 Desember 2018
Kepentingan nonpengendali atas aset bersih entitas anak:		
Telkomsel	20.187	17.899
GSD	264	212
Metra	192	171
TII	130	111
Dayamitra	37	-
Jumlah	20.810	18.393
	2019	2018
Kepentingan nonpengendali atas laba (rugi) periode berjalan entitas anak:		
Telkomsel	2.287	2.243
Metra	(1)	(6)
TII	1	6
GSD	(7)	1
Dayamitra	0	-
Jumlah	2.280	2.244

Entitas anak dengan kepemilikan nonpengendali yang material

Pada tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018, kepemilikan kepentingan nonpengendali yang dianggap material oleh Perusahaan adalah kepemilikan kepentingan nonpengendali atas Telkomsel sebesar 35% (Catatan 1d).

Ringkasan informasi keuangan Telkomsel dibawah ini disajikan berdasarkan nilai sebelum eliminasi saldo dan transaksi antar perusahaan.

Ringkasan laporan posisi keuangan

	31 Maret 2019	31 Desember 2018
Aset lancar	27.787	16.836
Aset tidak lancar	62.011	65.814
Liabilitas jangka pendek	(22.426)	(20.737)
Liabilitas jangka panjang	(9.690)	(10.767)
Jumlah ekuitas	57.682	51.146
Yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	37.495	33.247
Kepentingan nonpengendali	20.187	17.899

Ringkasan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

	2019	2018
Pendapatan	22.198	21.876
Beban operasi	(13.491)	(13.484)
Pendapatan lain-lain - bersih	(10)	30
Laba sebelum pajak penghasilan	8.697	8.422
Beban pajak penghasilan - bersih	(2.161)	58
Laba periode berjalan dari operasi yang masih berlanjut	6.536	8.480
Penghasilan komprehensif lain - bersih	-	(2.071)
Jumlah laba komprehensif periode berjalan	6.536	6.409
Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali	2.287	2.243
Dividen yang dibayar kepada kepentingan nonpengendali	-	12.334

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. KEPENTINGAN NONPENGENDALI (lanjutan)

Ringkasan laporan arus kas

	2019	2018
Kegiatan operasi	11.415	10.339
Kegiatan investasi	(2.637)	(3.564)
Kegiatan pendanaan	(1.946)	(187)
Penurunan bersih kas dan setara kas	6.832	6.588

18. MODAL SAHAM

Keterangan	31 Maret 2019		
	Jumlah saham	Persentase kepemilikan	Jumlah modal disetor
Saham seri A Dwiwarna			
Pemerintah	1	0	0
Saham seri B			
Pemerintah	51.602.353.559	52,09	2.580
The Bank of New York Mellon Corporation*	5.151.021.480	5,2	258
Komisaris (Catatan 1b):			
Hendri Saparini	654.505	0	0
Rinaldi Firmansyah	454.113	0	0
Direksi (Catatan 1b):			
Alex Janangkih Sinaga	1.683.359	0	0
Herdy Rosadi Harman	1.514.720	0	0
Abdus Somad Arief	1.515.022	0	0
Dian Rachmawan	1.575.562	0	0
Harry Mozarta Zen	689.492	0	0
Siti Choiriana	540	0	0
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	42.300.754.247	42,71	2.115
Jumlah	99.062.216.600	100,00	4.953
Modal saham yang diperoleh kembali (Catatan 20)	-	-	-
Jumlah	99.062.216.600	100,00	4.953

Keterangan	31 Desember 2018		
	Jumlah saham	Persentase kepemilikan	Jumlah modal disetor
Saham seri A Dwiwarna			
Pemerintah	1	0	0
Saham seri B			
Pemerintah	51.602.353.560	52,09	2580
The Bank of New York Mellon Corporation*	4.944.921.880	4,99	247
Komisaris (Catatan 1b):			
Hendri Saparini	654.505	0	0
Rinaldi Firmansyah	454.113	0	0
Direksi (Catatan 1b):			
Alex Janangkih Sinaga	1.683.359	0	0
Herdy Rosadi Harman	1.514.720	0	0
Abdus Somad Arief	1.515.022	0	0
Dian Rachmawan	1.575.562	0	0
Harry Mozarta Zen	689.492	0	0
David Bangun	1.000	0	0
Siti Choiriana	540	0	0
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	42.506.852.846	42,92	2.126
Jumlah	99.062.216.600	100,00	4.953

* The Bank of New York Mellon Corporation bertindak sebagai lembaga penyimpanan untuk saham ADS Perusahaan.

Perusahaan hanya menerbitkan 1 saham Seri A Dwiwarna yang dimiliki oleh Pemerintah dan tidak dapat dialihkan kepada siapapun, dan mempunyai hak veto dalam RUPS Perusahaan berkaitan dengan pengangkatan dan penggantian Dewan Komisaris dan Direksi, penerbitan saham baru, serta perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. TAMBAHAN MODAL DISETOR

	<u>31 Maret 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Hasil penjualan 933.333.000 saham di atas nilai nominal melalui IPO pada tahun 1995	1.446	1.446
Selisih lebih harga penjualan kembali 211.290.500 saham yang diperoleh kembali pada tahap I atas biaya perolehannya (Catatan 20)	544	544
Selisih lebih harga penjualan kembali 215.000.000 saham yang diperoleh kembali pada tahap II atas biaya perolehannya (Catatan 20)	576	576
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	478	478
Selisih lebih harga pengalihan saham yang diperoleh kembali untuk program kepemilikan saham karyawan atas biaya perolehannya (Catatan 20)	228	228
Selisih lebih harga penjualan kembali 22.363.000 sisa saham yang diperoleh kembali pada tahap III atas biaya perolehannya (Catatan 20)	36	36
Selisih lebih harga penjualan kembali 864.000.000 saham yang diperoleh kembali pada tahap IV atas biaya perolehannya (Catatan 20)	1.996	1.996
Kapitalisasi menjadi 746.666.640 saham Seri B pada tahun 1999	(373)	(373)
Pengurangan tambahan modal disetor sebagai akibat penarikan modal saham yang diperoleh kembali (Catatan 20)	(2.454)	(2.454)
Selisih atas akuisisi kepentingan nonpengendali	(22)	(22)
Jumlah bersih	<u>2.455</u>	<u>2.455</u>

Saldo selisih transaksi restrukturisasi dan transaksi lainnya entitas sepengendalian berjumlah Rp478 miliar berasal dari terminasi dini hak eksklusif Perusahaan sebagai penyelenggara layanan sambungan tidak bergerak lokal dan jarak jauh dalam negeri, dimana Perusahaan diwajibkan oleh Pemerintah untuk menggunakan dana kompensasi ini untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Pada tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018, akumulasi pembangunan infrastruktur yang terkait masing-masing sebesar Rp537 miliar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. MODAL SAHAM YANG DIPEROLEH KEMBALI

Tahap	Dasar	Jangka waktu	Maksimum pembelian	
			Lembar	Nilai
I	RUPSLB	21 Desember 20015 - 20 Juni 2007	1.007.999.964	Rp5.250
II	RUPST	29 Juni 2007 - 28 Desember 2008	215.000.000	Rp2.000
III	RUPST	20 Juni 2008 - 20 Desember 2009	339.443.313	Rp3.000
-	BAPEPAM - LK	13 Oktober 2008 - 12 Januari 2009	4.031.999.856	Rp3.000
IV	RUPST	19 Mei 2011 - 20 November 2012	645.161.290	Rp5.000

Berdasarkan keputusan RUPST Perusahaan tanggal 11 Juni 2010, para pemegang saham Perusahaan menyetujui perubahan rencana Perusahaan atas saham yang diperoleh kembali dari hasil pembelian kembali saham tahap I, II, dan III, sebagai berikut: (i) dijual baik di bursa efek maupun di luar bursa efek; (ii) ditarik kembali dengan cara pengurangan modal; (iii) pelaksanaan konversi efek bersifat ekuitas; dan (iv) untuk keperluan pendanaan.

Berdasarkan keputusan RUPST Perusahaan tanggal 19 Mei 2011, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pelaksanaan pembelian kembali modal saham tahap IV.

Pada tahun 2011, Perusahaan melakukan pembelian kembali sejumlah 283.085.460 saham (setara dengan 1.415.427.300 lembar saham setelah pemecahan saham) yang beredar di publik (sebagai bagian dari proses program pembelian kembali saham tahap IV).

Selanjutnya pada tahun 2012, Perusahaan melakukan pembelian kembali sejumlah 237.270.500 saham (setara dengan 1.186.352.500 lembar saham setelah pemecahan saham) yang beredar di publik (sebagai bagian dari proses program pembelian kembali saham tahap IV). Total saham hasil pembelian kembali Tahap IV adalah sebanyak 2.601.779.800 lembar saham.

Berdasarkan keputusan RUPST Perusahaan tanggal 19 April 2013, para pemegang saham Perusahaan menyetujui perubahan rencana Perusahaan atas saham yang diperoleh kembali tahap III untuk digunakan sebagai pelaksanaan program kepemilikan saham karyawan atau Employee Stock Ownership Program ("ESOP") tahun 2013.

Pada tanggal 30 Juli 2013, Perusahaan telah menjual kembali sebanyak 211.290.500 saham yang diperoleh kembali (setara dengan 1.056.452.500 lembar saham setelah pemecahan saham) yang merupakan saham yang diperoleh kembali dari program pembelian kembali saham tahap I yang memiliki nilai wajar keseluruhan Rp2.368 miliar (bersih setelah dikurangi biaya-biaya terkait penjualan saham).

Selisih lebih atas nilai penjualan atas pembelian kembali saham dengan nilai perolehan saham yang dibeli kembali tersebut sebesar Rp544 miliar dicatat sebagai tambahan modal disetor (Catatan 19).

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. MODAL SAHAM YANG DIPEROLEH KEMBALI (lanjutan)

Pada tanggal 13 Juni 2014, Perusahaan telah menjual kembali sebanyak 215.000.000 saham yang diperoleh kembali (setara dengan 1.075.000.000 lembar saham setelah pemecahan saham) yang merupakan saham yang diperoleh kembali dari program pembelian kembali saham tahap II yang memiliki nilai wajar keseluruhan Rp2.541 miliar (bersih setelah dikurangi biaya-biaya terkait penjualan saham). Selisih lebih nilai penjualan atas pembelian kembali saham dengan nilai perolehan saham yang dibeli kembali tersebut sebesar Rp576 miliar dicatat sebagai tambahan modal disetor (Catatan 19).

Pada tanggal 21 Desember 2015, Perusahaan telah menjual kembali sebanyak 4.472.600 saham yang diperoleh kembali (setara dengan 22.363.000 lembar saham setelah pemecahan saham) yang merupakan sisa saham yang diperoleh kembali dari program pembelian kembali saham tahap III yang memiliki nilai wajar keseluruhan Rp68 miliar (bersih setelah dikurangi biaya-biaya terkait penjualan saham). Selisih lebih nilai penjualan atas pembelian kembali saham dengan nilai perolehan saham yang dibeli kembali tersebut sebesar Rp36 miliar dicatat sebagai tambahan modal disetor (Catatan 19).

Perusahaan telah mengalihkan seluruh saham hasil pembelian kembali Tahap I pada tahun 2013, saham hasil pembelian kembali Tahap II pada tahun 2014, dan saham hasil pembelian kembali Tahap III sepenuhnya pada tahun 2015.

Pada tanggal 29 Juni 2016, Perusahaan telah menjual kembali sebanyak 172.800.000 saham yang diperoleh kembali (setara dengan 864.000.000 lembar saham setelah pemecahan saham) yang merupakan saham yang diperoleh kembali sebagian dari program pembelian kembali saham tahap IV yang memiliki nilai wajar keseluruhan Rp3.259 miliar (bersih setelah dikurangi biaya-biaya terkait penjualan saham). Selisih lebih nilai penjualan atas pembelian kembali saham dengan nilai perolehan saham yang dibeli kembali tersebut sebesar Rp1.996 miliar dicatat sebagai tambahan modal disetor (Catatan 19).

Berdasarkan keputusan RUPST tanggal 27 April 2018, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pengalihan modal saham yang diperoleh kembali sejumlah 1.737.779.800 lembar saham dengan biaya perolehan sebesar Rp2.541 miliar melalui pengurangan modal ditempatkan dan disetor penuh dari semula 100.799.966.400 lembar saham menjadi 99.062.216.600 lembar saham (berkurang senilai Rp87 miliar) (Catatan 18).

21. KOMPONEN EKUITAS LAINNYA

	31 Maret 2019	31 Desember 2018
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	647	673
Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas asosiasi	386	386
Laba belum direalisasi atas kepemilikan efek yang tersedia untuk dijual	51	48
Selisih transaksi akuisi kepemilikan kepentingan nonpengendali pada entitas anak	(637)	(637)
Komponen ekuitas lainnya	37	37
Jumlah	484	507

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. PENDAPATAN

	2019	2018
Pendapatan telepon		
Telepon bergerak	6.405	8.145
Telepon tidak bergerak	1.365	1.546
Jumlah pendapatan telepon	7.770	9.691
Pendapatan interkoneksi	1.614	1.173
Pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika		
Internet dan data selular	13.049	10.022
Internet, komunikasi data, dan jasa teknologi informatika	6.527	5.365
<i>Short Messaging Services</i> ("SMS")	1.877	2.564
TV berbayar	490	387
Lain-lain	179	147
Jumlah pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika	22.122	18.485
Pendapatan jaringan	440	331
Pendapatan lainnya		
CPE dan terminal	811	460
Penjualan periferal	433	546
<i>Sewa menara telekomunikasi</i>	266	217
Call center service	168	185
<i>E-payment</i>	148	124
<i>E-health</i>	136	122
Lain-lain	932	1.009
Jumlah pendapatan lainnya	2.894	2.663
Jumlah pendapatan	34.840	32.343

Rincian dari komponen pendapatan neto yang diperoleh Grup dari transaksi keagenan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	2019	2018
Pendapatan bruto	13.561	10.377
Kompensasi kepada penyedia jasa nilai tambah	(512)	(355)
Pendapatan neto	13.049	10.022

Lihat Catatan 31 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. BEBAN KARYAWAN

Rincian dari beban karyawan adalah sebagai berikut:

	2019	2018
Gaji dan tunjangan	1.945	1.885
Cuti, insentif, dan tunjangan lainnya	829	712
Beban pensiun (Catatan 29)	222	283
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala bersih (Catatan 29)	51	89
Beban penghargaan masa kerja (Catatan 30)	38	35
Beban manfaat karyawan lainnya (Catatan 29)	36	21
Beban imbalan pasca kerja lainnya (Catatan 29)	8	8
Lain-lain	3	2
Jumlah	3.132	3.035

Lihat Catatan 31 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

24. BEBAN OPERASI, PEMELIHARAAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI

Rincian dari beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi adalah sebagai berikut:

	2019	2018
Operasi dan pemeliharaan	7.035	6.410
Beban pemakaian frekuensi radio (Catatan 34c.i)	1.376	1.354
Beban hak penyelenggaraan dan Kewajiban Pelayanan Universal	593	535
Sewa sirkit dan CPE	444	509
Beban pokok penjualan <i>handset</i> (Catatan 6)	432	540
Listrik, gas, dan air	261	228
Beban pokok penjualan kartu SIM dan vauzer (Catatan 6)	173	235
Sewa menara	117	121
Sewa kendaraan dan fasilitas pendukung	104	86
Lain-lain	174	226
Jumlah	10.709	10.244

Lihat Catatan 31 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

25. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Rincian dari beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

	2019	2018
Provisi penurunan nilai piutang (Catatan 5d)	496	429
Beban umum	316	323
Perjalanan	96	96
Jasa profesional	96	78
Pelatihan, pendidikan, dan rekrutmen	92	103
Lain-lain	198	221
Jumlah	1.294	1.250

Lihat Catatan 31 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. PERPAJAKAN

a. Tagihan restitusi pajak

	<u>31 Maret 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Perusahaan:		
PPh Badan	494	494
Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")	1.118	1.119
Entitas anak:		
PPh Badan	428	406
PPN	1.075	1.027
Jumlah tagihan restitusi pajak	3.115	3.046
Bagian jangka pendek	(389)	(596)
Bagian jangka panjang (Catatan 10)	2.726	2.450

b. Pajak dibayar di muka

	<u>31 Maret 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Perusahaan:		
PPh 23 - Penyerahan jasa	63	63
PPN	1.190	1.048
Entitas anak:		
PPh Badan	1	14
PPh		
PPh 22 - Pembelian barang	79	-
PPh 23 - Penyerahan jasa	185	1
PPN	2.299	2.765
Jumlah pajak dibayar di muka	3.817	3.891
Bagian jangka pendek	(2.600)	(2.749)
Bagian jangka panjang (Catatan 10)	1.217	1.142

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Utang pajak

	<u>31 Maret 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Perusahaan:		
PPH		
Pasal 4 (2) - Pajak final	21	18
Pasal 21 - PPh pribadi	68	47
Pasal 22 - Pembelian barang	6	3
Pasal 23 - Penyerahan jasa	25	36
Pasal 25 - Angsuran PPh Badan	1	1
Pasal 26 - PPh Wajib Pajak Luar Negeri	2	3
Pasal 29 - PPh Badan	438	-
PPN WAPU	288	334
	<u>849</u>	<u>442</u>
Entitas anak:		
PPH		
Pasal 4 (2) - Pajak final	46	75
Pasal 21 - PPh pribadi	114	113
Pasal 22 - Pembelian barang	2	5
Pasal 23 - Penyerahan jasa	154	110
Pasal 25 - Angsuran PPh Badan	487	14
Pasal 26 - PPh Wajib Pajak Luar Negeri	5	7
Pasal 29 - PPh Badan	1.307	389
PPN	602	25
	<u>2.717</u>	<u>738</u>
Jumlah utang pajak	<u>3.566</u>	<u>1.180</u>

d. Komponen beban (manfaat) pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Kini		
Perusahaan	537	185
Entitas anak	2.312	2.386
	<u>2.849</u>	<u>2.571</u>
Tanggungan		
Perusahaan	(49)	114
Entitas anak	25	(131)
	<u>(24)</u>	<u>(17)</u>
Beban pajak penghasilan bersih	<u>2.825</u>	<u>2.554</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Komponen beban (manfaat) pajak penghasilan adalah sebagai berikut (lanjutan):

Rekonsiliasi antara pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak perusahaan 20% terhadap laba sebelum pajak penghasilan setelah dikurang pendapatan yang dikenakan pajak final dan beban pajak bersih pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	2019	2018
Laba sebelum pajak penghasilan	11.329	10.532
Dikurangi: ditambah pendapatan yang dikenakan pajak final - bersih	(651)	(304)
	<u>10.678</u>	<u>10.228</u>
Pajak dihitung pada tarif Perusahaan 20%	2.136	2.046
Perbedaan pada tarif pajak entitas anak	436	442
Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan	99	18
Pajak penghasilan final	14	24
Lain-lain	140	24
Beban pajak penghasilan bersih	<u>2.825</u>	<u>2.554</u>

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan dengan estimasi laba kena pajak untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	2019	2018
Laba sebelum pajak penghasilan	11.329	10.532
Penambahan kembali eliminasi konsolidasian	6.825	6.243
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan dan eliminasi	18.154	16.775
Dikurangi: laba sebelum pajak penghasilan entitas anak	(11.386)	(10.864)
Laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan	6.768	5.911
Dikurangi: penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(115)	(139)
	<u>6.653</u>	<u>5.772</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Komponen beban (manfaat) pajak penghasilan adalah sebagai berikut (lanjutan):

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan dengan estimasi laba kena pajak untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut (lanjutan):

	2019	2018
Perbedaan temporer:		
Provisi penurunan nilai piutang usaha dan penghapusbukuan piutang	350	(120)
Pendapatan instalasi tanggungan	27	30
Beban pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya berkala bersih	(9)	65
Sewa pembiayaan	(9)	(5)
Penyisihan beban karyawan	(27)	224
Penyusutan dan laba atas penjualan aset tetap	(50)	16
Penyisihan lain-lain	214	(12)
Jumlah perbedaan temporer bersih	496	198
Perbedaan tetap:		
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala - bersih	51	88
Imbalan karyawan	41	51
Sumbangan	20	50
Keuntungan pengalihan bisnis ke entitas sepengendali	(4.668)	(4.504)
Lain-lain	20	33
Jumlah perbedaan tetap bersih	(4.536)	(4.282)
Kompensasi rugi fiskal	-	(861)
Laba (rugi) kena pajak	2.613	827
Beban pajak kini	523	166
Beban pajak final	14	19
Jumlah beban pajak kini - Perusahaan	537	185
Beban pajak kini - entitas anak	2.312	2.386
Jumlah beban pajak penghasilan kini	2.849	2.571

Undang-Undang Pajak No. 36 tahun 2008 menerapkan peraturan dibawah Peraturan Pemerintah ("PP") No. 56/2015 mengenai pemberian pengurangan tarif pajak sebesar 5% dari tarif pajak tertinggi kepada perusahaan yang sahamnya tercatat dan diperdagangkan di BEI dengan jumlah paling sedikit 40% dari jumlah seluruh saham yang disetor perusahaan dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 pemegang saham, dimana kepemilikan masing-masing tidak boleh melebihi 5%. Ketentuan tersebut harus dipenuhi oleh perusahaan yang mencatatkan sahamnya di bursa dalam waktu paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu satu tahun fiskal. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Perusahaan memenuhi seluruh kriteria yang dipersyaratkan, maka Perusahaan menurunkan tarif pajak sebesar 5% dalam perhitungan beban dan liabilitas pajak penghasilan badan Perusahaan.

Perusahaan menerapkan tarif pajak sebesar 20% untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan 2018. Entitas anak menerapkan tarif pajak sebesar 25% untuk untuk periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2019 dan 2018.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak

(i) Perusahaan

Pada tanggal 15 November 2013, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") untuk PPN masa pajak Januari sampai dengan September dan November 2007 senilai Rp142 miliar. Pada tanggal 20 Januari 2014, Perusahaan mengajukan keberatan dan di bulan Desember 2014, Otoritas Pajak menerbitkan keputusan penolakan keberatan. Perusahaan menerima hasil pemeriksaan kurang bayar PPN senilai Rp22 miliar (termasuk denda Rp10 miliar) dan telah dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2014. Sedangkan atas PPN Interkoneksi senilai Rp120 miliar (termasuk denda Rp39 miliar) dicatat sebagai tagihan restitusi pajak dan pada tanggal 12 Maret 2015, Perusahaan telah mengajukan banding.

Pada tanggal 1 dan 2 Agustus 2017, Pengadilan Pajak menerbitkan putusan atas proses banding PPN Interkoneksi tersebut, dimana dalam putusannya dinyatakan bahwa Interkoneksi *International Incoming Call* adalah penyerahan jasa kena pajak di luar daerah pabean sehingga masuk kategori ekspor jasa kena pajak dan terutang PPN sebesar 0% dan mengabulkan seluruh permohonan banding Perusahaan. Pada bulan September 2017, Perusahaan menerima restitusi senilai Rp115 miliar dan saldo tersisa senilai Rp5 miliar telah dikompensasikan sebagai pembayaran Surat Tagihan Pajak ("STP") untuk PPh 21 dan SKPKB untuk PPN WAPU dan PPN Jasa Luar Negeri.

Pada tanggal 26 Oktober 2017 dan 23 November 2017, Perusahaan menerima pemberitahuan dari Pengadilan Pajak bahwa Otoritas Pajak mengajukan memori peninjauan kembali. Sebagai tanggapan atas putusan memori peninjauan kembali, pada tanggal 23 November 2017 dan 21 Desember 2017, Perusahaan telah mengirimkan kontra memori peninjauan kembali atas perkara PPN Interkoneksi ini. Pada bulan September dan November 2018, Perusahaan menerima putusan Mahkamah Agung atas sengketa pajak masa Juni s.d. Agustus dan November 2007 dengan putusan menolak permohonan peninjauan kembali Otoritas Pajak dan memperkuat putusan pengadilan pajak. Pada bulan Januari, Februari dan Maret 2019, Perusahaan menerima keputusan dari Mahkamah Agung sebagai hasil dari pemeriksaan pajak untuk masa pajak Januari s.d. April dan September 2007. Berdasarkan keputusan, Mahkamah Agung menolak banding Otoritas Pajak dan menguatkan keputusan Pengadilan Pajak. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, peninjauan kembali untuk masa pajak Mei 2007 masih dalam proses.

Pada bulan November 2014, Perusahaan menerima SKPKB dari Otoritas Pajak untuk tahun fiskal 2011. Berdasarkan surat tersebut, Perusahaan menerima ketetapan kurang bayar PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011 senilai Rp182,5 miliar (termasuk denda Rp60 miliar) dan ketetapan kurang bayar pajak penghasilan badan senilai Rp2,8 miliar (termasuk denda Rp929 juta). Bagian yang telah diterima senilai Rp4,7 miliar (termasuk denda sebesar Rp2 miliar) telah dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2014. Sedangkan atas PPN Interkoneksi senilai Rp178 miliar (termasuk denda Rp58 miliar) dicatat sebagai tagihan restitusi pajak dan pada tanggal 7 Januari 2015, Perusahaan telah mengajukan keberatan. Atas keberatan tersebut, pada tanggal 20 Oktober 2015, Otoritas Pajak telah menerbitkan putusan penolakan keberatan. Sebagai tanggapan atas putusan keberatan tersebut, pada tanggal 20 Januari 2016, Perusahaan mengajukan banding.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

(i) Perusahaan (lanjutan)

Pada tanggal 4 dan 5 April 2017, Pengadilan Pajak menerbitkan putusan atas banding tersebut, dan dalam putusannya, dinyatakan bahwa Interkoneksi *International Incoming Call* adalah penyerahan jasa kena pajak di luar daerah pabean sehingga termasuk sebagai kategori ekspor jasa kena pajak dan terutang PPN sebesar 0% dan mengabulkan seluruh permohonan Perusahaan untuk masa pajak Januari dan September s.d. Desember 2011. Sedangkan untuk masa pajak Februari s.d. Agustus 2011 tidak dapat diterima karena dianggap tidak memenuhi ketentuan formal, untuk itu pada tanggal 19 dan 21 Juni 2017, Perusahaan mengajukan memori peninjauan kembali. Pada tanggal 15 Oktober 2018, Perusahaan menerima pemberitahuan dari Pengadilan Pajak bahwa Otoritas Pajak mengajukan memori peninjauan kembali untuk masa pajak Januari dan September s.d. Desember 2011. Pada tanggal 13 November 2018, Perusahaan mengirimkan kontra memori peninjauan kembali untuk masa pajak Januari dan September s.d. Desember 2011 kepada Mahkamah Agung. Pada bulan November 2018, Perusahaan menerima pemberitahuan dari Pengadilan Pajak bahwa Otoritas Pajak mengajukan kontra memori peninjauan kembali untuk masa pajak Februari s.d. Agustus 2011. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, proses peninjauan kembali masih dalam proses.

Pada tanggal 3 Mei 2016, Otoritas Pajak menerbitkan surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan masa pajak Januari s.d. Desember 2012, dan atas pemeriksaan tersebut telah menerbitkan SKPKB PPh Badan senilai Rp991,6 miliar (termasuk denda Rp321,6 miliar), SKPKB PPN senilai Rp467 miliar (termasuk denda Rp153,5 miliar), SKPKB PPh atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak ("JKP") dari Luar Daerah Pabean senilai Rp1,2 miliar (termasuk denda Rp392 juta), SKPKB PPh atas Pemungutan Pajak senilai Rp57 miliar (termasuk denda Rp18,5 miliar), tagihan pajak PPN senilai Rp37,5 miliar, SKPKB PPh pasal 21 senilai Rp16,2 miliar (termasuk denda Rp5,3 miliar), SKPKB PPh Final pasal 21 senilai Rp1,2 miliar (termasuk denda Rp407 juta), SKPKB PPh pasal 23 senilai Rp63,5 miliar (termasuk denda Rp20,6 miliar), SKPKB PPh pasal 4 (2) senilai Rp25 miliar (termasuk denda Rp8,1 miliar) dan SKPKB PPh pasal 26 senilai Rp197,6 miliar (termasuk denda Rp64 miliar). Perusahaan telah menyetujui senilai Rp35 miliar terkait Perhitungan Kembali Pengkreditan Pajak Masukan atas Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi *International Incoming Call*, Rp613 juta atas Pajak Penghasilan, dan Rp311,5 juta atas PPh pasal 26 dan telah diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2016. Atas bagian lainnya, pada tanggal 16 November 2016, Perusahaan telah mengajukan keberatan.

Pada tanggal 1 Maret 2017 dan 9 Mei 2017, Perusahaan menerima Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak ("DJP") atas kurang bayar PPN Jasa Luar Negeri senilai Rp1,8 juta (termasuk denda Rp 0,6 juta) dan kurang bayar PPN atas pemungutan pajak senilai Rp4,4 miliar (termasuk denda Rp1,4 miliar). Atas keputusan keberatan tersebut, Perusahaan memutuskan untuk menerima keputusan tersebut.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

(i) Perusahaan (lanjutan)

Pada tanggal 19 Oktober 2017, Otoritas Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan untuk Pajak penghasilan dan PPh Badan dengan rincian kurang bayar Pajak PPh Pasal 21 senilai Rp20,7 miliar (termasuk denda Rp6,7 miliar), kurang bayar PPh Pasal 21 Final senilai Rp23,8 miliar (termasuk denda Rp7,7 miliar), kurang bayar PPh Pasal 23 senilai Rp115,7 miliar (termasuk denda Rp37,5 miliar), kurang bayar PPh Pasal 4(2) senilai Rp25 miliar (termasuk denda Rp8,1 miliar), kurang bayar PPh Pasal 26 senilai Rp197,6 miliar (termasuk denda Rp64,1 miliar) dan kurang bayar PPh Badan senilai Rp496,4 miliar (termasuk denda Rp161 miliar). Pada tanggal 30 dan 31 Oktober 2017, Otoritas Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan untuk PPN Masa Januari s.d. Desember 2012 dengan total Rp429,3 miliar (termasuk denda Rp141,2 miliar). Atas keputusan keberatan tersebut, pada tanggal 17 dan 26 Januari 2018, Perusahaan mengajukan banding. Sampai dengan penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, proses banding masih dalam proses.

Pada tanggal 23 Agustus 2016, Otoritas Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan masa pajak Januari s.d. Desember 2015 atas lebih bayar pajak PPh Badan senilai Rp414 miliar. Pada tanggal 25 April 2017, Otoritas Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") PPh Badan senilai Rp147 miliar, SKPKB PPN Dalam Negeri senilai Rp13 miliar (termasuk denda Rp4 miliar), SKPKB PPN atas Pemungutan Pajak senilai Rp6 miliar (termasuk denda Rp1,5 miliar), dan SKPKB PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean senilai Rp55 miliar (termasuk denda Rp17 miliar). Perusahaan menerima STP atas PPN Dalam Negeri senilai Rp34 miliar, PPN atas Pemungutan Pajak senilai Rp7 miliar dan PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean senilai Rp8 miliar.

Perusahaan setuju untuk menerima putusan pemeriksaan senilai Rp17 miliar atas PPh Badan, mengalihkan perhitungan pajak atas realisasi ganti rugi migrasi Flexi senilai Rp42 miliar yang sebelumnya dilaporkan pada SPT PPh Badan tahun 2015 ke SPT PPh Badan tahun 2016. Perusahaan juga menerima ketetapan kurang bayar PPN, kurang bayar PPN atas Pemungutan Pajak, serta STP PPN senilai Rp26 miliar. Bagian yang telah diterima telah dibebankan pada laporan laba rugi dan komprehensif lain konsolidasian tahun 2017.

Pada tanggal 24 Juli 2017, Perusahaan mengajukan Surat Keberatan kepada Otoritas Pajak untuk SKPLB PPh Badan dengan keberatan senilai Rp210,5 miliar dan PPN atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean senilai Rp55 miliar. Pada tanggal 3 dan 22 Mei 2018, Otoritas Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan atas SKPLB PPN atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean yang mengurangi jumlah pajak yang masih harus dibayar senilai Rp54 miliar dan mengabulkan seluruh keberatan yang diajukan Perusahaan. Pada tanggal 18 Juli 2018, Otoritas Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan atas SKPLB PPh Badan yang menambah jumlah pajak yang masih harus diterima senilai Rp76 miliar. Atas keputusan keberatan tersebut, pada tanggal 10 Oktober 2018, Perusahaan mengajukan banding. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, proses banding masih dalam proses.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

(i) Perusahaan (lanjutan)

Pada tanggal 25 Agustus 2017, Otoritas Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan masa pajak Januari s.d. Desember 2016 atas lebih bayar PPh Badan senilai Rp114,4 miliar. Pada tanggal 7 Juni 2018, Otoritas Pajak menerbitkan SKPLB PPh Badan senilai Rp15,3 miliar, SKPKB PPh 26 senilai Rp557 juta (termasuk denda Rp180 juta) dan SKPLB PPN senilai Rp923 miliar. Perusahaan setuju untuk menerima putusan pemeriksa atas PPh Badan senilai Rp15,3 miliar dan saldo tersisa senilai Rp99,1 miliar telah dibebankan sebagai pajak kini atas pemeriksaan pajak, PPh 26, kredit pajak PPN senilai Rp10,5 miliar, STP PPN Pemungutan oleh Pemungut senilai Rp7,1 miliar, PPN atas pemberian cuma-cuma senilai Rp7,3 miliar, PPN atas pengalihan aset senilai Rp1,2 miliar dan STP PPN senilai Rp1,7 miliar. Bagian yang telah diterima telah dibebankan pada laporan laba rugi dan komprehensif lain konsolidasian. Pada bulan Juli 2018, Perusahaan menerima restitusi pajak senilai Rp882,7 miliar dan untuk sisa saldo sebesar Rp39,9 miliar telah dikompensasikan ke STP PPN senilai Rp31,9 miliar, PPN atas Pemungut Pajak senilai Rp7,1 miliar, PPh 23 senilai Rp556 juta dan PPh 21 senilai Rp300 juta. Atas surat ketetapan tersebut, pada tanggal 31 Agustus 2018, Perusahaan mengajukan keberatan atas pengenaan PPN terkait Interkoneksi *International Incoming Call* senilai Rp151 miliar dan STP PPN senilai Rp30,3 miliar. Pada tanggal 11 Maret 2019, Otoritas Pajak menerbitkan surat keputusan atas keberatan Perusahaan, di mana Otoritas Pajak mengabulkan semua keberatan Perusahaan dan penambahan jumlah kelebihan bayar untuk masa pajak Januari s.d. April 2016.

Pada tanggal 11 September 2017 dan 9 Januari 2018, Otoritas Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan masa Pajak Desember dan November 2014 untuk klaim restitusi Lebih Bayar Pembetulan SPT PPN masa pajak Desember dan November 2014, masing-masing senilai Rp129 miliar dan Rp86,7 miliar. Pada tanggal 25 Juli dan 7 September 2018, Otoritas Pajak menerbitkan SKPLB untuk masa pajak Desember dan November 2014. Pada tanggal 24 Agustus 2018, Perusahaan menerima restitusi senilai Rp122,5 miliar untuk masa pajak Desember 2014. Pada bulan Oktober 2018, Perusahaan menerima restitusi senilai Rp80,8 miliar dan Rp3,6 miliar yang telah dikompensasikan sebagai pembayaran SKPKB PPN atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean masa pajak Maret, April dan Juni 2015, STP PPN masa November 2014 dan surat ketetapan pajak lainnya.

Pada tanggal 6 November 2018, Otoritas Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan untuk seluruh jenis pajak tahun pajak 2017. Sampai dengan penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, proses pemeriksaan masih dalam proses.

(ii) Telkomsel

Pada bulan Desember 2013, Pengadilan Pajak telah menerima banding Telkomsel atas PPN dan *withholding tax* tahun 2006 dengan total Rp116 miliar. Pada bulan Februari 2014, Telkomsel menerima pengembalian pajak. Pada tanggal 3 Juli 2015, dalam hal menanggapi surat Telkomsel untuk klaim pendapatan bunga atas putusan PPN dan Pemotongan Pajak yang menguntungkan tahun 2006, Otoritas pajak menginformasikan bahwa klaim tersebut tidak bisa dijamin sampai Otoritas Pajak mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung. Pada tanggal 19 Agustus 2016, Telkomsel menerima pemberitahuan dari Pengadilan Pajak bahwa Otoritas Pajak mengajukan uji materi peninjauan kembali ke Mahkamah Agung atas PPN sebesar Rp108 miliar. Kontra memorandum untuk pengujian uji materi telah dikirim pada tanggal 14 September 2016. Pada bulan April 2017, Otoritas Pajak telah menjamin klaim Telkomsel atas pendapatan bunga yang akan dikompensasikan ke pembayaran cicilan PPh Badan untuk periode April 2017. Pada bulan Juli 2018, Telkomsel menerima keputusan resmi dari Mahkamah Agung yang menolak permintaan Otoritas Pajak.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

(ii) Telkomsel (lanjutan)

Pada tanggal 21 April 2010, Otoritas Pajak mengajukan uji materi kepada Mahkamah Agung terkait keputusan Pengadilan Pajak yang menerima permintaan Telkomsel untuk membatalkan STP atas kurang bayar PPh pasal 25 untuk bulan Desember 2008 sebesar Rp429 miliar (termasuk denda sebesar Rp8,4 miliar). Pada bulan Mei 2010, Telkomsel mengajukan kontra memori kepada Mahkamah Agung. Pada tanggal 2 Maret 2017, Telkomsel menerima surat keputusan tersebut dari Mahkamah Agung dan telah dibayarkan ke kas negara di bulan Juni 2017.

Pada bulan Mei dan Juni 2012, Telkomsel menerima pengembalian denda atas kurang bayar PPh pasal 25 untuk tahun 2010 senilai Rp15,7 miliar berdasarkan keputusan Pengadilan Pajak. Pada tanggal 17 Juli 2012, Otoritas Pajak mengajukan memori peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Pada tanggal 14 September 2012, Telkomsel mengajukan kontra memori peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Pada bulan Juli 2016, Telkomsel mengakui denda pajak senilai Rp15,7 miliar.

Pada tanggal 24 Mei 2012, Telkomsel mengajukan keberatan kepada Otoritas Pajak atas kurang bayar PPN sebesar Rp290,6 miliar (termasuk denda Rp67 miliar) untuk tahun 2010 dan dicatat sebagai tagihan restitusi pajak. Pada tanggal 9 Mei 2017, Telkomsel menerima keputusan dari Mahkamah Agung yang menolak banding Telkomsel, sehingga atas kurang bayar PPN tersebut telah dilakukan pembayaran pada tanggal 10 Juli 2017. Pada tanggal 19 Juli 2017, Telkomsel mengajukan peninjauan kembali tahap kedua atas keputusan Mahkamah Agung. Pada tanggal 8 Agustus 2018, Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan banding Telkomsel. Pada tanggal 18 Februari 2019, Telkomsel menerima SP2PK dari Kantor Pajak terkait PPN tahun fiskal 2010 senilai Rp290 miliar. Pada tanggal 25 Maret 2019, Telkomsel menerima pembayaran SP2PK dari Kantor Pajak terkait PPN tahun fiskal 2010 senilai Rp290 miliar.

Di bulan Juli dan Oktober 2017, Telkomsel menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung bahwa Otoritas Pajak mengajukan memori peninjauan kembali atas kurang bayar PPh Badan dan PPN masing-masing senilai Rp62 miliar dan Rp1,2 miliar. Atas hal ini, Telkomsel mengajukan kontra memori peninjauan kembali di bulan Agustus dan November 2017. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Telkomsel telah menerima keputusan resmi dari Mahkamah Agung secara parsial, dimana Mahkamah Agung menolak permintaan Otoritas Pajak berkaitan dengan PPN senilai Rp1,1 miliar.

Pada tanggal 28 Juli 2016 dan 24 Maret 2017, Telkomsel telah menerima surat perintah untuk dilakukan pemeriksaan pajak masing-masing untuk tahun fiskal 2014 dan 2015. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, pemeriksaan pajak masih dalam proses.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Aset dan liabilitas pajak tangguhan

Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan Grup adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2018	(Dibebankan) dikreditkan ke laporan laba rugi konsolidasian	Dikreditkan ke laporan komprehensif lain konsolidasian	(Dibebankan) ke ekuitas dan reklasifikasi	31 Maret 2019
Perusahaan					
Aset pajak tangguhan:					
Beban pensiun dan beban imbalan pasca kerja lainnya berkala bersih	663	(2)	-	-	661
Provisi penurunan nilai piutang	632	70	-	-	702
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	420	(60)	-	-	360
Provisi imbalan karyawan	215	15	-	-	230
Pendapatan instalasi tangguhan	92	5	-	-	97
Beban yang masih harus dibayar dan provisi persediaan usang	79	18	-	-	97
Hak atas tanah, aset takberwujud, dan lainnya	9	5	-	-	14
Jumlah aset pajak tangguhan	<u>2.110</u>	<u>51</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.161</u>
Liabilitas pajak tangguhan:					
Sewa pembiayaan	(1)	(2)	-	-	(3)
Penilaian investasi jangka panjang	(11)	-	-	-	(11)
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	<u>(12)</u>	<u>(2)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(14)</u>
Jumlah aset pajak tangguhan					
Perusahaan - bersih	<u>2.098</u>	<u>49</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.147</u>
Aset pajak tangguhan					
entitas anak lainnya - bersih	<u>406</u>	<u>6</u>	<u>-</u>	<u>(1)</u>	<u>411</u>
Telkomsel					
Aset pajak tangguhan:					
Provisi imbalan karyawan	641	28	-	-	669
Provisi penurunan nilai piutang	270	32	-	-	302
Jumlah aset pajak tangguhan	<u>911</u>	<u>60</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>971</u>
Liabilitas pajak tangguhan:					
Sewa pembiayaan	(896)	(49)	-	-	(945)
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	(616)	(43)	-	-	(659)
Aset takberwujud	(118)	(6)	-	-	(124)
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	<u>(1.630)</u>	<u>(98)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(1.728)</u>
Liabilitas pajak tangguhan					
Telkomsel - bersih	<u>(719)</u>	<u>(38)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(757)</u>
Liabilitas pajak tangguhan					
entitas anak lainnya - bersih	<u>(533)</u>	<u>7</u>	<u>-</u>	<u>(9)</u>	<u>(535)</u>
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	<u>(1.252)</u>	<u>(31)</u>	<u>-</u>	<u>(9)</u>	<u>(1.292)</u>
Aset pajak tangguhan - bersih	<u>2.504</u>	<u>55</u>	<u>-</u>	<u>(1)</u>	<u>2.558</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Aset dan liabilitas pajak tangguhan (lanjutan)

	31 Desember 2017	(Dibebankan) dikreditkan ke laporan laba rugi konsolidasian	Dikreditkan ke laporan komprehensif lain konsolidasian	(Dibebankan) ke ekuitas dan reklasifikasi	31 Desember 2018
Perusahaan					
Aset pajak tangguhan:					
Beban pensiun dan beban imbalan pasca kerja lainnya berkala bersih	1.102	27	(466)	-	663
Provisi penurunan nilai piutang	594	38	-	-	632
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	240	180	-	-	420
Provisi imbalan karyawan	247	(32)	-	-	215
Pendapatan instalasi tangguhan	74	18	-	-	92
Beban yang masih harus dibayar dan provisi persediaan usang	43	36	-	-	79
Hak atas tanah, aset takberwujud, dan lainnya	(1)	10	-	-	9
Rugi fiskal	172	(172)	-	-	-
Jumlah aset pajak tangguhan	<u>2.471</u>	<u>105</u>	<u>(466)</u>	<u>-</u>	<u>2.110</u>
Liabilitas pajak tangguhan:					
Sewa pembiayaan	1	(2)	-	-	(1)
Penilaian investasi jangka panjang	(11)	-	-	-	(11)
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	<u>(10)</u>	<u>(2)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(12)</u>
Jumlah aset pajak tangguhan	<u>2.461</u>	<u>103</u>	<u>(466)</u>	<u>-</u>	<u>2.098</u>
Perusahaan - bersih	<u>343</u>	<u>76</u>	<u>(8)</u>	<u>(5)</u>	<u>406</u>
Aset pajak tangguhan					
entitas anak lainnya - bersih					
Telkomsel					
Aset pajak tangguhan:					
Provisi imbalan karyawan	677	83	(119)	-	641
Provisi penurunan nilai piutang	184	86	-	-	270
Jumlah aset pajak tangguhan	<u>861</u>	<u>169</u>	<u>(119)</u>	<u>-</u>	<u>911</u>
Liabilitas pajak tangguhan:					
Sewa pembiayaan	(561)	(335)	-	-	(896)
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	(552)	(64)	-	-	(616)
Aset takberwujud	(225)	107	-	-	(118)
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	<u>(1.338)</u>	<u>(292)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(1.630)</u>
Liabilitas pajak tangguhan	<u>(477)</u>	<u>(123)</u>	<u>(119)</u>	<u>-</u>	<u>(719)</u>
Liabilitas pajak tangguhan	<u>(456)</u>	<u>(50)</u>	<u>(5)</u>	<u>(22)</u>	<u>(533)</u>
entitas anak lainnya - bersih	<u>(933)</u>	<u>(173)</u>	<u>(124)</u>	<u>(22)</u>	<u>(1.252)</u>
Aset pajak tangguhan - bersih	<u>2.804</u>	<u>179</u>	<u>(474)</u>	<u>(5)</u>	<u>2.504</u>

Pada tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018, jumlah agregat perbedaan temporer yang terkait dengan investasi pada entitas anak dan entitas asosiasi atas liabilitas pajak tangguhan yang belum diakui adalah masing-masing sebesar Rp35.819 miliar dan Rp31.063 miliar.

Realisasi dari aset pajak tangguhan tergantung kepada kemampuan Grup dalam menghasilkan laba fiskal di masa depan. Meskipun tidak ada jaminan atas realisasi tersebut, Grup yakin bahwa kemungkinan besar aset pajak tangguhan tersebut akan terealisasi melalui pengurangan atas laba fiskal masa depan ketika perbedaan temporer terpulihkan. Jumlah aset pajak tangguhan tersebut diperkirakan dapat direalisasi, namun bisa berkurang jika laba fiskal di masa depan lebih kecil dari pada yang diestimasikan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Administrasi

Sejak tahun 2008 s.d. 2018, secara berturut-turut Perusahaan berhak memperoleh insentif pengurangan tarif pajak sebesar 5% karena telah memenuhi persyaratan sesuai dengan PP No. 81 tahun 2007 sebagaimana telah diubah PP No. 77 tahun 2013 dan diubah terakhir dengan PP No. 56 tahun 2015, serta PMK No. 238/PMK.03/2008. Berdasarkan hal tersebut untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan menghitung pajak tangguhannya dengan menggunakan tarif 20%.

Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa Perusahaan dan entitas anaknya dalam negeri menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang secara individu. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Otoritas Pajak dapat menetapkan atau mengubah jumlah pajak terutang dalam jangka waktu tertentu. Untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya, jangka waktu tersebut adalah sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak tetapi tidak lebih dari tahun 2013, sedangkan untuk tahun pajak 2008 dan seterusnya, jangka waktunya adalah lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

Menteri Keuangan Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan No. 85/PMK.03/2012 tanggal 6 Juni 2012 sebagaimana telah diubah oleh PMK No. 136/PMK.03/2012 tanggal 16 Agustus 2012 tentang penunjukan BUMN untuk memungut, menyeter, dan melaporkan PPN atau PPh dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ("PPnBM") yang berlaku efektif pada 1 Juli 2012 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 224/PMK.011/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang penunjukan kembali BUMN sebagai pemungut PPh Pasal 22 sebagaimana telah diubah terakhir oleh PMK No.16/PMK.010/2016 tanggal 3 Februari 2016. Perusahaan telah melakukan pemungutan, penyeteroran dan pelaporan PPN dan PPnBM serta PPh 22 sesuai dengan peraturan tersebut.

27. LABA PER SAHAM DASAR

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp6.224 miliar dan Rp5.734 miliar dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar sejumlah 99.062.216.600 untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan 2018. Jumlah rata-rata tertimbang juga memperhitungkan rata-rata tertimbang atas dampak transaksi modal saham yang diperoleh kembali dalam perubahan transaksi pembelian saham kembali selama tahun berjalan.

Laba per saham dasar masing-masing sejumlah Rp62,83 dan Rp57,88 (dalam jumlah penuh) untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan 2018.

Perusahaan tidak memiliki instrumen keuangan yang berpotensi dilutif untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan 2018.

28. DIVIDEN KAS DAN CADANGAN UMUM

Berdasarkan hasil RUPST Perusahaan yang dinyatakan dalam akta notaris Ashoya Ratam, S.H., MKn. No. 54 tertanggal 27 April 2018, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen kas dan spesial dividen kas untuk tahun buku 2017 masing-masing sebesar Rp13.287 miliar (Rp134,13 per lembar saham) dan Rp3.322 miliar (Rp33,53 per lembar saham).

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. DIVIDEN KAS DAN CADANGAN UMUM (lanjutan)

Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perusahaan diharuskan untuk membuat penyisihan cadangan wajib hingga sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh.

Saldo laba dicadangkan Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp15.337 miliar.

29. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA

Rincian liabilitas manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya adalah sebagai berikut

	<u>Catatan</u>	<u>31 Maret 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya			
Pensiun			
Perusahaan - <i>funded</i>	29a.i.a		
Manfaat pasti	29a.i.a.i	1.159	1.057
Manfaat tambahan	29a.i.a.ii	6	6
Perusahaan - <i>unfunded</i>	29a.i.b	1.733	1.830
Telkomsel	29a.ii	1.621	1.541
Telkomsat		0	0
MD Media		0	0
Infomedia		-	-
Sub-jumlah manfaat pensiun		4.519	4.434
Imbalan kesehatan pasca kerja	29b	246	195
Imbalan pasca kerja lainnya	29c	405	419
Kewajiban pensiun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan	29d	535	507
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya		5.705	5.555

Beban manfaat yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

	<u>Catatan</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Beban pensiun			
Perusahaan - <i>funded</i>	29a.i.a		
Manfaat pasti	29a.i.a.i	102	129
Manfaat tambahan	29a.i.a.ii	-	17
Perusahaan - <i>unfunded</i>	29a.i.b	40	50
Telkomsel	29a.ii	81	87
MD Media		-	-
Infomedia		-	-
Telkomsat		-	-
Jumlah beban pensiun	23	223	283
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala bersih	23,29b	50	89
Beban imbalan pasca kerja lainnya	23,29c	8	8
Beban pensiun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan	23,29d	36	21
Jumlah		317	401

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun

i. Perusahaan

a. *Funded*

i. Manfaat pasti

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti bagi karyawan tetap yang mulai bekerja sebelum 1 Juli 2002. Manfaat pensiun yang dibayar dihitung berdasarkan gaji pokok pada saat mulai pensiun dan masa kerja karyawan. Program pensiun ini diatur didalam undang-undang pensiun Indonesia dan dikelola oleh Dana Pensiun Telkom ("Dapen"). Karyawan yang ikut serta dalam program pensiun ini membayar kontribusi 18% (sebelum Maret 2003: 8,4%) dari gaji pokok ke dana pensiun. Perusahaan tidak memberikan kontribusi ke dana pensiun untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Tabel berikut ini menyajikan perubahan liabilitas manfaat pensiun, perubahan aset program pensiun, status pendanaan program pensiun dan jumlah bersih yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018 untuk program pensiun manfaat pasti:

i. Manfaat pasti (lanjutan)

	31 Maret 2019	31 Desember 2018
Perubahan liabilitas manfaat pensiun		
Liabilitas manfaat pensiun pada awal tahun	20.121	22.354
Dibebankan pada laba rugi:		
Beban jasa	65	384
Beban jasa lalu - perubahan program	-	-
Beban bunga	400	1.459
Kontribusi peserta program pensiun	9	38
(Laba) rugi aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	478	(2.691)
Pembayaran pensiun	(366)	(1.423)
Liabilitas manfaat pensiun pada akhir periode	20.707	20.121
Perubahan aset program pensiun		
Nilai wajar aset program pensiun pada awal tahun	19.064	20.814
Pendapatan bunga	381	1.357
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	478	(1.455)
Kontribusi peserta program pensiun	9	38
Pembayaran pensiun	(366)	(1.423)
Penyisihan manfaat tambahan	-	(205)
Beban administrasi program	(18)	(62)
Nilai wajar aset program pensiun pada akhir periode	19.548	19.064
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada akhir periode	1.159	1.057

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

ii. Perusahaan (lanjutan)

a. *Funded* (lanjutan)

i. Manfaat pasti (lanjutan)

Pada tanggal 31 Maret 2018 dan 31 Desember 2018, aset program terdiri dari:

	31 Maret 2019		31 Desember 2018	
	Harga kuotasian di pasar aktif	Tidak memiliki harga kuotasian	Harga kuotasian di pasar aktif	Tidak memiliki harga kuotasian
Kas dan setara kas	1.471	-	873	-
Instrumen ekuitas:				
Keuangan	1.594	-	1.456	-
Barang konsumen	1.293	-	1.336	-
Infrastruktur, peralatan dan transportasi	517	-	530	-
Konstruksi, properti dan real estat	223	-	199	-
Industri dasar dan bahan kimia	113	-	124	-
Perdagangan, jasa dan investasi	459	-	420	-
Tambang	134	-	112	-
Agrikultur	51	-	55	-
Industri lainnya	324	-	362	-
Reksadana berbasis saham	1.125	-	1.336	-
Instrumen keuangan pendapatan tetap:				
Obligasi korporasi	-	5.286	-	5.267
Obligasi pemerintah	6.095	-	6.166	-
Reksadana	54	-	54	-
Saham non publik:				
Penempatan langsung	-	298	-	288
Properti	-	176	-	178
Lainnya	-	335	-	309
Jumlah	13.453	6.095	13.023	6.042

Aset program pensiun termasuk didalamnya saham Seri B yang dikeluarkan oleh Perusahaan dengan nilai wajar Rp312 miliar dan Rp372 miliar, yang mewakili 1.60% dan 1.95% dari total aset program pada tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018, dan obligasi yang dikeluarkan oleh Perusahaan dengan nilai wajar masing-masing senilai Rp325 miliar dan Rp314 miliar mewakili masing-masing 1,66% dan 1,65% dari total aset per tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018.

Perkiraan pengembalian ditentukan berdasarkan ekspektasi pasar untuk pengembalian keseluruhan masa liabilitas dengan mempertimbangkan perpaduan portofolio dari aset program. Hasil aktual aset program adalah Rp842 miliar dan Rp(158) miliar masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Berdasarkan Peraturan Perusahaan yang diterbitkan tanggal 14 Januari 2014 mengenai kebijakan pendanaan Dapen, Perusahaan tidak akan memberikan kontribusi ke Dapen bila Rasio Kecukupan Pendanaan (RKD) Dapen diatas 105%. Berdasarkan laporan keuangan Dapen pada tanggal 31 Maret 2019, RKD Dapen diatas 105% sehingga, Perusahaan tidak akan memberikan kontribusi pemberi kerja ke program pensiun manfaat pasti di tahun 2019.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

iii. Perusahaan (lanjutan)

a. *Funded* (lanjutan)

i. Manfaat pasti (lanjutan)

Berdasarkan Peraturan Perusahaan yang diterbitkan tanggal 7 Juni 2017 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dapen, Perusahaan memberikan manfaat lain berupa manfaat tambahan di tahun 2017 sebesar Rp4,5 juta kepada penerima manfaat pensiun bulanan dari peserta yang berhenti bekerja sebelum akhir bulan Juni 2002 dan Rp2,25 juta kepada penerima manfaat pensiun bulanan dari peserta yang berhenti bekerja sejak akhir bulan Juni 2002 sampai dengan akhir April 2017.

Perubahan liabilitas diestimasi manfaat pensiun untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Maret 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
(Liabilitas diestimasi manfaat pensiun)		
beban manfaat pensiun dibayar di muka pada awal tahun	1.057	1.540
Beban pensiun berkala bersih	102	548
Penyisihan manfaat tambahan	-	205
Rugi (laba) aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	478	(2.691)
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	(478)	1.455
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada akhir periode	<u>1.159</u>	<u>1.057</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. PENSUIN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

i. Perusahaan (lanjutan)

a. *Funded* (lanjutan)

i. Manfaat pasti (lanjutan)

Komponen beban pensiun berkala bersih untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan 2018 sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Beban jasa	65	96
Beban administrasi program	19	18
Beban bunga bersih	<u>18</u>	<u>25</u>
Beban pensiun berkala bersih	102	139
Dibebankan kepada entitas anak berdasarkan perjanjian	-	(10)
Beban pensiun berkala bersih dikurangi jumlah yang dibebankan kepada entitas anak	<u>102</u>	<u>129</u>

Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Rugi aktuarial yang diakui pada periode berjalan:	478	403
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	<u>(478)</u>	<u>(403)</u>
Jumlah bersih	<u>-</u>	<u>-</u>

Penilaian aktuarial atas program pensiun manfaat pasti dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, pada laporan masing-masing tertanggal 1 April 2019 dan 27 Februari 2018 yang dilakukan oleh PT Towers Watson Purbajaga ("TWP"), aktuaris independen yang berasosiasi dengan Willis Towers Watson ("WTW") (dahulu Towers Watson). Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Tingkat diskonto	8,25%	6,75%
Tingkat kenaikan kompensasi	8,00%	8,00%
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2011	2011

ii. Manfaat tambahan

Berdasarkan peraturan perusahaan yang diterbitkan tanggal 7 Juni 2017 tentang peraturan dana pensiun dari Dapen, Perusahaan membentuk dana manfaat tambahan yang bersumber dari hasil pengembangan program pensiun paling banyak 10%, dengan ketentuan RKD diatas 105% dan tingkat pengembalian investasi diatas suku bunga aktuarial untuk pendanaan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

i. Perusahaan (lanjutan)

a. *Funded* (lanjutan)

ii. Manfaat tambahan (lanjutan)

	<u>31 Maret 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Perubahan liabilitas manfaat pensiun		
Liabilitas manfaat pensiun pada awal tahun	104	1.076
Dibebankan pada laba rugi:		
Beban bunga	2	69
(Laba) rugi aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	-	(948)
Pembayaran pensiun	-	(93)
Liabilitas manfaat pensiun pada akhir periode	106	104
Perubahan aset program pensiun		
Nilai wajar aset program pensiun pada awal tahun	98	-
Penyisihan manfaat tambahan	2	205
Pengembalian atas aset program pensiun	-	(14)
Pembayaran manfaat pensiun	-	(93)
Nilai wajar aset program pensiun pada akhir periode	100	98
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada akhir periode	6	6

Pada tanggal 31 Maret 2019 belum terdapat aset program manfaat tambahan. Aset program baru akan dicatat sesuai dengan cadangan dana manfaat tambahan yang akan ditetapkan oleh pengurus dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Perubahan liabilitas manfaat tambahan pensiun untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Maret 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Liabilitas manfaat tambahan pensiun pada awal tahun	6	1.076
Beban jasa lalu	-	-
Beban pensiun berkala bersih	-	69
Penyisihan manfaat tambahan	-	(205)
(Laba) aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	-	(948)
Pengembalian aset program pensiun	-	14
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada akhir periode	6	6

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. PENSUIN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

i. Perusahaan (lanjutan)

a. *Funded* (lanjutan)

ii. Manfaat tambahan (lanjutan)

Komponen beban manfaat tambahan pensiun untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	2019	2018
Beban bunga	-	17
Beban pensiun	-	17

Nilai yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan 2018 sebesar RpNihil.

Penilaian aktuarial atas program pensiun manfaat tambahan dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, pada laporan masing-masing tertanggal 1 April 2019 dan 27 Februari 2018 yang dilakukan oleh TWP, aktuaris independen yang berasosiasi dengan WTW. Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	2018	2017
Tingkat pengembalian investasi	9,30%-10,00%	9,50%-10,25%
Tingkat diskonto	8,25%	6,75%
Tingkat suku bunga aktuarial pendanaan	9,25%-9,50%	9,25%-9,50%
Tingkat kenaikan kompensasi	8,00%	8,00%
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2011	2011

b. *Unfunded*

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti tanpa pendanaan dan program pensiun iuran pasti untuk karyawannya.

Program pensiun iuran pasti diselenggarakan bagi karyawan tetap yang mulai bekerja pada atau setelah tanggal 1 Juli 2002. Program ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK"). Kontribusi Perusahaan kepada DPLK dihitung berdasarkan persentase tertentu dari gaji karyawan dimana untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp4 miliar dan Rp13 miliar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

i. Perusahaan (lanjutan)

b. *Unfunded* (lanjutan)

Sejak tahun 2007, Perusahaan memberlakukan manfaat pensiun berdasarkan *uniformulation* bagi peserta sebelum 20 April 1992 dan peserta sejak 20 April 1992 yang mulai diterapkan bagi karyawan yang akan pensiun dihitung sejak 1 Februari 2009. Pada tahun 2010, Perusahaan menggantikan *uniformulation* dengan Manfaat Pensiun Sekaligus ("MPS"). MPS diberikan bagi karyawan yang telah mencapai usia pensiun, kematian, atau cacat sejak 1 Februari 2009.

Perusahaan juga menyelenggarakan manfaat bagi karyawan yang akan memasuki masa persiapan pensiun, dimana karyawan tidak aktif selama periode 6 bulan sebelum mencapai usia pensiun yakni 56 tahun yang disebut dengan Masa Persiapan Pensiun ("MPP"). Selama periode tersebut, karyawan tetap menerima manfaat-manfaat yang diselenggarakan bagi pegawai aktif, diantaranya termasuk, namun tidak terbatas pada gaji regular, kesehatan, cuti besar, bonus, dan manfaat-manfaat lainnya. Sejak tahun 2012, Perusahaan memberlakukan ketentuan baru MPP yang mulai diterapkan bagi karyawan yang akan pensiun dihitung sejak 1 April 2012, dimana karyawan harus mengajukan permohonan MPP terlebih dahulu dan apabila tidak mengajukan MPP, maka dianggap tetap akan bekerja sampai dengan masa pensiun.

Tabel berikut ini menyajikan perubahan liabilitas program pensiun manfaat pasti tanpa pendanaan MPS dan MPP untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018:

	<u>31 Maret 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun tanpa pendanaan pada awal tahun	1.830	2.384
Beban jasa	7	54
Beban bunga bersih	33	144
(Laba) aktuarial diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	-	(137)
Pembayaran manfaat oleh pemberi kerja	(137)	(615)
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun tanpa pendanaan pada akhir periode	<u>1.733</u>	<u>1.830</u>

Komponen biaya manfaat pensiun untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Beban jasa	7	14
Beban bunga bersih	33	36
Jumlah	<u>40</u>	<u>50</u>

Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan 2018 masing-masing sebesar RpNihil.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

i. Perusahaan (lanjutan)

b. *Unfunded* (lanjutan)

Penilaian aktuarial atas program pensiun manfaat pasti dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, pada laporan masing-masing tertanggal 1 April 2019 dan 27 Februari 2018 yang dilakukan oleh TWP, aktuaris independen yang berasosiasi dengan WTW. Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Tingkat diskonto	8,00%-8,25%	6,00%-6,75%
Tingkat kenaikan kompensasi	6,10%-8,00%	6,10%-8,00%
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2011	2011

ii. Telkomsel

Telkomsel menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti bagi para karyawannya. Berdasarkan program ini, para karyawan berhak atas manfaat pensiun berdasarkan gaji dasar terakhir atau gaji bersih yang diterima dan masa kerja karyawan. Program pensiun ini dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya ("Jiwasraya"), perusahaan asuransi jiwa milik negara, di bawah suatu kontrak asuransi anuitas. Sampai dengan tahun 2004, kontribusi karyawan terhadap program ini adalah sebesar 5% dari gaji pokok bulanan dan kontribusi atas sisa jumlah yang diperlukan untuk mendanai program tersebut ditanggung oleh Telkomsel. Mulai tahun 2005, kontribusi ditanggung sepenuhnya oleh Telkomsel.

Telkomsel tidak melakukan kontribusi ke Jiwasraya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan 2018.

Tabel berikut ini menyajikan perubahan liabilitas manfaat pensiun, perubahan aset program pensiun, status pendanaan program pensiun dan nilai bersih yang tercatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 untuk program pensiun manfaat pasti:

	<u>31 Maret 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Perubahan liabilitas manfaat pensiun		
Liabilitas manfaat pensiun pada awal tahun	2.734	2.928
Dibebankan pada laba rugi:		
Beban jasa	47	213
Beban bunga	53	203
(Laba) rugi aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	-	(583)
Pembayaran pensiun		(27)
Liabilitas manfaat pensiun pada akhir periode	<u>2.834</u>	<u>2.734</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

ii. Telkomsel (lanjutan)

	<u>31 Maret 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Perubahan aset program pensiun		
Nilai wajar aset program pensiun pada awal tahun	1.193	1.089
Pendapatan bunga	20	74
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	-	(68)
Kontribusi peserta program pensiun	-	125
Pembayaran pensiun	-	(27)
Nilai wajar aset program pensiun pada akhir periode	<u>1.213</u>	<u>1.193</u>
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada akhir periode	<u>1.621</u>	<u>1.541</u>

Perubahan liabilitas diestimasi manfaat pensiun untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2018:

	<u>31 Maret 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada awal tahun	1.541	1.839
Beban manfaat pensiun (Laba) aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	81	342
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	-	(583)
Kontribusi pemberi kerja	-	68
Kontribusi pemberi kerja	-	(125)
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada akhir periode	<u>1.621</u>	<u>1.541</u>

Komponen biaya manfaat pensiun untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Beban jasa	47	53
Beban bunga bersih	34	34
Jumlah	<u>81</u>	<u>87</u>

Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan 2018 masing-masing sebesar RpNihil.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

ii. Telkomsel (lanjutan)

Penilaian aktuarial atas program pensiun manfaat pasti dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dengan laporan tertanggal masing-masing 14 Februari 2019 dan 8 Februari 2018 yang dilakukan oleh TWP, aktuaris independen yang berasosiasi dengan WTW. Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal

31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Tingkat diskonto	7,00%	8,25%
Tingkat kenaikan kompensasi	8,25%	8,00%
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2011	2011

b. Imbalan kesehatan pasca kerja

Perusahaan menyelenggarakan program imbalan kesehatan pasca kerja untuk semua karyawannya yang sudah bekerja sebelum tanggal 1 November 1995 dengan masa kerja 20 tahun atau lebih pada saat pensiun, dan anggota keluarganya yang memenuhi syarat. Ketentuan untuk masa kerja selama 20 tahun ini tidak berlaku bagi karyawan yang memasuki masa pensiun sebelum tanggal 3 Juni 1995. Program ini tidak berlaku bagi karyawan yang mulai bekerja pada Perusahaan sejak tanggal 1 November 1995. Program jaminan kesehatan pasca kerja tersebut dikelola oleh Yakes.

Program imbalan kesehatan pasca kerja iuran pasti diselenggarakan bagi karyawan tetap yang mulai bekerja pada atau setelah tanggal 1 November 1995 atau karyawan dengan masa kerja kurang dari 20 tahun pada saat pensiun. Perusahaan tidak memberikan kontribusi ke Yakes untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Tabel berikut ini menyajikan perubahan liabilitas imbalan kesehatan pasca kerja, perubahan aset program imbalan kesehatan pasca kerja, status pendanaan program imbalan kesehatan pasca kerja, dan jumlah bersih yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018:

	<u>31 Maret 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Perubahan liabilitas imbalan kesehatan pasca kerja		
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja pada awal tahun	12.423	15.448
Dibebankan pada laba rugi:		
Beban bunga	266	1.102
(Laba) rugi aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	342	(3.641)
Pembayaran imbalan kesehatan pasca kerja	(142)	(486)
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja pada akhir periode	12.889	12.423
Perubahan aset program		
Nilai wajar aset program pada awal tahun	12.228	13.029
Pendapatan bunga	261	927
Pengembalian aset program (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	342	(1.082)
Pembayaran imbalan kesehatan pasca kerja	(142)	(486)
Beban administrasi program	(46)	(160)
Nilai wajar aset program pada akhir periode	12.643	12.228
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja pada akhir periode	246	195

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

b. Imbalan kesehatan pasca kerja (lanjutan)

Pada tanggal 31 Maret 2019 dan 2018, aset program terdiri dari:

	31 Maret 2019		31 Desember 2018	
	Harga kuotasian di pasar aktif	Tidak memiliki harga kuotasian	Harga kuotasian di pasar aktif	Tidak memiliki harga kuotasian
Kas dan setara kas	941	-	1.115	-
Saham publik:				
Manufaktur dan konsumen	714	-	799	-
Industri keuangan	886	-	799	-
Konstruksi	218	-	190	-
Infrastruktur dan telekomunikasi	340	-	332	-
Grosir	202	-	177	-
Tambang	84	-	77	-
Industri lainnya:				
Jasa	67	-	60	-
Agrikultur	31	-	32	-
Bioteknologi dan industri farmasi	99	-	85	-
Lainnya	4	-	3	-
Reksadana berbasis ekuitas	1.158	-	1.204	-
Instrumen keuangan pendapatan tetap:				
Reksadana pendapatan tetap	7.480	-	7.020	-
Saham non-publik:				
Penempatan privat	-	418	-	335
Jumlah	12.224	418	11.893	335

Aset program Yakes juga termasuk saham Seri B yang diterbitkan Perusahaan dengan nilai wajar sebesar Rp242 miliar dan Rp249 miliar yang merupakan 1,90% dan 2,03% dari keseluruhan aset program masing-masing pada tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018.

Perkiraan pengembalian ditentukan berdasarkan ekspektasi pasar untuk pengembalian keseluruhan masa liabilitas dengan mempertimbangkan perpaduan portofolio dari aset program. Hasil aktual aset program adalah Rp556 miliar dan Rp(315) miliar masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Perubahan liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018:

	31 Maret 2019	31 Desember 2018
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja pada awal tahun	195	2.419
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala	51	335
Rugi (laba) rugi aktuarial yang diakui di penghasilan komprehensif lainnya	342	(3.641)
Pengembalian aset program (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	(342)	1.082
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja pada akhir periode	246	195

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

b. Imbalan kesehatan pasca kerja (lanjutan)

Komponen beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala bersih untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Beban administrasi program	46	45
Beban bunga bersih	4	44
Jumlah beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala	<u>50</u>	<u>89</u>

Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
(Laba) rugi aktuarial yang diakui pada periode berjalan:	(342)	251
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	342	(251)
Jumlah bersih	<u>-</u>	<u>-</u>

Penilaian aktuarial untuk program imbalan kesehatan pasca kerja dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 pada laporan masing-masing tertanggal 1 April 2019 dan 27 Februari 2018 yang dilakukan oleh TWP, aktuaris independen yang berasosiasi dengan WTW. Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Tingkat diskonto	8,75%	7,25%
Tingkat pertumbuhan beban kesehatan untuk tahun depan	7,00%	7,00%
Tingkat tren beban kesehatan	7,00%	7,00%
Tahun tingkat tren bebas kesehatan tercapai	2018	2018
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2011	2011

c. Imbalan pasca kerja lainnya

Perusahaan memberikan imbalan pasca kerja lainnya dalam bentuk uang tunai yang dibayarkan pada saat karyawan pensiun atau saat pemutusan hubungan kerja. Imbalan pasca kerja lainnya tersebut adalah Biaya Fasilitas Perumahan Terakhir (BFPT) dan Biaya Perjalanan Pensiun dan Purnabhakti (BPP).

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

c. Imbalan pasca kerja lainnya (lanjutan)

Perubahan liabilitas diestimasi imbalan pasca kerja lainnya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018:

	<u>31 Maret 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Liabilitas diestimasi imbalan pasca kerja lainnya pada awal tahun	419	510
Dibebankan pada laba rugi:		
Beban jasa kini	1	6
Beban bunga bersih	7	26
Rugi aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	-	(24)
Pembayaran manfaat oleh Perusahaan	(22)	(99)
Liabilitas diestimasi imbalan pasca kerja lainnya pada akhir periode	<u>405</u>	<u>419</u>

Komponen beban imbalan pasca kerja lainnya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan 2018:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Beban jasa	1	1
Beban bunga bersih	7	7
Jumlah	<u>8</u>	<u>8</u>

Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan 2018 masing-masing sebesar RpNihil.

Penilaian aktuarial untuk program imbalan pasca kerja lainnya dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, pada laporan masing-masing tertanggal 1 April 2019 dan 27 Februari 2018 yang dilakukan oleh TWP, aktuaris independen yang berasosiasi dengan WTW. Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Tingkat diskonto	8,00%	5,75%
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2011	2011

d. Kewajiban pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan, Perusahaan dan entitas anak diharuskan untuk memberikan manfaat pensiun minimum, jika belum dipenuhi oleh program pensiun yang diselenggarakan, kepada para karyawannya yang mencapai usia pensiun. Jumlah tercatat kewajiban tambahan ini pada tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp535 miliar dan Rp507 miliar. Beban pensiun yang dibebankan adalah masing-masing sebesar Rp36 miliar dan Rp21 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan 2018 (Catatan 23).

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

e. Profil jatuh tempo atas liabilitas manfaat pasti

Waktu perkiraan pembayaran manfaat dan rata-rata tertimbang durasi atas liabilitas manfaat pasti untuk 2018 adalah sebagai berikut (dalam miliaran Rupiah):

Jangka waktu	Perkiraan pembayaran manfaat					
	Perusahaan			Telkomsel	Imbalan kesehatan pasca kerja	Imbalan pasca kerja lainnya
	Manfaat pasti	Manfaat tambahan	Unfunded			
Dalam 10 tahun kedepan	16.004	-	810	2.498	5.478	463
Dalam 10-20 tahun	20.349	-	160	7.880	6.913	91
Dalam 20-30 tahun	16.207	20	29	6.680	6.217	39
Dalam 30-40 tahun	9.400	38	9	1.580	3.193	3
Dalam 40-50 tahun	3.383	30	-	-	661	-
Dalam 50-60 tahun	644	50	-	-	22	-
Dalam 60-70 tahun	62	101	-	-	-	-
Dalam 70-80 tahun	2	-	-	-	-	-

Rata-rata tertimbang durasi atas liabilitas manfaat pasti

9,11 tahun 9,11 tahun 3,97 tahun 10,58 tahun 17,41 tahun 3,13 tahun

f. Analisis sensitivitas

Perubahan 1% pada tingkat diskonto dan tingkat gaji akan memberikan dampak pada 31 Maret 2019 atas liabilitas manfaat pasti sebagai berikut:

Sensitivitas	Tingkat diskonto		Tingkat gaji	
	Peningkatan 1%	Penurunan 1%	Peningkatan 1%	Penurunan 1%
	Jumlah peningkatan (penurunan)		Jumlah peningkatan (penurunan)	
Didanai:				
Manfaat pasti	(1.614)	1.885	283	(294)
Manfaat tambahan	(2)	(1)	-	-
Tidak didanai	(39)	37	40	(44)
Telkomsel	(497)	562	294	(276)
Imbalan kesehatan pasca kerja	(1.411)	1.794	1.762	(1.490)
Imbalan pasca kerja lainnya	(11)	12	-	-

Analisis sensitivitas dilakukan dengan menggunakan metode yang mengekstrapolasi dampak atas liabilitas manfaat pasti sebagai akibat perubahan atas asumsi utama yang muncul pada akhir periode pelaporan.

Hasil sensitivitas tersebut diatas menentukan dampak secara individu atas liabilitas manfaat pasti masing-masing program pada akhir tahun. Dalam kenyataannya, setiap program bergantung pada beberapa hal lain eksternal yang dapat menyebabkan liabilitas manfaat pasti bergerak baik searah maupun berlawanan, dan sensitivitas setiap program dapat berubah secara bervariasi dari waktu ke waktu.

Tidak terdapat perubahan metode dan asumsi yang digunakan dalam menghitung analisis sensitivitas dari periode sebelumnya.

30. PENGHARGAAN MASA KERJA (“LONG SERVICE AWARDS” atau “LSA”)

Telkomsel dan Telkomsat memberikan penghargaan dalam bentuk uang tunai atau sejumlah hari cuti tertentu kepada karyawan yang telah memenuhi syarat masa kerja tertentu, termasuk LSA dan LSL. LSA diberikan saat karyawan mencapai kelipatan tahun tertentu atau saat keputusan hubungan kerja. LSL dalam bentuk sejumlah hari cuti atau uang tunai, tergantung persetujuan manajemen, diberikan kepada karyawan yang memenuhi syarat masa kerja dan dengan usia minimum tertentu.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. PENGHARGAAN MASA KERJA (“LONG SERVICE AWARDS” atau “LSA”) (lanjutan)

Liabilitas yang timbul sehubungan dengan penghargaan ini ditentukan berdasarkan perhitungan aktuarial dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*, sebesar Rp873 miliar dan Rp852 miliar masing-masing pada tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018. Manfaat yang dibebankan adalah sebesar Rp38 miliar dan Rp35 miliar masing-masing periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan 2018 (Catatan 23).

31. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

a. Hubungan dan sifat saldo akun/transaksi dengan pihak berelasi

Rincian hubungan dan sifat akun/transaksi dengan pihak berelasi yang signifikan adalah sebagai berikut:

Pihak Berelasi	Hubungan	Sifat Saldo Akun/ Transaksi
Pemerintah Menteri Keuangan	Pemegang saham utama	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, penghasilan pendanaan, biaya pendanaan, dan investasi pada instrumen keuangan
BUMN	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, beban operasi, dan pembelian aset tetap
Indosat	Entitas sepengendali	Pendapatan interkoneksi, pendapatan sewa jaringan, pendapatan atas penggunaan satelit transponder, beban interkoneksi, beban penggunaan fasilitas telekomunikasi, beban operasional dan pemeliharaan, dan beban atas penggunaan data jaringan sistem komunikasi
PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN")	Entitas sepengendali	Beban listrik, penghasilan pendanaan, biaya pendanaan, investasi pada instrumen keuangan
Bank milik negara BNI	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, penghasilan pendanaan, dan biaya pendanaan
BRI	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, penghasilan pendanaan, dan biaya pendanaan
PT Asuransi Jasa Indonesia ("Jasindo")	Entitas sepengendali	Beban asuransi aset tetap
PT Mandiri Manajemen Investasi Bahana TCW	Entitas sepengendali	Aset keuangan tersedia untuk dijual
	Entitas sepengendali	Aset keuangan tersedia untuk dijual, dan obligasi
PT Sarana Multi Infrastruktur Tiphone	Entitas sepengendali	Biaya pendanaan
	Entitas asosiasi	Distribusi kartu SIM dan vauzer prabayar
PT Poin Multi Media Nusantara ("POIN")	Entitas berelasi lainnya	Pembelian <i>handset</i>
PT Perdana Mulia Makmur ("PMM")	Entitas berelasi lainnya	Pembelian <i>handset</i>
Koperasi Pegawai Telkom ("Kopegtel")	Entitas berelasi lainnya	Pembelian aset tetap, pembangunan dan instalasi, beban sewa bangunan, beban sewa mobil, pembelian mobil, pembelian barang dan jasa pembangunan, beban jasa pemeliharaan dan kebersihan, dan bagi hasil pendapatan PBH
Koperasi Pegawai Telkomsel ("Kisel")	Entitas berelasi lainnya	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, beban sewa mobil, beban pencetakan dan pendistribusian tagihan pelanggan, beban jasa penagihan, beban jasa-jasa lainnya, distribusi kartu SIM dan vauzer prabayar, dan pembelian aset tetap

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Hubungan dan sifat saldo akun/transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Rincian hubungan dan sifat akun/transaksi dengan pihak berelasi yang signifikan adalah sebagai berikut (lanjutan):

Pihak Berelasi	Hubungan	Sifat Saldo Akun/ Transaksi
PT Graha Informatika Nusantara ("Gratika")	Entitas berelasi lainnya	Pendapatan jasa jaringan, beban operasi dan pemeliharaan, pembelian aset tetap dan jasa konstruksi dan distribusi kartu SIM dan vaucer prabayar
Direksi	Personil manajemen kunci	Gaji dan fasilitas
Komisaris	Personil pengawas	Gaji dan fasilitas

Jumlah saldo dari piutang dan utang usaha pada akhir tahun bebas dari bunga dan penyelesaiannya akan terjadi dalam bentuk kas. Tidak ada jaminan yang disediakan atau diterima untuk setiap piutang dan utang usaha dengan pihak berelasi. Pada tanggal 31 Maret 2019, Grup mencatat adanya pengurangan nilai provisi yang diakui selama tahun berjalan dari pihak berelasi sebesar Rp(145) miliar. Penilaian ini dilakukan di setiap tahun dengan menilai status masa kini dari piutang yang ada dan historis penagihan piutang yang lalu.

b. Transaksi dengan pihak berelasi

Berikut ini adalah transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi:

	2019		2018	
	Jumlah	% terhadap jumlah pendapatan	Jumlah	% terhadap jumlah pendapatan
PENDAPATAN				
Pemegang saham utama				
Pemerintah	39	0,11	19	0,06
Entitas sepengendali				
Indosat	200	0,57	301	0,93
BRI	155	0,44	68	0,21
BNI	78	0,22	24	0,07
Lain-lain	474	1,36	343	1,07
Sub-jumlah	907	2,59	736	2,28
Entitas berelasi lainnya	21	0,06	12	0,04
Entitas asosiasi	8	0,02	10	0,03
Jumlah	975	2,78	777	2,41

	2019		2018	
	Jumlah	% terhadap jumlah beban	Jumlah	% terhadap jumlah beban
BEBAN				
Entitas sepengendali				
PLN	198	0,86	611	2,83
Jasindo	198	0,86	62	0,29
Indosat	184	0,80	232	1,07
Lain-lain	32	0,14	21	0,10
Sub-jumlah	612	2,66	926	4,29
Entitas berelasi lainnya				
Kisel	266	1,16	214	0,99
Kopegtel	219	0,95	180	0,83
PMM	213	0,93	212	0,98
POIN	213	0,93	213	0,99
Lain-lain	55	0,24	70	0,31
Sub-jumlah	966	4,21	889	4,10
Entitas asosiasi	24	0,10	46	0,22
Jumlah	1.602	6,97	1.861	8,61

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Berikut ini adalah transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi (lanjutan):

	2019		2018	
	Jumlah	% terhadap jumlah penghasilan pendanaan	Jumlah	% terhadap jumlah penghasilan pendanaan
PENGHASILAN PENDANAAN				
Entitas sepengendali				
Bank milik negara	168	60,87	188	59,12
Lain-lain	-	-	2	0,63
Jumlah	168	60,87	190	59,75
BIAYA PENDANAAN				
PEMBELIAN ASET TETAP (Catatan 9)				
Pemegang saham utama				
Pemerintah	9	0,90	11	1,62
Entitas sepengendali				
Bank milik negara	238	23,90	191	28,17
Sarana Multi Infrastruktur	50	5,02	24	3,54
Jumlah	297	29,82	226	33,33
DISTRIBUSI KARTU SIM DAN VAUCER				
Entitas berelasi lainnya				
Tiphone	1.220	3,50	1.006	3,11
Kisel	944	2,71	1.095	3,39
Gratika	157	0,45	88	0,27
Jumlah	2.321	6,66	2.189	6,77

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Saldo akun dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2019		31 Desember 2018	
	Jumlah	% terhadap jumlah aset	Jumlah	% terhadap jumlah aset
a. Kas dan setara kas (Catatan 3)	15.177	6,93	13.205	6,40
b. Aset keuangan lancar lainnya (Catatan 4)	610	0,28	471	0,23
c. Piutang usaha - bersih (Catatan 5)	2.664	1,22	2.126	1,03
d. Aset lancar lainnya (Catatan 7)	158	0,07	159	0,08
e. Aset tidak lancar lainnya (Catatan 10)	29	0,01	44	0,02
	31 Maret 2019		31 Desember 2018	
	Jumlah	% terhadap jumlah liabilitas	Jumlah	% terhadap jumlah liabilitas
f. Utang usaha (Catatan 12)				
Pemegang saham utama				
Menteri Keuangan	74	0,08	2	0,00
Entitas sepengendali				
Indosat	93	0,10	122	0,14
BUMN	494	0,53	294	0,33
Sub-jumlah	587	0,63	416	0,47
Entitas berelasi lainnya				
Kopegtel	219	0,23	279	0,31
Lain-lain	221	0,24	296	0,33
Sub-jumlah	440	0,47	575	0,64
Jumlah	1.101	1,18	993	1,11
g. Beban yang masih harus dibayar (Catatan 13)				
Pemegang saham utama				
Pemerintah	12	0,01	7	0,01
Entitas sepengendali				
BUMN	98	0,11	86	0,10
Bank milik negara	56	0,06	61	0,07
Sub-jumlah	154	0,17	147	0,17
Entitas berelasi lainnya				
Kisel	228	0,24	183	0,21
Lain-lain	15	0,00	13	0,01
Jumlah	409	0,42	350	0,40
h. Uang muka pelanggan				
Pemegang saham utama				
Pemerintah	19	0,02	19	0,02
Entitas sepengendali				
PLN	6	0,01	12	0,01
Jumlah	25	0,03	31	0,03
i. Utang bank jangka pendek (Catatan 15)	1.089	1,17	956	1,08
j. Pinjaman penerusan (Catatan 16a)	937	1,01	949	1,07
k. Utang bank jangka panjang (Catatan 16c)	11.334	12,16	12.620	14,19
l. Pinjaman lainnya (Catatan 16d)	2.151	0,02	2.244	2,52

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

c. Perjanjian signifikan dengan pihak berelasi

i. Pemerintah

Perusahaan memperoleh pinjaman penerusan dari Pemerintah (Catatan 16a).

ii. Indosat

Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Indosat untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional kepada masyarakat.

Perusahaan juga mengadakan perjanjian interkoneksi dengan Indosat antara jaringan telepon tidak bergerak ("*Public Switched Telephone Network*" atau "PSTN") milik Perusahaan dan jaringan telekomunikasi bergerak selular GSM milik Indosat dalam rangka penyelenggaraan jasa Indosat Multimedia Mobile serta penyelesaian hak dan liabilitas interkoneksi terkait.

Perusahaan juga mengadakan perjanjian dengan Indosat untuk interkoneksi jaringan telekomunikasi bergerak selular GSM milik Indosat dengan PSTN Perusahaan, yang memungkinkan pelanggan masing-masing perusahaan untuk melakukan panggilan domestik antara jaringan telekomunikasi bergerak selular GSM milik Indosat dan jaringan tidak bergerak Perusahaan, serta memungkinkan pelanggan Indosat untuk mengakses jasa SLI Perusahaan dengan menekan "007".

Perusahaan selama ini menangani pembuatan kuitansi tagihan dan melakukan penagihan kepada pelanggan untuk Indosat. Indosat secara bertahap akan mengambil alih kegiatan tersebut dan melakukan sendiri penerbitan kuitansi tagihan dan melakukan penagihan secara langsung. Perusahaan menerima kompensasi dari Indosat yang dihitung sebesar 1% dari jumlah yang ditagih oleh Perusahaan terhitung sejak tanggal 1 Januari 1995, ditambah dengan beban pemrosesan tagihan yang ditetapkan sebesar jumlah tertentu untuk setiap data (*record*). Pada tanggal 11 Desember 2008, Perusahaan dan Indosat sepakat untuk memberlakukan tarif biaya layanan SLI, besaran tarif tersebut telah memperhitungkan besaran kompensasi penerbitan kuitansi tagihan dan penagihan. Kesepakatan ini berlaku efektif di tahun berjalan dan berlaku selanjutnya sampai ada Berita Acara Kesepakatan baru.

Pada tanggal 28 Desember 2006, Perusahaan dan Indosat menandatangani amandemen atas perjanjian kerja sama interkoneksi untuk jaringan tidak bergerak (lokal, SLJJ, dan internasional) dan jaringan bergerak dalam rangka implementasi liabilitas tarif berbasis biaya berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 8 tahun 2006. Amandemen ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2007.

Telkomsel juga mengadakan perjanjian dengan Indosat untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional kepada pelanggan jaringan bergerak selular GSM.

Perusahaan menyediakan layanan sirkuit langganan kepada Indosat dan entitas anaknya, yaitu PT Indosat Mega Media dan Lintasarta. Saluran ini dapat digunakan perusahaan-perusahaan tersebut untuk hubungan telepon, telegraf, data, teleks, faksimili, atau jasa telekomunikasi lainnya

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

c. Perjanjian signifikan dengan pihak berelasi (lanjutan)

iii. Lain-lain

Kisel adalah koperasi yang didirikan oleh karyawan Telkomsel, bergerak dalam jasa penyewaan kendaraan, percetakan dan distribusi tagihan pelanggan, penagihan, dan jasa-jasa lainnya yang bermanfaat bagi Telkomsel. Telkomsel juga mengadakan perjanjian penjualan dengan Kisel untuk distribusi kartu SIM dan voucher pulsa isi ulang.

d. Remunerasi personil manajemen kunci dan pengawas

Personil manajemen kunci adalah Direksi Perusahaan dan personil pengawas adalah Dewan Komisaris.

Perusahaan memberikan remunerasi dalam bentuk honor dan fasilitas untuk keperluan tugas operasional Dewan Komisaris dan imbalan kerja jangka pendek berupa gaji dan fasilitas untuk keperluan tugas operasional Direksi. Jumlah tunjangan tersebut adalah sebagai berikut:

	2019		2018	
	Jumlah	% terhadap jumlah beban	Jumlah	% terhadap jumlah beban
Direksi	82	0,36%	80	0,37%
Dewan Komisaris	38	0,17%	28	0,13%

Jumlah yang disajikan pada tabel diatas adalah jumlah yang diakui sebagai beban selama periode laporan keuangan.

32. SEGMENT OPERASI

Pada tahun 2017, Manajemen melakukan penataan kembali pengelolaan portofolio bisnis Grup dari pengelolaan menggunakan pendekatan berbasis kelompok pelanggan menjadi pendekatan berbasis *Customer Facing Unit* ("CFU") agar Grup dapat berfokus pada pasar pelanggan yang lebih spesifik. Hal ini diikuti dengan perubahan struktur organisasi Grup untuk mengakomodasi pengambilan keputusan dan melakukan penilaian kinerja berdasarkan pendekatan berbasis CFU.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

Grup memiliki empat segmen dilaporkan utama, yaitu *mobile*, *consumer*, *enterprise* dan WIB. Segmen *mobile* menyediakan produk *mobile voice*, SMS, *value added service*, dan *mobile broadband*. Segmen *consumer* menyediakan jasa telepon tidak bergerak, TV berbayar, data, internet, dan jasa telekomunikasi lainnya yang diberikan kepada pelanggan perumahan. Segmen *enterprise* menyediakan solusi *end-to-end* ke pelanggan korporat dan institusional. Segmen WIB menyediakan jasa interkoneksi, sewa sirkuit, satelit, VSAT, *broadband access*, teknologi informasi, data dan jasa internet yang diberikan ke operator telekomunikasi lainnya dan pelanggan internasional. Segmen lain-lain merupakan segmen *digital services* yang tidak memenuhi persyaratan pengungkapan dari laporan segmen ini. Tidak terdapat segmen operasi yang digabungkan dalam menentukan laporan segmen.

Manajemen memantau hasil operasi unit bisnis secara terpisah untuk tujuan pengambilan keputusan tentang alokasi sumber daya dan menilai kinerja. Kinerja segmen dinilai berdasarkan laba atau rugi usaha segmen yang diukur sesuai dengan laba atau rugi usaha dalam laporan keuangan konsolidasian. Namun demikian, kegiatan pendanaan dan pajak penghasilan tidak dievaluasi secara terpisah dan tidak dialokasikan ke segmen operasi.

Pendapatan dan beban segmen meliputi juga transaksi antar segmen operasi dan dinilai sebesar nilai yang dipercaya manajemen untuk merepresentasikan nilai pasar.

	2019					Total segmen	Penyesuaian dan Eliminasi	Jumlah konsolidasian
	Mobile	Consumer	Enterprise	WIB	Lain-lain			
Hasil segmen								
Pendapatan								
Pendapatan eksternal	21.332	4.079	6.321	2.918	32	34.682	158	34.840
Pendapatan antar segmen	856	134	4.943	4.257	292	10.482	(10.482)	-
Jumlah pendapatan segmen	<u>22.188</u>	<u>4.213</u>	<u>11.264</u>	<u>7.175</u>	<u>324</u>	<u>45.164</u>	<u>(10.324)</u>	<u>34.840</u>
Beban								
Beban eksternal	(9.791)	(2.974)	(5.518)	(3.795)	(334)	(22.412)	(399)	(22.811)
Beban antar segmen	(3.807)	(956)	(4.705)	(1.574)	(17)	(11.059)	11.059	-
Jumlah beban segmen	<u>(13.598)</u>	<u>(3.930)</u>	<u>(10.223)</u>	<u>(5.369)</u>	<u>(351)</u>	<u>(33.471)</u>	<u>10.660</u>	<u>(22.811)</u>
Hasil segmen	<u>8.590</u>	<u>283</u>	<u>1.041</u>	<u>1.806</u>	<u>(27)</u>	<u>11.693</u>	<u>336</u>	<u>12.029</u>
Informasi lain								
Pembelian barang modal	(2.869)	(1.427)	(1.253)	(1.618)	(5)	(7.172)	(89)	(7.261)
Penyusutan dan amortisasi	(3.396)	(893)	(630)	(735)	(5)	(5.659)	17	(5.642)
Provisi diakui selama periode berjalan	(131)	(148)	(176)	(36)	(0)	(491)	(5)	(496)
	<u>(6.396)</u>	<u>(2.468)</u>	<u>(3.059)</u>	<u>(3.189)</u>	<u>(5)</u>	<u>(13.417)</u>	<u>10</u>	<u>(13.407)</u>
	<u>2.194</u>	<u>31</u>	<u>(2.018)</u>	<u>(1.383)</u>	<u>(32)</u>	<u>8.276</u>	<u>346</u>	<u>6.622</u>
	<u>4.388</u>	<u>64</u>	<u>(4.036)</u>	<u>(2.766)</u>	<u>(67)</u>	<u>16.552</u>	<u>356</u>	<u>13.249</u>
	<u>12.029</u>	<u>347</u>	<u>7.245</u>	<u>4.409</u>	<u>(99)</u>	<u>31.817</u>	<u>391</u>	<u>32.208</u>
	<u>34.840</u>	<u>3.560</u>	<u>18.509</u>	<u>28.584</u>	<u>227</u>	<u>77.027</u>	<u>(20.657)</u>	<u>56.370</u>
	<u>69.680</u>	<u>6.920</u>	<u>37.013</u>	<u>57.168</u>	<u>454</u>	<u>154.054</u>	<u>(21.266)</u>	<u>132.788</u>
	<u>34.840</u>	<u>3.560</u>	<u>18.509</u>	<u>28.584</u>	<u>227</u>	<u>77.027</u>	<u>(20.657)</u>	<u>56.370</u>
	<u>69.680</u>	<u>6.920</u>	<u>37.013</u>	<u>57.168</u>	<u>454</u>	<u>154.054</u>	<u>(21.266)</u>	<u>132.788</u>

	2018					Total segmen	Penyesuaian dan Eliminasi	Jumlah konsolidasian
	Mobile	Consumer	Enterprise	WIB	Lain-lain			
Hasil segmen								
Pendapatan								
Pendapatan eksternal	21.068	3.104	5.949	2.239	25	32.385	(42)	32.343
Pendapatan antar segmen	794	317	3.693	3.916	214	8.934	(8.934)	-
Jumlah pendapatan segmen	<u>21.862</u>	<u>3.421</u>	<u>9.642</u>	<u>6.155</u>	<u>239</u>	<u>41.319</u>	<u>(8.976)</u>	<u>32.343</u>
Beban								
Beban eksternal	(9.970)	(3.208)	(6.175)	(3.064)	(246)	(22.663)	1.198	(21.465)
Beban antar segmen	(3.720)	(648)	(3.343)	(1.291)	(7)	(9.009)	9.009	-
Jumlah beban segmen	<u>(13.690)</u>	<u>(3.856)</u>	<u>(9.518)</u>	<u>(4.355)</u>	<u>(253)</u>	<u>(31.672)</u>	<u>10.207</u>	<u>(21.465)</u>
Hasil segmen	<u>8.172</u>	<u>(435)</u>	<u>124</u>	<u>1.800</u>	<u>(14)</u>	<u>9.647</u>	<u>1.231</u>	<u>10.878</u>
Informasi lain								
Pembelian barang modal	(2.959)	(1.438)	(757)	(657)	(8)	(5.819)	(315)	(6.134)
Penyusutan dan amortisasi	(3.590)	(717)	(564)	(640)	(5)	(5.516)	143	(5.373)
Provisi diakui selama periode berjalan	(126)	(103)	(176)	(21)	-	(426)	(3)	(429)
	<u>(6.675)</u>	<u>(3.258)</u>	<u>(1.497)</u>	<u>(1.318)</u>	<u>(13)</u>	<u>(12.718)</u>	<u>135</u>	<u>(12.583)</u>
	<u>14.847</u>	<u>(3.693)</u>	<u>8.145</u>	<u>4.842</u>	<u>(27)</u>	<u>26.604</u>	<u>1.366</u>	<u>28.134</u>
	<u>29.694</u>	<u>(7.391)</u>	<u>16.290</u>	<u>29.684</u>	<u>(40)</u>	<u>53.208</u>	<u>1.731</u>	<u>56.939</u>
	<u>59.388</u>	<u>(14.782)</u>	<u>32.580</u>	<u>59.368</u>	<u>(80)</u>	<u>106.416</u>	<u>(3.462)</u>	<u>102.954</u>
	<u>29.694</u>	<u>(7.391)</u>	<u>16.290</u>	<u>29.684</u>	<u>(40)</u>	<u>53.208</u>	<u>1.731</u>	<u>56.939</u>
	<u>59.388</u>	<u>(14.782)</u>	<u>32.580</u>	<u>59.368</u>	<u>(80)</u>	<u>106.416</u>	<u>(3.462)</u>	<u>102.954</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

Penyesuaian dan eliminasi:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Hasil segmen	11.693	9.647
Rugi usaha unit bisnis	(249)	(568)
Eliminasi dan penyesuaian lainnya	585	1.799
Laba usaha konsolidasi	<u>12.029</u>	<u>10.878</u>

Informasi Geografis:

Informasi pendapatan di bawah berdasarkan lokasi unit bisnis.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Pendapatan eksternal		
Indonesia	33.682	31.742
Luar negeri	1.158	601
Jumlah	<u>34.840</u>	<u>32.343</u>

Aset operasional tidak lancar untuk tujuan segmen ini terdiri dari aset tetap dan aset takberwujud.

	<u>31 Maret 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Aset operasional tidak lancar		
Indonesia	148.463	144.631
Luar negeri	3.003	3.649
Jumlah	<u>151.466</u>	<u>148.280</u>

33. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI

Berdasarkan UU No. 36 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2000, tarif penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara berdasarkan jenis tarif, struktur dan dengan mengacu pada formula batasan tarif jasa telekomunikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

a. Tarif telepon tidak bergerak

Pemerintah telah mengeluarkan formula penyesuaian tarif baru yang diatur dalam Peraturan Menkominfo No. 15/PER/M.KOMINFO/4/2008 tanggal 30 April 2008 tentang "Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Teleponi Dasar yang Disalurkan melalui Jaringan Tetap". Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya No. 09/PER/M.KOMINFO/02/2006.

Berdasarkan peraturan tersebut, struktur tarif jasa teleponi dasar yang disalurkan melalui jaringan tetap terdiri dari:

- Biaya aktivasi
- Biaya berlangganan bulanan
- Biaya penggunaan
- Biaya fasilitas tambahan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI (lanjutan)

b. Tarif telepon selular (lanjutan)

Pada tanggal 7 April 2008, Menkominfo menerbitkan Peraturan Menkominfo No.09/PER/M.KOMINFO/04/2008 tentang "Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi yang Disalurkan melalui Jaringan Bergerak Selular" yang memberikan pedoman untuk menentukan tarif selular dengan formula yang terdiri dari unsur biaya elemen jaringan dan biaya aktivitas layanan *retail*. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya No. 12/PER/M.KOMINFO/02/2006.

Berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 09/PER/M.KOMINFO/04/2008 tanggal 7 April 2008, jenis tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang disalurkan melalui jaringan bergerak selular dapat terdiri dari:

- Tarif jasa teleponi dasar
 - Tarif jelajah, dan/atau
 - Tarif jasa multimedia,
- dengan struktur tarif sebagai berikut:
- Biaya aktivasi
 - Biaya berlangganan bulanan
 - Biaya penggunaan
 - Biaya fasilitas tambahan.

c. Tarif interkoneksi

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia ("BRTI"), dalam suratnya No. 262/BRTI/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, memutuskan untuk mengubah tarif interkoneksi SMS menjadi berbasis biaya dengan tarif maksimal sebesar Rp23 per SMS efektif sejak tanggal 1 Juni 2012 dan berlaku untuk seluruh operator penyelenggara telekomunikasi.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika No. 118/KOMINFO/DJPPI/PI.02.04/01/2014 tanggal 30 Januari 2014, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika memutuskan untuk menerapkan tarif interkoneksi baru yang berlaku efektif sejak 1 Februari 2014 sampai dengan 31 Desember 2016 dan dapat dievaluasi setiap tahun oleh BRTI. Sebagai tindak lanjut, Perusahaan dan Telkomsel diminta untuk menyampaikan usulan Dokumen Penawaran Interkoneksi ("DPI") kepada BRTI untuk dievaluasi.

Selanjutnya, BRTI melalui suratnya No. 60/BRTI/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 dan No. 125/BRTI/IV/2014 tanggal 24 April 2014 menyetujui revisi DPI Telkomsel dan Perusahaan terkait tarif interkoneksi. Melalui surat tersebut, BRTI juga menyetujui perubahan tarif interkoneksi SMS menjadi Rp24 per SMS.

Pada tanggal 18 Januari 2017, BRTI melalui suratnya No. 20/BRTI/DPI/I/2017 dan No. 21/BRTI/DPI/I/2017, memutuskan untuk tetap memberlakukan tarif interkoneksi sesuai dengan DPI Perusahaan dan Telkomsel tahun 2014 sampai dengan tarif interkoneksi yang baru ditetapkan.

d. Tarif sewa jaringan

Melalui Peraturan Menkominfo No. 03/PER/M.KOMINFO/1/2007 tanggal 26 Januari 2007 tentang "Sewa Jaringan", Pemerintah mengatur bentuk penyediaan, jenis, struktur tarif, dan formula tarif layanan untuk sewa jaringan. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menkominfo tersebut, maka Pemerintah mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 115 Tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang "Persetujuan terhadap Dokumen Jenis Layanan Sewa Jaringan, Besaran Tarif Sewa Jaringan, Kapasitas Tersedia Layanan Sewa Jaringan, Kualitas Layanan Sewa Jaringan, dan Prosedur Penyediaan Layanan Sewa Jaringan Tahun 2008 Milik Penyelenggara Dominan Layanan Sewa Jaringan", sebagai persetujuan atas usulan Perusahaan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI (lanjutan)

e. Tarif jasa lainnya

Tarif sewa satelit, jasa teleponi, dan multimedia lainnya ditentukan oleh penyedia layanan dengan memperhitungkan berbagai pengeluaran dan harga pasar. Pemerintah hanya menetapkan formula tarif untuk layanan teleponi dasar. Tidak ada aturan untuk tarif atas jasa-jasa lainnya.

34. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN

a. Pembelian barang modal

Pada tanggal 31 Maret 2019, jumlah ikatan pembelian barang modal berdasarkan kontrak, terutama sehubungan dengan pengadaan dan instalasi untuk keperluan data, internet, dan jasa teknologi dan informatika, selular, peralatan transmisi dan jaringan kabel adalah sebagai berikut:

Mata uang	Jumlah dalam mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Rupiah		6.672
Dolar A.S.	50	713
Euro	1,26	20
HKD	0,79	1
Jumlah		7.406

Jumlah di atas termasuk perjanjian-perjanjian signifikan berikut:

(i) Perusahaan

Pihak yang terkait dengan kontrak	Tanggal perjanjian awal	Bagian yang signifikan dari perjanjian
Perusahaan dan NEC Corporation	12 Mei 2016	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Indonesia Global Gateway
Perusahaan dan Konsorsium Bisnis Submarine Cable	10 November 2017	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Sabang-Lhoksemawe-Medan
Perusahaan dan PT ZTE Indonesia	22 Desember 2017	Perjanjian Pengadaan ONT Retail Platform ZTE
Perusahaan dan PT Lintas Teknologi Indonesia	6 April 2018	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan DWDM Platform Nokia 2018
Perusahaan dan PT Huawei Tech Investment	3 Mei 2018	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan DWDM Platform Huawei
Perusahaan dan PT NEC Indonesia	7 Desember 2018	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan ISP SKKL NARU 2018
Perusahaan dan PT Master System Infotama	31 Desember 2018	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Ekspan IP Backbone

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Pembelian barang modal (lanjutan)

Jumlah di atas termasuk perjanjian-perjanjian signifikan berikut (lanjutan):

(ii) Telkomsel

Pihak yang terkait dengan kontrak	Tanggal perjanjian awal	Bagian yang signifikan dari perjanjian
Telkomsel, PT Ericsson Indonesia, Ericsson AB, PT Nokia Siemens Networks, NSN Oy, dan Nokia Siemens Network GmbH & Co. KG	17 April 2008	Perjanjian Pembangunan Jaringan Kombinasi 2G dan 3G
Telkomsel, PT Ericsson Indonesia dan PT Nokia Siemens Networks	17 April 2008	Perjanjian untuk Dukungan Teknik (TSA) untuk Jaringan Kombinasi 2G dan 3G
Telkomsel, PT Dimension Data Indonesia dan PT Huawei	3 Februari 2010	Perjanjian untuk Pemeliharaan dan Pengadaan Peralatan dan Jasa Terkait Next Generation Convergence Core Transport Rollout and Technical Support
Telkomsel, Amdocs Software Solutions Limited Liability Company dan PT Application Solutions	8 Februari 2010	Perjanjian Online Charging System ("OCS") and Service Control Points ("SCP") System Solution Development
Telkomsel dan PT Application Solutions	8 Februari 2010	Perjanjian Technical Support untuk Menyediakan Jasa technical support untuk OCS dan SCP
Telkomsel, Amdocs Software Solutions Limited Liability Company dan PT Application Solutions	5 Juli 2011	Perjanjian untuk Pengembangan dan Perpanjangan Customer Relationship Management dan Contact Center Solutions
Telkomsel dan PT Huawei	25 Maret 2013	Perjanjian untuk Dukungan Teknik (TSA) untuk Pengadaan Gateway GPRS Support Node ("GGSN") Service Complex
Telkomsel and Wipro Limited, Wipro Singapore Pte, Ltd, and PT WT Indonesia	23 April 2018	Perjanjian Pengembangan dan Pengadaan OSDSS Solution
Telkomsel dan PT Ericsson Indonesia	22 Oktober 2013	Perjanjian Pengadaan GGSN Service Complex Rollout

b. Perjanjian pinjaman dan fasilitas kredit lainnya

- (i) Pada tanggal 31 Maret 2019, Perusahaan memiliki fasilitas bank garansi untuk jaminan penawaran (*tender bond*), pelaksanaan (*performance bond*), pemeliharaan (*maintenance bond*), setoran jaminan dan uang muka (*advance payment bond*) berbagai proyek Perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

Kreditur	Jumlah fasilitas	Akhir periode fasilitas	Mata uang asal	Fasilitas digunakan
BRI	500	14 Maret 2020	Rp	60
BNI	500	31 Maret 2019	Rp	141
Bank Mandiri	500	23 Desember 2019	Rp	116
Jumlah	1.500			317

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Perjanjian pinjaman dan fasilitas kredit lainnya (lanjutan)

- (i) Telkomsel memiliki fasilitas jaminan, bank garansi dan fasilitas *standby letter of credit* sebesar US\$3 juta dari SCB, Jakarta. Fasilitas – fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2019.

Telkomsel memiliki fasilitas bank garansi dengan BRI sebesar Rp1.000 miliar. Fasilitas ini berakhir pada tanggal 25 September 2022. Atas fasilitas-fasilitas ini, pada tanggal 31 Desember 2018, Telkomsel telah menggunakan fasilitas bank garansi sebesar Rp499 miliar sebagai garansi atas perjanjian pembayaran untuk biaya hak pakai tahunan yang akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan sebesar Rp20 miliar sebagai jaminan pelaksanaan frekuensi radio yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Mei 2019 (Catatan 34c.i).

Telkomsel memiliki fasilitas bank garansi dengan BCA sebesar Rp150 miliar. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 15 April 2019.

Telkomsel juga memiliki fasilitas bank garansi dengan BNI sebesar Rp2.100 miliar. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 11 Desember 2019. Telkomsel menggunakan fasilitas ini untuk menggantikan deposito berjangka yang dijadikan jaminan yang dipersyaratkan untuk program KPU sebesar Rp52,2 miliar (Catatan 34c.iii) dan untuk *surety bond* sebesar Rp1.030 miliar sebagai jaminan pelaksanaan frekuensi radio 2,3 GHz (Catatan 34c.i).

- (iii) TII memiliki fasilitas bank garansi sebesar US\$15 juta setara dengan Rp202 miliar dari Bank Mandiri dan telah diperbaharui sesuai dengan adendum V (kelima) pada tanggal 18 Desember 2017 dengan batas kredit maksimum sebesar US\$10 juta setara dengan Rp135 miliar. Fasilitas ini berakhir pada tanggal 18 Desember 2018. Per tanggal 31 Desember 2018, TII belum menggunakan fasilitas bank garansi tersebut.
- (iv) Pada tanggal 31 Maret 2019, Sigma memiliki fasilitas bank garansi dari BNI dan HSBC sebesar Rp354 miliar. Saldo fasilitas bank garansi yang digunakan per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp156 miliar.

c. Lainnya

- (i) Penggunaan frekuensi radio

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.8 tanggal 2 November 2015, yang menggantikan Peraturan Pemerintah No.76 tanggal 15 Desember 2010, Telkomsel harus membayar biaya penggunaan frekuensi radio tahunan untuk pita frekuensi 800 Megahertz ("MHz"), 900 MHz, dan 1800 MHz ditentukan menggunakan formula yang ditetapkan dalam Peraturan.

Sebagai penerapan atas Peraturan Pemerintah tersebut, Perusahaan dan Telkomsel telah membayar biaya penggunaan frekuensi radio tahunan sejak 2010.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Lainnya (lanjutan)

(i) Penggunaan frekuensi radio (lanjutan)

Berdasarkan Surat Keputusan Menkominfo No. 1987 Tahun 2017 tanggal 15 November 2017, yang menggantikan Surat Keputusan No. 42 Tahun 2014 tanggal 29 Januari 2014, Menkominfo memberikan wewenang kepada Telkomsel untuk:

- (i) Layanan telekomunikasi bergerak dengan pita frekuensi radio di 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz, dan 2,3 GHz; dan
- (ii) Layanan telekomunikasi dasar.

Mengacu pada Surat Keputusan Menkominfo No. 268/KEP/M.KOMINFO/9/2009, No. 191 Tahun 2013, No. 509 Tahun 2016, dan No. 1896 Tahun 2017, Telkomsel diharuskan, antara lain untuk:

1. Membayar iuran tahunan Biaya Hak Penyelenggara ("BHP") yang dihitung berdasarkan formula tertentu selama jangka waktu lisensi (10 tahun) sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan. BHP terutang pada saat diterimanya Surat Pemberitahuan Pembayaran dari DJPPI. Iuran tahunan BHP terutang sampai dengan berakhirnya periode lisensi.
2. Mengeluarkan setiap tahunnya *performance bond* sebesar Rp20 miliar untuk pita frekuensi 2,1 GHz dan *surety bond* sebesar Rp1,03 triliun untuk pita frekuensi 2,3 GHz (Catatan 34b.ii).

(ii) Pembayaran sewa minimum masa depan sewa operasi

Grup menandatangani beberapa perjanjian sewa menyewa dengan pihak ketiga maupun pihak berelasi yang tidak dapat dibatalkan. Perjanjian tersebut meliputi sewa jaringan, peralatan telekomunikasi serta tanah dan bangunan dengan jangka waktu bervariasi berkisar 1 sampai dengan 10 tahun yang akan berakhir bervariasi antara tahun 2020 hingga 2029. Periode sewa menyewa dapat diperpanjang berdasarkan perjanjian oleh kedua belah pihak.

Jumlah pembayaran dan penerimaan sewa minimum di masa yang akan datang untuk perjanjian sewa operasi pada tanggal 31 Maret 2019 adalah sebagai berikut:

	Jumlah	Kurang dari 1 tahun	1-5 tahun	Lebih dari 5 tahun
Sebagai <i>lessee</i>	23.863	6.205	13.298	4.360
Sebagai <i>lessor</i>	4.052	1.054	2.440	558

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Lainnya (lanjutan)

(iii) KPU

Menkominfo menerbitkan Peraturan Menkominfo No. 17 Tahun 2016 tanggal 26 September 2016 yang menggantikan Surat Keputusan Menkominfo No. 45 Tahun 2012 dan peraturan-peraturan sebelumnya yang terkait kebijakan program KPU. Peraturan tersebut mengharuskan penyelenggara telekomunikasi untuk memberikan kontribusi sebesar 1,25% dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi (dengan mempertimbangkan piutang tidak tertagih dari penyelenggaraan telekomunikasi dan/atau beban interkoneksi dan/atau beban ketersambungan dan/atau pendapatan yang tidak diperhitungkan sebagai pendapatan kotor penyelenggara telekomunikasi) untuk pengembangan KPU.

Selanjutnya, Peraturan Menkominfo No. 17 tahun 2016 tanggal 26 September 2016 digantikan dengan Peraturan Menkominfo No. 19 tahun 2016 yang berlaku pada tanggal 8 November 2016. Peraturan tersebut menetapkan bahwa kontribusi pengembangan KPU berlaku efektif untuk tahun 2016 dan seterusnya.

Berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 25 tahun 2015 tanggal 30 Juni 2015, dalam hal penyediaan akses dan layanan telekomunikasi di daerah pedesaan (Program KPU), penyedia dipilih melalui proses seleksi oleh Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika ("BPPPTI"). BPPPTI menggantikan Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan ("BTIP") yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menkominfo No. 18/PER/M.KOMINFO/11/2010 tanggal 19 November 2010.

Pada tanggal 27 Desember 2011, Telkomsel (atas nama Konsorsium Telkomsel, konsorsium yang dibentuk dengan Dayamitra pada 9 Desember 2011) ditunjuk oleh BPPPTI sebagai penyedia Program KPU di daerah perbatasan untuk semua paket (paket 1 - 13) dengan total harga sebesar Rp830 miliar. Pada tanggal tersebut, Telkomsel juga ditunjuk oleh BPPPTI sebagai penyedia Program KPU (*Upgrading*) "Desa Pinter" atau "Desa Punya Internet" untuk paket 1, 2, dan 3 dengan total harga sebesar Rp261 miliar.

Pada tahun 2015, program tersebut dihentikan. Pada Januari 2016, Telkomsel mengajukan klaim arbitrase ke BANI terkait penyelesaian dari sisa piutang atas penyelenggaraan program tersebut.

Pada tanggal 22 Juni 2017, Telkomsel menerima surat keputusan BANI No.792/1/ARB-BANI/2016 yang menginstruksikan BPPPTI untuk membayar kompensasi kepada Telkomsel sebesar Rp217 miliar, dan sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Telkomsel telah menerima pembayaran dari BPPPTI sebesar Rp83 miliar (sebelum pajak).

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, nilai tercatat piutang Telkomsel terkait program KPU tersebut yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif adalah sebesar Rp115 miliar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM VALUTA ASING

Saldo aset dan liabilitas moneter dalam valuta asing adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2019			
	Dolar A.S. (dalam jutaan)	Yen Jepang (dalam jutaan)	Lain-lain* (dalam jutaan)	Setara Rupiah (dalam miliaran)
Aset				
Kas dan setara kas	239,68	8,22	12,99	3.585
Aset keuangan lancar lainnya	13,12	-	1,86	209
Piutang usaha				
Pihak berelasi	0,24	-	-	4
Pihak ketiga	155,69	-	9,14	2.322
Piutang lain-lain	0,47	-	0,12	8
Aset lancar lainnya	-	-	0,50	7
Aset tidak lancar lainnya	57,88	-	1,64	844
Jumlah aset	<u>467,08</u>	<u>8,22</u>	<u>26,25</u>	<u>6.979</u>
Liabilitas				
Utang usaha				
Pihak berelasi	(0,31)	-	-	(6)
Pihak ketiga	(191,28)	(7,50)	(5,08)	(2.777)
Utang lain-lain	(4,33)	-	(3,88)	(108)
Biaya yang masih harus dibayar	(37,09)	(49,15)	(1,66)	(553)
Pinjaman bank jangka pendek	(1,16)	-	-	(17)
Uang muka pelanggan dan pemasok	(0,57)	-	-	(8)
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	(21,67)	(767,90)	(4,19)	(468)
Liabilitas lainnya	-	-	-	-
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(18,17)	-	-	(259)
	<u>(78,93)</u>	<u>(3.839,49)</u>	<u>(3,68)</u>	<u>(1.671)</u>
Jumlah liabilitas	<u>(353,51)</u>	<u>(4.664,04)</u>	<u>(18,49)</u>	<u>(5.867)</u>
Aset (liabilitas) bersih	<u>113,57</u>	<u>(4.655,82)</u>	<u>7,76</u>	<u>1.112</u>
	31 Desember 2018			
	Dolar A.S. (dalam jutaan)	Yen Jepang (dalam jutaan)	Lain-lain* (dalam jutaan)	Setara Rupiah (dalam miliaran)
Aset				
Kas dan setara kas	253,37	8,02	10,50	3.802
Aset keuangan lancar lainnya	14,56	-	1,30	223
Piutang usaha				
Pihak berelasi	0,49	-	-	7
Pihak ketiga	146,39	-	9,55	2.238
Piutang lain-lain	0,34	-	0,12	6
Aset lancar lainnya	-	-	0,51	14
Aset tidak lancar lainnya	57,42	-	1,17	840
Jumlah aset	<u>472,57</u>	<u>8,02</u>	<u>23,15</u>	<u>7.130</u>
Liabilitas				
Utang usaha				
Pihak berelasi	(0,21)	-	-	(3)
Pihak ketiga	(206,20)	(33,39)	(4,99)	(3.037)
Utang lain-lain	(3,63)	-	(4,44)	(111)
Biaya yang masih harus dibayar	(47,10)	(15,64)	(2,51)	(709)
Pinjaman bank jangka pendek	(1,15)	-	-	(17)
Uang muka pelanggan dan pemasok	(0,76)	-	-	(11)
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	(18,77)	(767,90)	(4,07)	(430)
Liabilitas lainnya	(19,63)	-	-	(284)
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(93,41)	(3.839,49)	(4,71)	(1.917)
Jumlah liabilitas	<u>(390,86)</u>	<u>(4.656,42)</u>	<u>(20,72)</u>	<u>(6.519)</u>
Aset (liabilitas) bersih	<u>81,71</u>	<u>(4.648,40)</u>	<u>2,43</u>	<u>611</u>

*Aset dan liabilitas dalam mata uang asing disajikan dalam setara Dolar A.S. dengan menggunakan kurs beli dan jual yang diterbitkan oleh Reuters pada akhir periode pelaporan.

Aktivitas Grup memiliki kemungkinan terhadap berbagai risiko keuangan termasuk dampak perubahan harga pasar surat utang dan efek, nilai tukar mata uang asing, dan tingkat bunga.

Jika Grup melaporkan aset dan liabilitas dalam mata uang asing pada tanggal 31 Maret 2019 menggunakan kurs tanggal 30 April 2019, keuntungan selisih kurs yang belum terealisasi sebesar Rp2 miliar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

1. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

a. Klasifikasi

i. Aset keuangan

	<u>31 Maret 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Utang dan piutang		
Kas dan setara kas	23.380	17.439
Aset keuangan lancar lainnya	890	834
Piutang usaha dan lain-lain, bersih	15.129	12.141
Aset tidak lancar lainnya	399	460
Aset keuangan tersedia untuk dijual		
Penyertaan tersedia untuk dijual	1.211	1.204
Jumlah aset keuangan	<u>41.009</u>	<u>32.078</u>

ii. Liabilitas keuangan

	<u>31 Maret 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai amortisasi		
Utang usaha dan utang lain-lain	18.093	15.214
Beban yang masih harus dibayar	12.161	12.769
Pinjaman		
Utang bank jangka pendek	3.774	4.043
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	904	949
Obligasi dan wesel bayar	10.482	10.481
Utang bank jangka panjang	23.277	23.225
Utang sewa pembiayaan	2.928	3.145
Pinjaman lainnya	2.152	2.244
Jumlah liabilitas keuangan	<u>73.771</u>	<u>72.070</u>

b. Nilai wajar

			Pengukuran nilai wajar pada tanggal pelaporan menggunakan		
			Harga pasar aset atau liabilitas sejenis pada pasar aktif (level 1)	Input signifikan yang dapat diobservasi (level 2)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (level 3)
31 Maret 2019	Jumlah nilai tercatat	Nilai wajar			
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar					
Penyertaan tersedia untuk dijual	1.211	1.211	460	-	751
Liabilitas keuangan yang nilai wajarnya disajikan					
Pinjaman					
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	904	857	-	-	898
Obligasi dan wesel bayar	10.482	11.093	9.597	-	1.496
Utang bank jangka panjang	23.277	23.070	-	-	23.070
Utang sewa pembiayaan	2.928	2.928	-	-	2.928
Pinjaman lainnya	2.152	2.181	-	-	2.181
Jumlah	<u>40.954</u>	<u>41.340</u>	<u>10.057</u>	<u>-</u>	<u>31.324</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

1. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

b. Nilai wajar (lanjutan)

31 Desember 2018	Jumlah nilai tercatat	Nilai wajar	Pengukuran nilai wajar pada tanggal pelaporan menggunakan		
			Harga pasar aset atau liabilitas sejenis pada pasar aktif (level 1)	Input signifikan yang dapat diobservasi (level 2)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (level 3)
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar					
Penyertaan tersedia untuk dijual	1.204	1.204	470	-	734
Liabilitas keuangan yang nilai wajarnya disajikan					
Pinjaman					
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	949	898	-	-	898
Obligasi dan wesel bayar	10.481	10.894	9.380	-	1.514
Utang bank jangka panjang	23.225	22.878	-	-	22.878
Utang sewa pembiayaan	3.145	3.145	-	-	3.145
Pinjaman lainnya	2.244	2.154	-	-	2.154
Liabilitas lainnya	261	261	-	-	261
Jumlah	41.509	41.434	9.850	-	31.584

Keuntungan atas pengukuran nilai wajar yang diakui pada laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Selama periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 senilai Rp3 miliar. Tidak ada perpindahan antar hirarki nilai wajar selama tahun 2019.

c. Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah jumlah suatu aset dapat ditukarkan, atau suatu liabilitas dapat diselesaikan, antara berbagai pihak secara *arm's length transaction*.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan jangka pendek dengan jatuh tempo satu tahun atau kurang (kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, aset lancar lainnya, utang usaha, utang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, dan utang bank jangka pendek), penyertaan jangka panjang, uang muka dan aset tidak lancar lainnya dipertimbangkan mendekati nilai bukunya sebagai hasil dari pendiskontoan yang tidak signifikan.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan jangka panjang (aset tidak lancar lainnya (piutang jangka panjang dan kas dibatasi penggunaannya) dan liabilitas tidak lancar lainnya) dipertimbangkan mendekati nilai bukunya karena diukur berdasarkan hasil dari pendiskontoan arus kas di masa yang akan datang.

Grup menentukan pengukuran nilai wajar untuk tujuan pelaporan dari tiap kelas aset dan liabilitas keuangan berdasarkan metode dan asumsi sebagai berikut:

- (i) Aset tersedia untuk dijual terutama terdiri dari saham, reksadana, obligasi korporasi dan Pemerintah, dan obligasi konversi. Saham dan reksadana yang aktif diperdagangkan di pasar yang tersedia dinyatakan pada nilai wajarnya dengan menggunakan kuotasi harga pasar atau jika tidak dikuotasi, ditentukan menggunakan teknik valuasi. Nilai wajar obligasi konversi ditentukan dengan menggunakan teknik valuasi. Obligasi korporasi dan Pemerintah dinyatakan pada nilai wajar dengan referensi harga dari surat berharga yang sejenis pada tanggal pelaporan.
- (ii) Nilai wajar liabilitas keuangan jangka panjang diestimasi dengan mendiskontokan arus kas kontraktual masa depan dari tiap liabilitas pada tingkat suku bunga yang ditawarkan kepada Grup untuk liabilitas sejenis yang jatuh temponya bisa diperbandingkan oleh para pelaku bank Grup, kecuali untuk obligasi yang didasarkan pada harga pasar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

1. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

c. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Estimasi nilai wajar bersifat *judgmental* dan melibatkan batasan-batasan yang beragam, termasuk:

- a. Nilai wajar disajikan tidak mempertimbangkan dampak fluktuasi mata uang di masa depan.
- b. Estimasi nilai wajar tidak selalu mengindikasikan nilai yang Grup akan catat pada saat pelepasan/penghentian aset dan liabilitas keuangan.

2. Manajemen risiko keuangan

Aktivitas Grup mengandung berbagai macam risiko keuangan, seperti risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit, dan risiko likuiditas. Secara keseluruhan, program manajemen risiko keuangan Grup bertujuan untuk meminimalkan kerugian atas nilai aset dan liabilitas yang dapat timbul dari pergerakan nilai tukar mata uang asing dan pergerakan tingkat suku bunga. Manajemen mempunyai kebijakan tertulis untuk manajemen risiko valuta asing yang sebagian besar melalui penempatan deposito berjangka dan lindung nilai untuk mengantisipasi risiko fluktuasi valuta asing untuk jangka waktu 3 sampai dengan 12 bulan.

Fungsi manajemen risiko keuangan dijalankan oleh unit *Corporate Finance* di bawah kebijakan-kebijakan yang disetujui oleh Direksi. Unit *Corporate Finance* mengidentifikasi, mengevaluasi, dan melakukan aktivitas lindung nilai risiko-risiko keuangan.

a. Risiko nilai tukar mata uang asing

Grup rentan terhadap risiko nilai tukar mata uang asing atas transaksi penjualan, pembelian, dan pinjaman yang didenominasi dalam mata uang asing. Transaksi yang didenominasi dalam mata uang asing terutama dalam Dolar A.S. dan Yen Jepang. Eksposur risiko nilai tukar mata uang asing Grup tidak material.

Risiko kenaikan nilai tukar mata uang asing terhadap liabilitas Grup diharapkan dapat saling hapus dengan dampak dari nilai tukar atas deposito berjangka dan piutang dalam mata uang asing yang ditetapkan minimal 25% dari liabilitas jangka pendek dalam mata uang asing yang terutang.

Tabel di bawah ini menggambarkan eksposur aset dan liabilitas keuangan Grup terhadap risiko nilai tukar mata uang:

	31 Maret 2019		31 Desember 2018	
	Dolar A.S. (dalam juta)	Yen Jepang (dalam juta)	Dolar A.S. (dalam juta)	Yen Jepang (dalam juta)
Aset keuangan	0,47	0,01	0,47	0,01
Liabilitas keuangan	(0,35)	(4,66)	(0,39)	(4,66)
Eksposur bersih	0,12	(4,65)	0,08	(4,65)

Analisis sensitivitas

Penguatan Dolar A.S. dan Yen Jepang, sebagaimana diindikasikan di bawah, terhadap Rupiah pada 31 Maret 2019 akan menurunkan ekuitas dan laba atau rugi sebesar jumlah yang ditunjukkan di bawah. Analisis ini didasarkan pada varian nilai tukar mata uang asing yang Grup pertimbangkan sebagai sangat mungkin terjadi pada tanggal pelaporan. Analisis mengasumsikan bahwa seluruh variabel lain, pada khususnya tingkat bunga, tidak berubah.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

2. Manajemen risiko keuangan (lanjutan)

a. Risiko nilai tukar mata uang asing (lanjutan)

31 Maret 2019	<u>Ekuitas/ laba (rugi)</u>
Dolar A.S. (penguatan 1%)	16
Yen Jepang (penguatan 5%)	(30)

Pelemahan Dolar A.S. dan Yen Jepang terhadap Rupiah pada 31 Maret 2019 akan mempunyai dampak yang setara tetapi berlawanan terhadap jumlah yang ditunjukkan di atas, pada dasar seluruh variabel lain tidak berubah.

b. Risiko harga pasar

Grup rentan terhadap perubahan dalam harga pasar atas utang dan ekuitas terkait penyertaan tersedia untuk dijual yang dicatat pada nilai wajar. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar penyertaan tersedia untuk dijual diakui pada laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya.

Kinerja penyertaan tersedia untuk dijual Grup dimonitor secara berkala, bersama dengan penilaian secara teratur mengenai keterkaitannya dengan rencana strategis jangka panjang Grup.

Pada tanggal 31 Maret 2019, manajemen mempertimbangkan risiko harga untuk penyertaan tersedia untuk dijual adalah tidak material dalam hal dampak yang mungkin terjadi pada laba rugi dan total ekuitas dari perubahan dalam nilai wajar yang sangat mungkin terjadi.

c. Risiko tingkat suku bunga

Pergerakan tingkat suku bunga diawasi untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap posisi keuangan. Pinjaman dalam berbagai tingkat suku bunga menyebabkan Grup terpapar risiko tingkat suku bunga (Catatan 15 dan 16). Untuk mengukur risiko pasar atas pergerakan suku bunga, Grup melakukan analisis pada pergerakan margin suku bunga dan pada profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan berdasarkan jadwal perubahan suku bunga.

Pada tanggal pelaporan, profil risiko tingkat bunga pinjaman yang dikenakan bunga milik Grup adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2019	31 Desember 2018
Pinjaman bunga tetap	(20.595)	(21.160)
Pinjaman bunga mengambang	(22.922)	(22.827)

Analisis sensitivitas untuk pinjaman bunga mengambang

Pada 31 Maret 2019, penurunan (kenaikan) 25 poin dasar pada tingkat bunga pinjaman bunga mengambang akan menaikkan (menurunkan) ekuitas dan laba atau rugi masing-masing sebesar Rp57,3 miliar. Analisis mengasumsikan bahwa seluruh variabel lain, pada khususnya nilai tukar mata uang asing, tidak berubah.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

2. Manajemen risiko keuangan (lanjutan)

d. Risiko kredit

Tabel di bawah ini menggambarkan eksposur maksimum risiko kredit atas aset keuangan Grup:

	31 Maret 2019	31 Desember 2018
Kas dan setara kas	23.380	17.439
Aset keuangan lancar lainnya	1.350	1.304
Piutang usaha dan lain-lain, bersih	15.129	12.141
Aset tidak lancar lainnya	399	460
Jumlah	40.258	31.344

Grup rentan terhadap risiko kredit terutama dari piutang usaha dan piutang lain-lain. Risiko kredit dikendalikan dengan pengawasan terus menerus atas saldo dan penagihan.

Risiko kredit yang berasal dari saldo bank dan institusi keuangan dikelola oleh Grup melalui Unit *Corporate Finance* sesuai dengan kebijakan tertulis dari Grup. Grup menempatkan sebagian besar kas dan setara kasnya di bank milik pemerintah karena bank milik pemerintah memiliki jaringan cabang terluas di Indonesia dan dipertimbangkan sebagai bank terpercaya dikarenakan dimiliki oleh pemerintah. Oleh karena itu, penempatan ini bertujuan untuk meminimalisasi kerugian secara finansial yang berasal dari potensi kegagalan dalam pembayaran dari bank dan institusi keuangan.

Risiko kredit pelanggan dikelola dengan memantau saldo piutang dan penagihannya secara berkala. Piutang usaha dan piutang lain-lain tidak memiliki suatu konsentrasi utama risiko kredit dimana tidak ada saldo piutang pelanggan yang melebihi 3,53% dari piutang usaha dan piutang lain-lain pada tanggal 31 Maret 2019.

Manajemen yakin akan kemampuannya untuk mengawasi dan mempertahankan eksposur risiko kredit yang minimal, dimana Grup telah menyediakan provisi yang memadai untuk menutupi kerugian yang timbul dari piutang yang tidak tertagih berdasarkan data kerugian historis.

e. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas timbul apabila Grup mengalami kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangan ketika liabilitas keuangan tersebut jatuh tempo.

Manajemen risiko likuiditas berarti menjaga kecukupan saldo kas dalam upaya pemenuhan liabilitas keuangan Grup. Grup secara terus menerus melakukan analisis untuk mengawasi rasio-rasio likuiditas laporan posisi keuangan, seperti antara lain: rasio likuiditas dan rasio *debt equity* terhadap persyaratan-persyaratan yang diharuskan perjanjian utang.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

2. Manajemen risiko keuangan (lanjutan)

e. Risiko likuiditas (lanjutan)

Berikut adalah analisis jatuh tempo liabilitas keuangan Grup:

	Nilai buku	Arus kas wajib					2023 dan selanjutnya
		2019	2020	2021	2022		
31 Maret 2019							
Utang usaha dan lain-lain	18.093	(18.093)	(18.093)	-	-	-	-
Beban yang masih harus dibayar	12.161	(12.161)	(12.161)	-	-	-	-
Pinjaman							
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	904	(1.023)	(237)	(193)	(202)	(157)	(234)
Obligasi dan wesel bayar	10.482	(18.788)	(1.552)	(3.184)	(1.231)	(2.817)	(10.004)
Utang bank	27.051	(30.828)	(11.007)	(6.945)	(3.942)	(3.241)	(5.693)
Pinjaman lainnya	2.152	(2.868)	(522)	(456)	(557)	(511)	(822)
Utang sewa pembiayaan	2.928	(3.478)	(988)	(730)	(779)	(597)	(384)
Jumlah	73.771	(87.239)	(44.560)	(11.508)	(6.711)	(7.323)	(17.137)

	Nilai buku tercatat	Arus kas wajib					2023 dan selanjutnya
		2019	2020	2021	2022		
31 Desember 2018							
Utang usaha dan lain-lain	15.214	(15.214)	(15.214)	-	-	-	-
Beban yang masih harus dibayar	12.769	(12.769)	(12.769)	-	-	-	-
Pinjaman							
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	949	(1.075)	(242)	(232)	(205)	(159)	(237)
Obligasi dan wesel bayar	10.481	(19.050)	(1.562)	(3.436)	(1.231)	(2.817)	(10.004)
Utang bank	27.268	(33.363)	(10.434)	(9.160)	(3.991)	(3.219)	(6.559)
Pinjaman lainnya	2.244	(2.905)	(490)	(570)	(533)	(495)	(817)
Utang sewa pembiayaan	3.145	(3.764)	(1.049)	(945)	(781)	(605)	(384)
Liabilitas lainnya	261	(306)	(16)	(36)	(36)	(109)	(109)
Jumlah	72.331	(88.446)	(41.776)	(14.379)	(6.777)	(7.404)	(18.110)

Perbedaan antara nilai buku dengan arus kas wajib merupakan nilai bunga. Nilai bunga dari pinjaman mengambang ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga efektif pada tanggal pelaporan.

Perubahan dalam kenaikan liabilitas dari kegiatan pendanaan adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2019	Arus kas	Perubahan non tunai			31 Maret 2019
			Akuisisi	Perubahan valuta asing	Sewa baru	
Utang bank jangka pendek	4.043	(273)				3.774
Pinjaman penerusan (<i>two step loan</i>)	949	(36)	-	-	-	904
Obligasi dan wesel bayar	10.481	-	-	-	-	10.482
Utang bank jangka panjang	23.225	(330)	378	(15)	-	23.278
Pinjaman lainnya	2.244	(93)	-	-	-	2.152
Utang sewa pembiayaan	3.145	(225)	-	-	8	2.928
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	44.087	(957)	378	(15)	8	43.518

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. MANAJEMEN MODAL

Struktur modal Grup adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2019		31 Desember 2018	
	Jumlah	Bagian	Jumlah	Bagian
Utang jangka pendek	3.774	2,54%	4.043	2,83%
Utang jangka panjang	39.744	26,74%	40.044	28,00%
Total utang	43.518	29,28%	44.087	30,83%
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik	105.108	70,72%	98.910	69,17%
Jumlah	148.626	100,00%	142.997	100,00%

Tujuan Grup dalam pengelolaan permodalan adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha Grup guna memberikan imbal hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemegang kepentingan lainnya serta menjaga struktur modal yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

Secara berkala, Grup melakukan penilaian utang untuk menilai kemungkinan pembiayaan kembali kewajiban yang ada dengan yang baru yang memiliki biaya yang lebih efisien yang akan mengarahkan pada biaya utang yang lebih optimal. Dalam kasus kas menganggur dengan kesempatan investasi terbatas, Grup akan mempertimbangkan membeli kembali saham-sahamnya atau membayar dividen kepada para pemegang sahamnya.

Sebagai tambahan untuk patuh kepada pembatasan-pembatasan utang, Grup juga menjaga struktur modalnya pada tingkat yang diyakini tidak akan membahayakan peringkat kredit dan yang hampir setara dengan pesaingnya.

Rasio utang terhadap ekuitas (perbandingan utang dengan bunga bersih terhadap total ekuitas) adalah rasio yang dimonitor oleh manajemen untuk mengevaluasi struktur modal Grup dan mengkaji efektifitas utang Grup. Grup memonitor tingkat utangnya untuk meyakinkan bahwa rasio utang terhadap ekuitas sesuai atau dibawah rasio yang ditetapkan dalam pinjaman kontraktual dan bahwa rasio tersebut sebanding atau lebih baik daripada entitas industri telekomunikasi lain dalam area regional.

Rasio utang terhadap ekuitas Grup pada 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2019	31 Desember 2018
Jumlah utang dengan bunga	43.518	44.087
Dikurangi: kas dan setara kas	(23.380)	(17.439)
Utang bersih	20.138	26.648
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik	105.108	98.910
Rasio utang bersih terhadap ekuitas	19,16%	26,94%

Sebagaimana disajikan dalam Catatan 16, Grup dipersyaratkan untuk memelihara rasio utang terhadap ekuitas dan rasio *debt service coverage* tertentu oleh kreditur. Selama periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan telah mematuhi persyaratan permodalan yang diberikan oleh pihak eksternal.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Maret 2019 dan untuk Periode Tiga Bulan
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS

Aktivitas non-kas investasi untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	2019	2018
Penambahan aset tetap melalui:		
Utang usaha	6.971	5.668
Sewa pembiayaan	25	146
Kapitalisasi bunga	22	32
Penambahan aset tak berwujud melalui:		
Utang usaha	570	146